

Jurnal Budget

Vol. 4, No. 2, 2019

ISSN 2541-5557

Pusat Kajian Anggaran

Badan Keahlian DPR RI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

JURNAL BUDGET

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Redaktur

Ade Nurul Aida, S.E

Martha Carolina, S.E., Ak., M. Ak.

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Rendy Alvaro, S.Sos

Editor

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska, SIP

Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di jurnal ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai isu-isu keuangan negara terkini yang dapat menjadi dukungan substansi bagi pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Ilmiah Jabatan Fungsional Analis APBN yang bernama "*Budget*" kembali terbit dan memasuki volume keempat. Jurnal Budget Volume 4 Edisi 2 merupakan hasil dari proses penulisan dan redaksional yang dimulai dari awal tahun 2019 hingga terbit pada bulan Desember 2019.

Terbitan Jurnal Budget ini merupakan hasil kerja redaksi dan para Analis APBN dari Pusat Kajian Anggaran, sebagai penulis utama, dan tentunya pimpinan Pusat Kajian Anggaran BKD DPR RI beserta jajarannya. Redaksi tetap memberikan kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk ikut memberikan masukan dan menentukan tata kelola yang terbaik serta ikut berkontribusi dalam Jurnal *Budget* ini.

Jurnal *Budget* dalam setiap terbitan berisi materi yang membahas seputar permasalahan dalam keuangan negara yang merupakan lingkup tugas dari Jabatan Fungsional Analis APBN. Sebagai *output* yang diterbitkan di lingkungan parlemen, yaitu MPR/DPR/DPD RI maka diharapkan materi yang disajikan di dalamnya, meskipun bersifat ilmiah dan pembahasan keilmuan/akademik, namun tetap mampu menjadi sumber informasi, memberikan kontribusi data-data hingga rekomendasi bagi tugas dan kewenangan khususnya Anggota DPR RI.

Meskipun telah mencapai volume keempat, jurnal kami masih tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, Redaksi mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak atau *stakeholders*, demi perbaikan dan peningkatan kualitas jurnal sebagaimana harapan kita semua.

Redaksi berharap semoga artikel-artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal ini mampu memberikan manfaat bagi analis APBN, peneliti, anggota parlemen, maupun pihak-pihak akademisi dan profesional yang mempunyai minat dalam penelitian terkait isu-isu keuangan negara.

Dewan Redaksi

Jurnal Budget

Vol. 4, No. 2, 2019

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	v
Daftar Isi	vi
Analisis Hubungan Tunjangan Profesional Guru Dan Ujian Nasional <i>Adhi Prasetyo Satrio Wibowo</i>	1
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Inflasi Inti Di Indonesia <i>Ratna Christianingrum & Riza Aditya Syafri</i>	18
Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Sebelum Dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa Di Tahun 2014 Dan Tahun 2017 <i>Slamet Widodo</i>	40
Analisis Efektivitas Jalur Suku Bunga Dalam Mekanisme Kebijakan Moneter Di Indonesia (Periode 2009-2018) <i>Rastri Paramita</i>	61
Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Bidang Perumahan Dan Permukiman Pada Pemerintah Pusat <i>Dwi Resti Pratiwi</i>	82
Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Indonesia <i>Rendy Alvaro & Ervita Luluk Zahara</i>	106
Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Kejadian <i>Stunting</i> Di Indonesia <i>Ade Nurul Aida</i>	125
Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah <i>Marihot Nasution</i>	141
Analisis Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Dan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Irigasi <i>Robby Alexander Sirait</i>	159

Dampak Penggunaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Terhadap Kesejahteraan Petani

Dahiri..... 178

ANALISIS HUBUNGAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN UJIAN NASIONAL

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo

Ringkasan

Salah satu komponen pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar siswa mempunyai kecerdasan dan berkarakter adalah guru. Hal ini dikarenakan guru sebagai ujung tombak tercapainya tujuan pembelajaran terutama bagi peserta didik. Guru harus senantiasa meningkatkan kemampuan profesional serta mutu mengajarnya agar dapat mengajar secara lebih efektif.

Tunjangan profesi guru (TPG) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya standar kompetensi kelulusan. Anggaran TPG cenderung meningkat setiap tahun, namun standar kompetensi kelulusan cenderung menurun. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan TPG dan Ujian Nasional (UN). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari anggaran TPG dan hasil UN. Anggaran tunjangan profesi guru dari 2012-2018. Mengingat skor UN yang digunakan adalah skor UN agregat nasional rata-rata 2012-2018. Sedangkan model yang digunakan adalah uji korelasi orang dan Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara TPG dan UN memiliki arah positif, tetapi tidak signifikan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INFLASI INTI DI INDONESIA

Ratna Christianingrum, Riza Aditya Syafri

Ringkasan

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang penting. Tingkat inflasi dapat menggambarkan kondisi perekonomian nasional. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli uang. Inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi pendapatan riil masyarakat. Hal ini berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Volatilitas tingkat inflasi di Indonesia menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan dengan *emerging market and developing economies*. Volatilitas tingkat inflasi Indonesia lebih besar dibandingkan volatilitas inflasi dari negara berkembang lainnya. Selain itu, karakteristik inflasi di Indonesia juga berbeda dengan negara berkembang lainnya. Hal ini terlihat dari pola fluktuasi tingkat inflasi yang berbeda.

Dalam proses pengambilan kebijakan moneter yang tepat, diperlukan suatu nilai prediksi inflasi inti yang akurat. Hal ini dikarenakan pengukuran inflasi secara agregat sebagai fenomena moneter sulit untuk dilakukan. Selain itu, peristiwa non moneter yang terjadi hanya menghasilkan *noise* pada indeks harga secara sementara. Inflasi inti itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk memperoleh prediksi nilai inflasi inti yang tepat, maka perlu diketahui faktor yang mempengaruhi inflasi inti di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh harga bahan bakar, tingkat suku bunga, Produk Domestik Bruto (PDB), harga emas, *Industrial Production Index* (IPI), nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika (USD), serta jumlah uang yang beredar terhadap nilai inflasi inti di Indonesia.

Berdasarkan model *Vector Error Correction Model* (VECM) yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek PDB, IPI, Kurs, dan jumlah uang yang beredar (M1) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai inflasi inti di Indonesia. Sedangkan dalam jangka panjang, harga bahan bakar, PDB, serta nilai kurs memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai inflasi inti di Indonesia. Setelah diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi, maka penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk membangun model yang dapat memprediksi nilai inflasi secara tepat dan akurat.

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA SEBELUM DAN SESUDAH PENGALOKASIAN DANA DESA DI TAHUN 2014 DAN TAHUN 2017

Slamet Widodo

Ringkasan

Peningkatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN mulai tahun 2015 telah meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam membiayai kegiatan pembangunan masyarakat desa. Hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan dana desa menunjukkan semakin membaiknya kondisi sarana dan prasarana desa serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Meningkatnya sumber pendapatan desa setiap tahunnya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam mewujudkan kemandirian ekonominya.

Pelaksanaan otonomi daerah selama dua dekade tidak dapat dipungkiri masih belum mampu mengurangi ketergantungan (kemandirian) pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Analisis APBD tahun 2017 menunjukkan rasio kemandirian yang bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia. Rasio kemandirian secara nasional sebesar 24,2 persen. Wilayah yang memiliki rasio kemandirian di atas rata-rata nasional adalah wilayah Jawa dengan persentase sebesar 34,8 persen, sementara di wilayah lainnya berada di bawah rata-rata nasional.

Dana desa yang dialokasikan dari APBN mulai tahun 2015, harus menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan dalam memperbaiki arah dan kebijakan pembangunan berbasis desa. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan ketergantungan baru yang dapat membebani ruang fiskal pemerintah. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan penilaian awal atas beberapa indikator keuangan pemerintah desa untuk mengetahui kinerja indikator tersebut sebelum dan sesudah pelaksanaan transfer dana desa. Adapun indikator yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan, rasio efisiensi, rasio belanja operasional, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan pendapatan dengan menggunakan data sekunder APBDes hasil survey BPS tahun 2014 dan tahun 2017.

Metode analisis yang digunakan yaitu anova satu jalur untuk melihat terdapat atau tidak adanya perbedaan kinerja indikator tersebut sebelum dan sesudah adanya dana desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada rasio yang diukur, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan, rasio belanja operasional, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan pendapatan, namun tidak terdapat perbedaan pada rasio efisiensi belanja pada pemerintahan desa.

ANALISIS EFEKTIVITAS JALUR SUKU BUNGA DALAM MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA (PERIODE 2009-2018)

Rastri Paramita

RINGKASAN

Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada hakekatnya mendeskripsikan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga dalam memengaruhi inflasi yang diproxykan dengan IHK.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui pengukuran kecepatan atau *time lag* yang dibutuhkan dalam merespon *shock* suku bunga kebijakan dan mengukur berapa besar kekuatan variabel-variabel pada suatu jalur dalam merespon adanya *shock* suku bunga kebijakan. Variabel yang digunakan adalah suku bunga kebijakan (rSBK) sebagai alat kebijakan moneter, suku bunga deposito (rDeposito), dan suku bunga kredit (rKredit) sebagai transmisi ke sektor riil, dan IHK sebagai proxy dari inflasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur bunga belum efektif memengaruhi inflasi karena berdasarkan hasil uji *granger* tidak terjadi kausalitas antara rSBK dengan IHK. Tenggat waktu yang dibutuhkan mencapai 5 periode. Sedangkan *shock* dari suku bunga kebijakan cukup lemah pengaruhnya terhadap variabel suku bunga kredit dan suku bunga deposito yang menjadi transmisi inflasi yaitu di bawah 2 persen. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mishkin (1995) bahwa kompleksitas mekanisme transmisi berkaitan dengan perubahan pada peran dan cara bekerjanya saluran-saluran transmisi moneter dalam suatu perekonomian.

Saran terhadap penelitian selanjutnya agar menambahkan transmisi ke sektor riil tidak hanya melalui suku bunga deposito dan suku bunga kredit saja. Selain itu, sebaiknya juga dilakukan penambahan terhadap faktor yang lebih mencerminkan sektor riil sehingga mampu lebih detail mencermati variabel apa saja yang dominan memengaruhi transmisi kebijakan moneter di Indonesia.

EVALUASI SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PADA PEMERINTAH PUSAT

Dwi Resti Pratiwi

Ringkasan

Sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran merupakan kunci dari keberhasilan suatu pembangunan. Namun, sayangnya kondisi tersebut belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. *Impact* dari pembangunan 2015-2019 ini belum sepenuhnya berhasil terlihat dari capaian angka kemiskinan sebesar 9,2 persen yang jauh dari target RPJMN. Prioritas nasional yang tidak tercapai tersebut menjadi indikasi bahwa terjadi masalah dalam *level* perencanaan program (*outcome*), keluaran (*output*), hingga kurang sinkronnya dengan anggaran (*input*) dalam mendukung pelaksanaan perencanaannya. Bidang permukiman dan perumahan yang dijalankan melalui program prioritas pembangunan perumahan dan pengembangan infrastruktur permukiman merupakan *outcome* yang dikejar untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, belum berhasil karena diindikasikan terdapat kelemahan dari sisi perencanaan dan penganggaran. Meskipun pemerintah mengklaim telah menggunakan pendekatan *money follow program* dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, namun hasilnya kurang sesuai yang diharapkan.

Terkait hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran bidang permukiman dan perumahan pada periode 2015-2019. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan membandingkan perencanaan dalam beberapa dokumen rencana pemerintah pusat yaitu RPJMN, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu pendekatan analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan *Logical Framework Analysis* (LFA). LFA ini merupakan alat analisis dalam manajemen berorientasi hasil atau *Results based Management* yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*output*) dan hasil (*outcome*).

Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan antar dokumen perencanaan serta kurang sinkronnya perencanaan dan penganggaran untuk bidang perumahan dan permukiman hampir terjadi tiap tahunnya pada periode 2015-2019 yang berdampak pada ketidaktercapaian target program prioritas tersebut. Diharapkan pada periode pemerintah 2019-2024, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lebih diperhatikan untuk mewujudkan target pembangunan yang optimal serta pengawasan DPR terkait pelaksanaan anggaran untuk lebih diperketat yang dapat menjadi evaluasi dalam perencanaan tahun berikutnya.

PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA DESA, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Rendy Alvaro dan Ervita Luluk Zahara

Ringkasan

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama bangsa yang harus diselesaikan. Pemerintah telah mengalokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang salah satu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model*. Cakupan penelitian ini yaitu 33 provinsi di Indonesia yang terdiri dari 434 kabupaten/kota dengan series data tahun 2015-2018. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil penelitian menunjukkan DBH dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia. Sementara Dana Desa dan PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia. Saran yang disampaikan oleh penulis adalah pertama, pengalokasian Dana Desa kepada pemerintah kabupaten dan kota mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, sehingga perlu terus adanya dukungan kebijakan dari pemerintah dalam pemanfaatan Dana Desa agar dana dapat digunakan secara optimal dan terarah bagi kesejahteraan masyarakat wilayahnya. Kedua, diharapkan setiap pemerintah daerah hendaknya mendorong dan memacu peningkatan PDRB sehingga tingkat kemiskinan di wilayahnya dapat terus diturunkan.

PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI TERHADAP KEJADIAN STUNTING DI INDONESIA

Ade Nurul Aida

Ringkasan

Stunting masih menjadi masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia, mengingat angka prevalensi stunting tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Di tahun 2018 angka prevalensi balita di Indonesia masih jauh berada di atas ambang yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20 persen, yakni berada pada angka 30,8 persen. Bahkan menempatkan Indonesia menjadi negara ke 6 dengan jumlah balita stunting tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Selain kurang optimalnya perkembangan fisik dan kognitif, dalam jangka panjang stunting juga menyebabkan kemampuan produktif berkurang, kesehatan yang buruk, peningkatan risiko penyakit *degenerative*, penurunan prestasi akademik, serta lebih rentan terhadap penyakit tidak menular. Banyak faktor yang menjadi penyebab risiko terjadinya stunting, mulai dari pemberian ASI non-eksklusif selama 6 bulan pertama, kelahiran prematur, panjang kelahiran bayi yang kurang (pendek), ibu yang pendek, akses yang buruk ke perawatan kesehatan, anak yang berasal dari rumah tangga dengan jamban yang tidak diperbaiki dan tidak dirawat, hingga faktor sosial ekonomi juga berpengaruh terhadap kejadian stunting yang mengarah pada buruknya kualitas dan kuantitas asupan gizi serta meningkatnya insiden penyakit. Untuk itu analisis bertujuan untuk mengkaji pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap kejadian stunting di Indonesia dengan menggunakan metode *fixed effect model* dengan data sekunder berupa data panel yang terdiri atas 34 provinsi di Indonesia dengan kurun waktu tahun 2015-2018. Data tersebut meliputi kejadian stunting, pendapatan keluarga, tingkat kemiskinan, dan data pendukung lainnya seperti bayi yang mendapat asi eksklusif, tingkat konsumsi protein, serta rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak

Berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil bahwa, pertama, pendapatan keluarga, kondisi tingkat kemiskinan, bayi yang mendapat asi eksklusif, tingkat konsumsi protein, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak secara simultan memiliki pengaruh terhadap stunting. Kedua, pendapatan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stunting, sehingga dapat disimpulkan semakin besar pendapatan dalam keluarga, maka semakin kecil kejadian stunting yang terjadi. Ketiga, status sosial (tingkat kemiskinan) berpengaruh negatif terhadap kejadian stunting, namun secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan.

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Marihot Nasution

Ringkasan

Studi ini menguji bagaimana belanja pemerintah daerah memengaruhi pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat. Pelayanan publik diukur dari pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi objek penilaian dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilakukan tiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan belanja pemerintah merupakan belanja pemerintah daerah per fungsi per kapita. Dengan menggunakan sampel 94 pemerintah daerah, studi ini mengambil periode tahun 2014 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja fungsi per kapita berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kewenangan pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum).

Variabel rasio kualitas belanja atau sering disebut rasio belanja modal juga diuji untuk melihat pengaruh belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam pengujian terhadap kinerja bidang kesehatan dan infrastruktur, rasio ini memberikan pengaruh negatif yang signifikan, namun untuk kinerja bidang pendidikan rasio ini tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dapat berarti bahwa belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah belum efektif memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat terutama di bidang pendidikan.

ANALISIS ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN DAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG IRIGASI

Robby Alexander Sirait

Ringkasan

Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah merupakan titik awal perubahan sistem kekuasaan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan tersebut berimplikasi pada lahirnya dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Salah satu dana perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Bidang Irigasi. Pengalokasian kedua DAK ini bertujuan untuk mendukung pencapaian pemantapan ketahanan pangan dan nilai tambah ekonomi komoditas pertanian, serta mendukung kedaulatan pangan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, alokasi kedua DAK tersebut mencapai Rp46,6 triliun dan rerata proporsinya terhadap total anggaran kedaulatan pangan sebesar 8,29 persen setiap tahunnya. Alokasi yang relatif cukup besar tersebut seharusnya mampu mendorong peningkatan kinerja produksi pertanian pangan nasional dan semakin besarnya proporsi hasil produksi pangan domestik dalam pemenuhan pangan nasional. Namun, faktanya berbeda. Kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa alokasi kedua DAK tersebut masih kurang efektif mendorong peningkatan produksi dan kedaulatan pangan. Kurang efektifnya dampak DAK tersebut dapat bersumber dari proses penetapan alokasi dan daerah penerima yang tidak tepat sasaran.

Penelitian ini hendak mengkaji apakah pengalokasian DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi tahun anggaran 2019 telah tepat sasaran, dengan menggunakan data sekunder, alat ukur standar deviasi dan skala penilaian (*rating scale*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alokasi kedua DAK tersebut masih belum tepat sasaran untuk mendorong pemantapan ketahanan pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan. Kesimpulan ini didasarkan pada masih adanya 38,28 persen daerah-daerah yang pengalokasiannya masih kurang tepat dengan tujuan akhir kebijakan.

DAMPAK PENGGUNAAN ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI

Dahiri

Ringkasan

Modernisasi pertanian merupakan transformasi pengolahan lahan pertanian dari tenaga manusia digantikan dengan alat mesin pertanian (alsintan). Penggunaan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pertanian. Untuk mempercepat penggunaan alsintan, maka pemerintah setiap tahunnya cenderung meningkatkan anggaran pengadaannya. Pengadaan alsintan terbesar yaitu traktor roda dua, *rice transplanter*, dan pompa air. Besarnya anggaran alsintan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi padi, sehingga tingkat kesejahteraan petani juga dapat meningkat. Namun hal tersebut belum terwujud juga, karena sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2018 rata-rata tingkat kesejahteraan petani yang tercermin dalam Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) masih di bawah 100. Hal tersebut merupakan sinyal negatif terhadap dampak penggunaan alsintan. Karena itu penelitian ini akan meneliti dampak penggunaan alsintan (traktor roda dua, *rice transplanter*, dan pompa air) terhadap kesejahteraan petani.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh hasil yaitu pertama, dampak alsintan jenis traktor roda dua berdampak positif dan signifikan terhadap produksi dan kesejahteraan petani. Penggunaan traktor berdampak langsung terhadap produksi padi. Sedangkan dampak traktor terhadap tingkat kesejahteraan berdampak secara tidak langsung. Kedua, dampak alsintan jenis *rice transplanter* berdampak negatif dan signifikan terhadap produksi dan kesejahteraan petani. Penggunaan *rice transplanter* berdampak langsung terhadap produksi padi. Sedangkan dampak *rice transplanter* terhadap tingkat kesejahteraan berdampak secara tidak langsung. Ketiga, dampak alsintan jenis pompa air berdampak positif dan signifikan terhadap produksi dan kesejahteraan petani. Penggunaan pompa air berdampak langsung terhadap produksi padi. Sedangkan dampak pompa air terhadap tingkat kesejahteraan berdampak secara tidak langsung. Adapun rekomendasi yang diberikan yaitu pertama, formula perhitungan pengadaan dan pendistribusian alsintan dengan memperhitungkan luas lahan dan tingkat kesejahteraan petani. Kedua, penerima bantuan alsintan untuk instansi pemerintah di daerah Provinsi/Kabupaten atau brigade alsintan dihapuskan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ANALISIS HUBUNGAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN UJIAN NASIONAL

ANALYSIS OF TEACHER PROFESSIONAL ALLOWANCE RELATIONSHIPS AND NATIONAL EXAMS

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI
email: adhi.wibowo@dpr.go.id

Abstract

The teacher professional allowance (TPG) is expected to improve the quality of national education which refers to the National Education Standards (SNP) especially the graduation competency standards. The TPG budget tends to increase every year, but graduation competency standards tend to decrease. Therefore, this study aims to determine the relationship of teacher professional allowance and national examinations. The data used are secondary data consisting of TPG budget and UN results. Teacher professional allowance budget from 2012-2018. Whereas the UN score used is the average national aggregate UN score from 2012-2018. While the model used is the person and spearman correlation test. The results showed that the relationship between TPG and UN had a positive direction, but it was not significant.

Keywords: *The teacher professional allowance, competency standards.*

1. Pendahuluan

Salah satu komponen pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar siswa mempunyai kecerdasan dan berkarakter adalah guru. Hal ini dikarenakan guru sebagai ujung tombak tercapainya tujuan pembelajaran terutama bagi peserta didik. Agar dapat mengajar secara lebih efektif, guru harus senantiasa meningkatkan kemampuan profesional serta mutu mengajarnya, dan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, guru harus mampu mendesain proses pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, guru memerlukan perencanaan pembelajaran yang sistematis dan aplikatif. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, bahwa pendidik merupakan agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan social.

Pemenuhan persyaratan penguasaan keempat kompetensi tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sebagai bukti bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi, guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh setelah lulus uji kompetensi. Uji kompetensi guru dalam jabatan dilakukan melalui dua cara yaitu: 1) penilaian portofolio dan 2) melalui jalur pendidikan. Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas guru melalui program sertifikasi guru yang telah dimulai sejak tahun 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga profesional.

Profesionalitas guru merupakan tuntutan dalam peningkatan mutu pendidikan sehingga dapat memacu dan mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik sehingga akan menghasilkan *output* pendidikan yang baik pula. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.¹

TPG diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama; memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh Departemen; memenuhi beban kerja sebagai guru; mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap; berusia paling tinggi 60 tahun; tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas; tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikutnya setelah guru yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi guru dari departemen; tunjangan profesi bagi guru diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Bagi guru Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional, Tunjangan Profesi Guru (TPG)

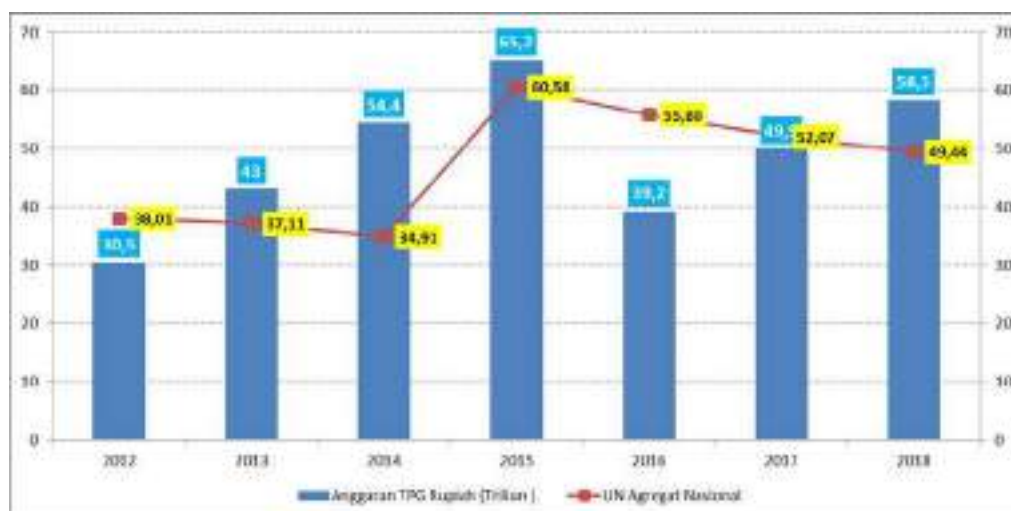
¹ UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 16 ayat (1)

diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Sedangkan bagi guru tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 tahun 2008, diberikan tunjangan profesi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru. Pada Kementerian Agama, Guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerima tunjangan profesi terdiri dari guru madrasah dan guru pendidikan agama pada sekolah. Sumber dana untuk pembayaran TPG bukan PNS dibebankan kepada DIPA Provinsi dan Kabupaten/Kota. TPG sendiri bersifat tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru atau guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau pengawas satuan pendidikan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

TPG ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya standar kompetensi kelulusan. Untuk mengukur capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional, maka pemerintah menggunakan Ujian Nasional (UN) yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah. Perkembangan tunjangan profesi guru (TPG) dan UN diberikan dalam gambar 1.

Gambar 1. Perkembangan UN dan TPG



Sumber: Kemendikbud

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa anggaran TPG cenderung meningkat setiap tahunnya, tapi UN cenderung menurun. Hal tersebut memberikan sinyal negatif terhadap implementasi TPG yang selama ini dilaksanakan.

Berdasarkan permasalahan di atas, berikut ini pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam studi ini menganalisa hubungan tunjangan profesi guru dan ujian nasional. Berikut ini yang merupakan tujuan dari penelitian adalah mengetahui hubungan tunjangan profesi guru dan ujian nasional.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pendidikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan kita bernegara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) juga menyebutkan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dari hal ini terlihat bahwa Pemerintah diamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003, Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Komponen pendidikan ini terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, dan pendidik yang di dalamnya termasuk guru dan dosen.

2.2. Kewajiban dan Hak Guru

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional ini dibuktikan dengan sertifikat pendidik, yang diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban untuk:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Atas kewajiban tersebut, guru memperoleh hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan;
- b. kesejahteraan sosial;
- c. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
- d. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan
- e. Intelektual;
- f. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- g. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; dan lainnya.

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud di atas meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan

masalah tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

2.3. Tunjangan Profesi Guru

PP Nomor 41 Tahun 2009 mendefinisikan Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Sesuai Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008, Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh departemen;
- b. Memenuhi beban kerja sebagai guru;
- c. Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya;
- d. Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap;
- e. Berusia paling tinggi 60 tahun;
- f. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikutnya setelah guru yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi guru dari departemen. TPG diberikan kepada guru PNS dan guru Bukan PNS (GBPNs). Bagi guru PNS yang menduduki jabatan fungsional, TPG diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan. Sedangkan bagi guru tetap bukan PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru, sesuai Permendiknas Nomor 72 tahun 2008, diberikan tunjangan profesi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru. Pada Kementerian Agama, guru bukan PNS yang berhak menerima tunjangan profesi terdiri dari guru madrasah dan guru pendidikan agama pada sekolah. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi guru bukan PNS dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014, Pembayaran tunjangan profesi bagi GBPNs pada Kementerian Agama ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing satuan

kerja terkait. Permohonan pembayaran diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan:

- a. Fotokopi penetapan *inpassing* atau penetapan kepangkatan dan jabatan fungsional Guru Bukan PNS, bagi yang sudah memiliki;
- b. Fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi LPTK/PT yang menerbitkannya, bagi GBPNs yang menerima pembayaran pada tahun pertama; dan
- c. Surat keterangan beban kerja (SKBK) asli.

2.4. Pembelajaran dan Hasil Belajar

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku yaitu guru dan siswa. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Pembelajaran secara umum menurut Hamdani (2011:71) adalah kegiatan yang dilakukan guru sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik. Menurut Rusman (2012:93) menyatakan bahwa pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung misalnya tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu menggunakan berbagai media pembelajaran. Selanjutnya menurut pendapat para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Hamalik (2003:30) mengatakan bahwa “Pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusia, material, fasilitas, dan prosedur yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.
2. Sudjana (2004:28) mengemukakan tentang pengertian pembelajaran bahwa: “pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik yang melakukan kegiatan membelajarkan”.

Pada pembahasan di atas pengertian belajar sudah dikatakan bahwa belajar sebagai suatu usaha yang disengaja untuk menghasilkan perubahan dengan berinteraksi dan mempunyai suatu tujuan. Hasil dari perubahan dengan berinteraksi dan mempunyai suatu tujuan bisa dinamakan sebagai hasil belajar. Hasil Belajar menurut Rusman (2012:123) adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar tidak hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tetapi juga penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat-bakat, penyesuaian sosial, macam-macam keterampilan, cita-cita, keinginan dan harapan. Rusman

(2012:123) juga menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari anggaran TPG dan hasil UN. Anggaran tunjangan profesi guru dari tahun 2012-2018. Sedangkan nilai UN yang digunakan merupakan rata-rata nilai UN agregat nasional dari tahun 2012-2018.

3.2. Model Penelitian

Model penelitian menggunakan uji korelasi person dengan bentuk persamaan yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien korelasi antara X dengan Y.

n : Jumlah Sampel.

$\sum XY$: Jumlah Total data XY

$\sum X$: Jumlah total data variabel X

$\sum Y$: Jumlah total data variabel Y

3.3. Penelitian Terdahulu

Awaluddin Tjalla (2010) penelitian dengan judul UN dan Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis UN dan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Hasil penelitian diperoleh bahwa peningkatan persentase kelulusan, disparitas kelulusan yang menurun antar jenis sekolah, dan rerata nilai mata pelajaran dalam UN yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah secara nasional. UN pada satuan pendidikan SMP/MTs, dan SMA/MA yang sudah dilaksanakan beberapa kali, secara yuridis dan konseptual perlu dilaksanakan. Berbagai kendala yang merupakan hambatan di lapangan perlu diupayakan untuk diperbaiki pelaksanaannya. Pentingnya kegiatan ini

dilaksanakan karena terbukti memberikan kontribusi positif dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, dan juga akhirnya pada peningkatan mutu pendidikan. UN sebagai suatu hal yang perlu dilakukan karena dapat digunakan sebagai: (1) alat ukur kualitas pendidikan antar daerah, (2) alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, (3) motivator bagi sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Akhmad Yantono (2016) penelitian dengan judul “Evaluasi Program TPG di SMP Negeri Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan pemberian TPG di SMP Negeri 1 Pageruyung Kendal. Penelitian ini menggunakan tujuan model evaluasi yang dikembangkan oleh Ralph Winfred Tyler. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan triangulasi ke memastikan validitas data. Sumber data berasal dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasilnya menunjukkan TPG di SMP Negeri 1 Pageruyung: 1) telah mampu meningkatkan martabat guru, meskipun unsur-unsur penelitian ilmiah belum dilakukan oleh semua guru, dan hanya dilakukan oleh satu guru. 2) telah mampu meningkat kompetensi guru, meskipun unsur manajemen waktu dalam kelas belum efektif; unsur keterampilan bertanya guru tidak maksimum; dan unsur-unsur evaluasi, alat penilaian belum dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 3) belum dapat memajukan guru profesional karena pemikiran guru belum dikomunikasikan di lingkungan sekolah dan forum ilmiah. 4) telah dapat ditingkatkan kualitas pembelajaran, meskipun dalam penilaian, guru belum memberikan komentar tertulis pada hasil tes, dan belum memberikan tugas untuk menulis atau baca materi terkait yang telah dipelajari. 5) telah dapat meningkatkan layanan pendidikan berkualitas untuk pelajar.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan terdahulu disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. *Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu*

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
UN dan Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah	Menganalisis mutu pembelajaran	Variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian. Dalam penelitian ini menganalisis hubungan tunjangan profesi guru terhadap mutu pembelajaran.
Evaluasi Program Tunjangan Profesi Guru Di SMP Negeri Kabupaten	Menganalisis tunjangan profesi guru	Variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian. Penelitian

Kendal.		sekarang menganalisis tunjangan profesi guru secara agregat nasional.
---------	--	---

Sumber: berbagai sumber, diolah

Pada penelitian-penelitian terdahulu lebih bersifat parsial. Sedangkan penelitian ini menggunakan data nasional sehingga kebijakan anggaran yang telah didistribusikan dapat dianalisis lebih komprehensif dan dapat diambil kesimpulan secara nasional.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Analisis Data

Tabel 2. Uji Normalitas

Kode	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TPG_UN 1.00	.114	7	.200 [*]	.988	7	.989
2.00	.237	7	.200 [*]	.904	7	.358

Sumber: diolah, 2019

Keterangan: 1 adalah Anggaran TPG, dan 2 adalah UN

Dari Tabel 2 Uji Normalitas, diperoleh bahwa nilai signifikan anggaran TPG sebesar $0,989 > 0,05$ dan nilai signifikan UN sebesar $0,358 > 0,05$, maka data-data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan Hasil uji person diperoleh diberikan dalam Tabel 2.

Tabel 3. Uji Korelasi Person

		dana_TPG	Hasil_UN
dana_TPG	Pearson Correlation	1	.442
	Sig. (2-tailed)		.320
	N	7	7
Hasil_UN	Pearson Correlation	.442	1
	Sig. (2-tailed)	.320	
	N	7	7

Sumber: diolah, 2019

Nilai Signifikansi (2-tailed) sebesar $0,320 > 0,05$. artinya korelasi hubungan TPG dan UN memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji kedua uji di atas diperoleh bahwa hubungan TPG dan UN memiliki arah yang positif. Artinya semakin besar anggaran TPG, maka UN

juga semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Semakin besar TPG tersebut memberikan arti bahwa guru yang telah bersertifikasi semakin banyak. Dengan banyaknya guru tersebut, maka pengajaran guru dalam menyampaikan materi ke siswa harusnya dapat lebih berkualitas. Hasil pengukuran kualitas tersebut diukur dengan UN. Namun, hubungan positif antara TPG dan UN tersebut tidak signifikan. Artinya banyaknya guru yang bersertifikasi belum dapat meningkatkan hasil UN. Tidak signifikannya hubungan tersebut maka perlu ditinjau kembali pelaksanaan TPG yang selama ini dilakukan. Ada beberapa persoalan dalam implementasi TPG yaitu sebagai berikut:

4.2.1 Pencairan Dana Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan Profesi merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru dengan sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Pencairan tunjangan dilakukan dalam empat tahap atau bisa disebut per triwulan. Dasar pembayaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Proses pencairan tunjangan profesi guru dilakukan melalui berbagai tahap pengusulan dan validasi. Proses awalnya adalah pengisian data guru oleh operator sekolah melalui aplikasi Data Pokok Kependidikan (Dapodik) sebagai wadah besar semua data pendidik. Dapodik dimanfaatkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) sebagai pengelola Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN) untuk menjaring data yang akan digunakan dalam penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP). Proses yang panjang, *input* pengusulan, penarikan data berkala, validasi oleh dinas pendidikan, adalah faktor penentu kecepatan penerbitan SKTP yang berpengaruh pada kecepatan pembayaran tunjangan. Bagi guru PNSD, alokasi dana yang akan dipergunakan untuk membayar tunjangan profesi guru, sudah tersedia di kas daerah sejak awal tahun anggaran sesuai dengan usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat. Dana tersebut langsung dikirim Kementerian Keuangan ke kas daerah masing-masing di mana guru tersebut bertugas. Bagi guru bukan PNS, dana untuk pembayaran tunjangan profesi mereka dialokasikan atau masuk ke dalam anggaran Kementerian Pendidikan. Bagi guru BPNS, penyaluran tunjangan profesi akan langsung dikirim ke rekening mereka, apabila sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan. TPG diberikan kepada guru yang menjalankan kewajiban dan fungsinya, jika dalam

menjalankan tugas tersebut belum memenuhi seperti kewajibannya mengajar 24 jam tatap muka maka TPG tidak dapat dibayarkan.

Proses validasi dan waktu pengumpulan berkas yang dilakukan oleh instansi pengelola keuangan di daerah cukup memakan waktu yang lama karena harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang membuat TPG dapat tersendat dalam penyalurannya. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan ke Kementerian Keuangan juga menjadi faktor penyebab tersendatnya pencairan tunjangan. Salah satu syarat Kementerian Keuangan supaya dana transfer daerah per triwulan lancar adalah pelaporan penggunaan dana transfer daerah tahun sebelumnya. Jika kabupaten atau kota belum melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, maka dana transfer ke kas daerah masing-masing kabupaten atau kota tertahan sampai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana transfer tahun sebelumnya dilaporkan. Kementerian Pendidikan juga membutuhkan data-data realisasi penyaluran tunjangan oleh pemerintah daerah sebagai dasar acuan untuk perencanaan kebutuhan di tahun berikutnya. Terlambat mengirimkan laporan juga berakibat pada salahnya penganggaran kebutuhan untuk daerah oleh Kementerian Pendidikan.

Pencairan TPG pada awal semester sering mengalami keterlambatan seperti yang ditemukan di kota Baubau, Trenggalek dan Malang (kendaripos,2017; Jawapos,2018; Republika.co, 2018). Hal senada juga ditemukan dari Penelitian Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI pada 2019 di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Serang. Rata-rata ketepatan waktu pencairan TPG di daerah sampel yang diteliti adalah skala 4 dari 7. Salah satu kendalanya dikarenakan pada saat *synchronized* dapodik yang memakan waktu cukup lama. Selain itu operator Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat menyampaikan jika ada 1 sekolah yang lama dalam menginput data maka hanya 1 sekolah tersebut saja yang terlambat dalam pencairan dana TPG tidak berimbas terhadap sekolah lain.

Persoalan pencairan ditemukan juga oleh peneliti di Unit Pelayanan Terpadu Kemendikbud, ada beberapa guru dari daerah yang datang untuk mengadukan perihal permasalahan TPG yang sudah lama tidak dapat diselesaikan Dinas Pendidikan daerah sehingga mengharuskan guru untuk hadir langsung ke Jakarta dan ini tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

4.2.1 Nilai Minimal dan Linieritas Ujian Kompetensi Guru

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi guru yang efektif dan peningkatan kinerja guru diperlukan pemetaan kompetensi guru yang diperoleh melalui uji kompetensi. Uji Kompetensi Guru yang selanjutnya disebut UKG adalah pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru. Guru mengikuti UKG sebagai syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional guru. Seorang guru yang lulus dalam mengikuti UKG akan menerima sertifikasi. UKG dilaksanakan pada 2 cara yaitu dengan sistem *online* dan sistem manual.

Sistem *online* yang dilaksanakan dalam pelaksanaan UKG membuat para guru yang berusia cukup tua merasa kesulitan karena tidak terbiasa dengan sistem komputerisasi. Selain itu soal yang dianggap sulit masih menjadi kendala tidak lulusnya ujian UKG ini. Permasalahan ini juga didukung dengan temuan di Kabupaten Klungkung pada Maret 2019 di SMP 3 Nusa Penida dalam Penelitian Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI bahwa terdapat guru yang tidak lulus UKG karena dirasa sulit dan kurang memahami sistem *online*. Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung juga menyatakan bahwa untuk kelulusan UKG para guru harus memenuhi skor 80.

Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, pemerintah berharap ke depan kiprah guru dalam mengajar semakin profesional dengan adanya latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran dan nantinya di tahun 2020 guru yang tidak linier tidak bisa mengajar. Namun, pada praktiknya hal ini dirasa sulit karena beberapa guru bertugas mengajar tidak sesuai dengan ijazahnya. Hal ini menyulitkan ketika guru mengikuti UKG karena guru yang bersangkutan menguasai materi yang diujikan dan hal ini menyebabkan mereka tidak lulus dalam UKG.

Seperti yang dialami guru SMP 1 Semarapura Kabupaten Klungkung dimana ada guru yang berlatarbelakang pendidikan matematika namun pada kesehariannya yang bersangkutan mengajar mata pelajaran seni rupa (Pusat Kajian Anggaran, 2019). Hal ini disebabkan karena SMP 1 Semarapura kekurangan guru untuk mapel seni rupa. Dengan kondisi tersebut target semua guru harus linier antara ijazah dengan tugas mengajar akan sulit tercapai.

4.2.2 Masih Rendahnya Pemanfaatan TPG Untuk Meningkatkan Kompetensi.

Berdasarkan UU tentang guru dan dosen tahun 2005 Pasal 82, disebutkan guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 tahun sejak berlakunya UU tentang Guru dan Dosen. Pemerintah melalui Ditjen GTK telah meluncurkan program pemberian bantuan peningkatan kualifikasi. Namun, hingga tahun 2018 berdasarkan paparan “Anggaran Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Distribusi Guru” yang disampaikan oleh Unifah Rosyidi dalam diskusi Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, baik guru PNS dan bukan PNS masih ada guru bersertifikasi yang belum berkualifikasi S1 disemua jenjang pendidikan.

Demi terwujudnya amanat UU Nomor 14 tahun 2005 diperlukan dukungan dari semua pihak, salah satunya dari guru itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian ke beberapa daerah masih terdapat beberapa guru yang memanfaatkan TPG untuk kegiatan yang bersifat konsumtif (Pusat Kajian Anggaran, 2019). Hal ini menurut beberapa guru dikarenakan pembayaran dengan sistem rapel. Terlebih data dari Ditjen GTK menyebutkan dari 2,9 juta tenaga pendidik di tahun 2017, masih terdapat 17,4% tenaga pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4 atau sebanyak 504 ribu guru.

Tabel 4. Rincian Jumlah Guru Nasional Berdasarkan Status Sekolah, Jenjang Sekolah, Status S1, Status Sertifikasi, dan Status PNS (Tidak Termasuk Guru Agama)

Jenjang dan Status Sekolah	Bukan PNS							PNS							Jumlah BUKAN PNS &
	Belum Sertifikasi			Sudah Sertifikasi			Jumlah	Belum Sertifikasi			Sudah Sertifikasi			Jumlah	
	Belum S1	Sudah S1	Jumlah	Belum S1	Sudah S1	Jumlah		Belum S1	Sudah S1	Jumlah	Belum S1	Sudah S1	Jumlah		
NEGERI															
SD	125.334	330.564	455.898	184	9.176	9.360	465.258	71.367	103.679	175.046	65.966	582.706	648.672	823.718	1.288.976
SDLB	93	308	401		12	12	413	55	114	169	89	603	692	861	1.274
SLB	674	2.472	3.146	1	88	89	3.235	217	1.016	1.233	178	3.429	3.607	4.840	8.075
SMA	2.432	61.540	63.972	11	1.791	1.802	65.774	640	27.510	28.150	1.347	116.652	117.999	146.149	211.923
SMK	3.586	45.870	49.456	10	1.382	1.392	50.848	600	21.420	22.020	663	61.625	62.288	84.308	135.156
SMLB	8	59	67				67	3	13	16		18	18	34	101
SMP	13.192	125.296	138.488	44	3.355	3.399	141.887	6.167	48.220	54.387	13.523	242.388	255.911	310.298	452.185
SMPLB	10	68	78		5	5	83	2	17	19	2	47	49	68	151
TK	4.138	3.710	7.848	12	400	412	8.260	1.328	1.444	2.772	344	5.548	5.892	8.664	16.924
Jumlah Negeri	149.467	569.887	719.354	262	16.209	16.471	735.825	80.379	203.433	283.812	82.112	1.013.016	1.095.128	1.378.940	2.114.765
SWASTA															
SD	29.509	85.041	114.550	963	37.045	38.008	152.558	6.045	3.981	10.026	2.819	11.219	14.038	24.064	176.622
SDLB	205	344	549	5	160	165	714	10	18	28	5	261	266	294	1.008
SLB	2.450	5.156	7.606	27	1.822	1.849	9.455	88	161	249	128	4.072	4.200	4.449	13.904
SMA	5.696	49.327	55.023	183	23.530	23.713	78.736	130	1.801	1.931	195	7.608	7.803	9.734	88.470
SMK	16.658	96.078	112.736	279	33.731	34.010	146.746	301	2.214	2.515	127	6.568	6.695	9.210	155.956
SMLB	69	143	212		48	48	260		5	5		55	55	60	320
SMP	22.656	89.512	112.168	782	39.903	40.685	152.853	670	2.235	2.905	1.083	9.368	10.451	13.356	166.209
SMPLB	73	256	329		60	60	389	5	10	15		109	109	124	513
TK	112.641	81.085	193.726	2.261	60.508	62.769	256.495	4.497	2.905	7.402	3.379	32.253	35.632	43.034	299.529
Jumlah Swasta	189.957	406.942	596.899	4.500	196.807	201.307	798.206	11.746	13.330	25.076	7.736	71.513	79.249	104.325	902.531
NEGERI & SWASTA															
SD	154.843	415.605	570.448	1.147	46.221	47.368	617.816	77.412	107.660	185.072	68.785	593.925	662.710	847.782	1.465.598
SDLB	298	652	950	5	172	177	1.127	65	132	197	94	864	958	1.155	2.282
SLB	3.124	7.628	10.752	28	1.910	1.938	12.690	305	1.177	1.482	306	7.501	7.807	9.289	21.979
SMA	8.128	110.867	118.995	194	25.321	25.515	144.510	770	29.311	30.081	1.542	124.260	125.802	155.883	300.393
SMK	20.244	141.948	162.192	289	35.113	35.402	197.594	901	23.634	24.535	790	68.193	68.983	93.518	291.112
SMLB	77	202	279	0	48	48	327	3	18	21	0	73	73	94	421
SMP	35.848	214.808	250.656	826	43.258	44.084	294.740	6.837	50.455	57.292	14.606	251.756	266.362	323.654	618.394
SMPLB	83	324	407	0	65	65	472	7	27	34	2	156	158	192	664
TK	116.779	84.795	201.574	2.273	60.908	63.181	264.755	5.825	4.349	10.174	3.723	37.801	41.524	51.698	316.453
Jumlah Negeri & Swasta	339.424	976.829	1.316.253	4.762	213.016	217.778	1.534.031	92.125	216.763	308.888	89.848	1.084.529	1.174.377	1.483.265	3.017.296

Sumber: Persatuan Guru Republik Indonesia

5. Penutup

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai hubungan tunjangan profesi guru dan ujian nasional dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan TPG dan UN memiliki arah yang positif. Artinya semakin besar anggaran TPG, maka UN juga semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Namun, hubungan positif antara TPG dan UN tersebut tidak signifikan. Artinya banyaknya guru yang bersertifikasi belum dapat meningkatkan hasil UN.
2. Pencairan tunjangan profesi guru masih sering mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut disebabkan proses validasi dan waktu pengumpulan berkas yang dilakukan oleh instansi pengelola keuangan di daerah cukup memakan waktu yang lama karena harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang membuat TPG dapat tersendat dalam penyalurannya.

3. Masih ditemukannya guru yang mengajar belum linearitas dengan kompetensinya. Hal ini menyulitkan ketika guru mengikuti UKG karena guru yang bersangkutan menguasai materi yang diujikan dan hal ini menyebabkan mereka tidak lulus dalam UKG.
4. Tunjangan profesi guru selain untuk peningkatan kesejahteraan guru, tunjangan tersebut juga untuk meningkatkan kompetensi guru. Namun, pada praktiknya tunjangan profesi guru hanya untuk konsumtif.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya kesadaran dari sekolah-sekolah maupun Dinas Pendidikan agar proses *input* data dapat dilakukan dengan benar dan tepat waktu selain itu penguatan kompetensi dari operator Dapodik juga penting supaya proses pencairan TPG dapat berjalan tepat waktu.
2. Pemerintah perlu duduk bersama seluruh *stakeholder* untuk menentukan nilai minimal UKG, dan membahas mengenai kesulitan yang dialami oleh para guru apakah dari tingkat kesulitan soal-soal UKG maupun kendala guru-guru senior yang kesulitan dalam mengikuti ujian *online*. Sedangkan untuk linearitas pemerintah melalui pemerintah daerah bisa melakukan rotasi terhadap guru-guru yang selama ini mengajar tidak sesuai ijazah ke daerah dengan sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru sehingga target di tahun 2020 guru mengajar linier dengan ijazahnya dapat tercapai.
3. Perlunya dukungan dari guru itu sendiri untuk menjadi pendidik yang profesional sesuai amanat UU Guru dan Dosen. Untuk itu penulis mengajak para guru-guru serta pembaca yang mempunyai relasi tenaga pendidik yang sudah mendapatkan TPG, agar meningkatkan kompetensinya melalui jenjang pendidikan formal di Perguruan Tinggi terutama bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4. Selain itu pemerintah nampaknya perlu memperbaiki regulasi sehingga kedepan sebagian TPG yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai bentuk tanggung jawab atas TPG yang mereka peroleh selama ini.

Daftar Pustaka

- Ditjen Anggaran. (2015). *Kajian Tunjangan Profesi Guru*. Jakarta. Kementerian Keuangan.
- Pusat Kajian Anggaran. (2019). *Tinjauan Kritis Atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan Melalui APBN*. Jakarta.
- Hamdani. (2011). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung. Pustaka Setia.
- Rusman. (2012). *Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer*. Bandung. Alfabeta.
- Tjalla, Awaluddin. (2010). *UN dan Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah*. Diambil dari <http://repository.ut.ac.id/2613/1/fkip201048.pdf>.
- Yantono, Akhmad. (2016). *Evaluasi Program Tunjangan Profesi Guru Di SMP Negeri Kabupaten Kendal*. Jurnal Manajemen Pendidikan FKIP. Universitas Kristen Satya Wacana: Volume: 3, No. 2, Juli-Desember 2016
- Persatuan Guru Republik Indonesia. (2019). *Anggaran untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Distribusi Guru*. Makalah dipresentasikan pada Diskusi Pusat Kajian Anggaran Sekriat Jenderal dan Badan Kehalian DPR RI.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INFLASI INTI DI INDONESIA

THE DETERMINANTS OF CORE INFLATION IN INDONESIA

Ratna Christianingrum*, Riza Aditya Syafri**

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: *ratna.christianingrum@dpr.go.id, **riza.syafri@dpr.go.id

Abstract

Inflation is an important macroeconomic indicator. High inflation can reduce real income, which mean there is a decrease of purchasing power. The level and volatility of Indonesia's inflation have been higher compared with the trend in emerging market and developing country. This reseach is conducted to analyze the influence of fuel price, interest rate, GDP, gold price, IPI, exchange rate and money supply to core inflation rate in Indonesia. Data analysis was done by using Vector Error Correction Models (VECM). The result show that in short-run GDP, IPI, exchange rate, and money supply have significant effect to core inflation rate. In long-run, fuel price, GDP, and exchange rate have significant effect to core inflation rate in Indonesia.

Keywords: *Core inflation, VECM, determinant factor*

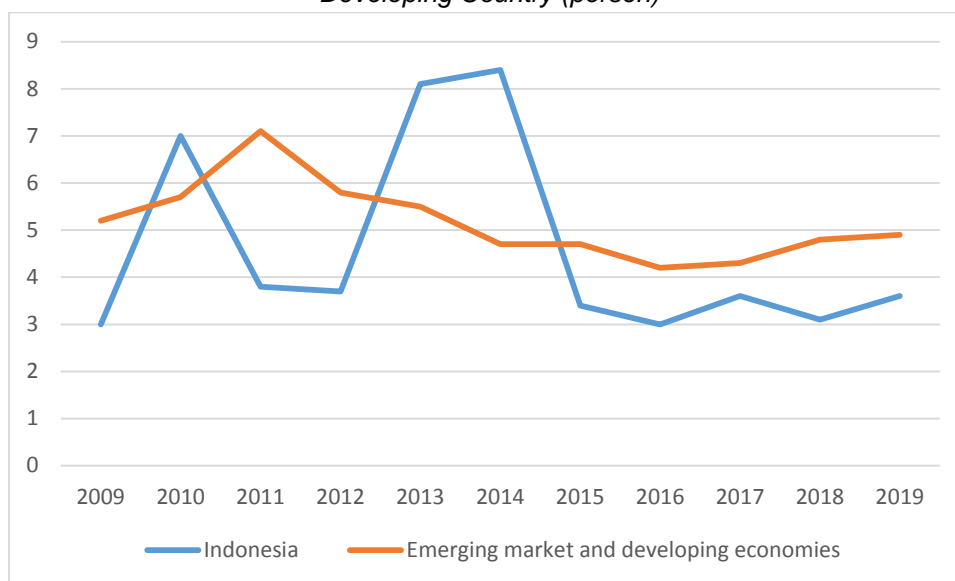
1. Pendahuluan

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang penting. Tingkat inflasi dapat menggambarkan kondisi perekonomian nasional. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi perekonomian yang terlalu panas (*overheated*). Hal ini dapat diartikan bahwa ekonomi mengalami permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produksinya, sehingga harga-harga cenderung mengalami peningkatan. Inflasi yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan penurunan daya beli uang. Inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya. Dalam jangka panjang, penurunan pendapatan riil dalam masyarakat dapat memberikan dampak negatif dalam perekonomian (Santoso, 2017). Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan terjadinya lonjakan tingkat inflasi yang cukup besar. Hal ini berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Volatilitas tingkat inflasi Indonesia menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan dengan *emerging market and developing economies* (gambar 1).

Pada tahun 2009-2019 volatilitas tingkat inflasi Indonesia lebih besar dibandingkan volatilitas inflasi dari negara berkembang lainnya. Tingkat inflasi tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2014 mencapai 8,4 persen. tingkat inflasi terendah di Indonesia mencapai 3 persen pada tahun 2009 dan 2016. Sedangkan di negara berkembang lainnya, pada periode yang sama, tingkat inflasi tertinggi hanya sebesar 7,1 persen (yoy), terjadi pada tahun 2011. Sedangkan tingkat inflasi terendah dari negara berkembang lainnya terjadi pada tahun 2016 sebesar 4,2 persen (yoy).

Gambar 1. Perkembangan Inflasi Indonesia dan Emerging Market and Developing Country (persen)



Sumber: IMF, diolah

Karakteristik inflasi di Indonesia juga berbeda dengan negara berkembang lainnya. Hal ini dapat terlihat dari pola fluktuasi tingkat inflasi yang berbeda. Pada tahun 2011, tingkat inflasi dari negara berkembang cenderung mengalami peningkatan, namun pada periode yang sama tingkat inflasi di Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2012 hingga 2014, tingkat inflasi dari negara berkembang mengalami tren penurunan. Namun dari tahun 2012 hingga 2014, tingkat inflasi Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik dari inflasi Indonesia dengan inflasi dari negara-negara berkembang lainnya.

Di Indonesia, inflasi dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok, yaitu inflasi inti dan inflasi non inti. Inflasi inti merupakan komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten. Pergerakan inflasi inti dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal, serta

ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen (Bank Indonesia, 2019). Inflasi inti digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan moneter (Mankiw, 1994, hal. 198). Hal ini dikarenakan pengukuran inflasi secara agregat sebagai fenomena moneter sulit untuk dilakukan. Selain itu, peristiwa non moneter yang terjadi hanya menghasilkan *noise* pada indeks harga secara sementara (Mankiw, 1994, hal. 198). Sehingga untuk menghasilkan suatu kebijakan moneter, nilai inflasi yang diperlukan adalah nilai inflasi inti.

Dalam proses pengambilan kebijakan moneter yang tepat, diperlukan suatu nilai prediksi inflasi inti yang akurat. Inflasi inti itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Anugrah, Ismaya, & Pratama, 2018) menunjukkan hasil bahwa dalam jangka panjang, proporsi dari konsumsi publik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap inflasi inti. Proksi yang digunakan untuk melihat proporsi dari konsumsi publik adalah jumlah uang beredar (M2) dibagi oleh PDB. Sedangkan dalam jangka pendek, inflasi inti secara signifikan dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi ke depan, IPI, harga bahan bakar, harga emas, nilai tukar, dan periode pendaftaran sekolah (Anugrah, Ismaya, & Pratama, *The Determinants of Inflation: The Case of Indonesia*, 2018).

Lim dan Sek (2015) telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap inflasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan PDB serta impor barang dan jasa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai inflasi. Sedangkan dalam jangka pendek, jumlah uang yang beredar (M1), belanja nasional, dan pertumbuhan PDB memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai inflasi (Lim & Sek, 2015).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lee (1992) diperoleh hasil bahwa tingkat suku bunga menjelaskan sebagian besar variasi dalam inflasi. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat suku bunga dapat memberikan pengaruh terhadap nilai inflasi. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pengaruh dari tingkat suku bunga terhadap tingkat inflasi inti di Indonesia.

Untuk memperoleh prediksi nilai inflasi inti yang tepat, guna mengevaluasi kebijakan moneter yang ada, maka perlu diketahui faktor yang memengaruhi inflasi inti di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh harga bahan bakar, tingkat suku bunga, PDB, harga emas, IPI, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta jumlah uang yang beredar terhadap nilai inflasi inti di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Definisi Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus (Sukirno, 2011:165). Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Bank Indonesia, 2018).

2.2. Teori Inflasi

Setelah mengetahui definisi inflasi, perlu juga dijabarkan mengenai teori yang menjadi dasar pemikiran perkembangan inflasi selama ini. Terdapat beberapa teori, diantaranya:

2.2.1. Teori Kuantitas Uang

Teori yang dirumuskan oleh Simon Newcomb pada tahun 1885 dan dipopulerkan oleh Irving Fisher pada tahun 1911 ini menjelaskan mengenai peranan uang terhadap perekonomian secara umum. Teori ini berpandangan bahwa terdapat hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kenaikan harga-harga secara umum. Secara umum, teori kuantitas uang ini dapat digambarkan sebagai berikut (Friedman, M., 1987):

$$MV = PT$$

Dimana:

M = Jumlah Uang Beredar;

V = Tingkat Perputaran Uang;

P = Harga Barang;

T = Volume Barang yang Ditransaksikan

Dari persamaan diatas dapat terlihat bahwa ketika jumlah uang beredar (M) naik, sementara tingkat perputaran uang (V), dan volume barang yang ditransaksikan (T) dianggap tetap, maka kenaikan jumlah uang beredar tersebut akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat harga barang (P). Sehingga dalam teori ini berpandangan bahwa perubahan jumlah uang beredar akan

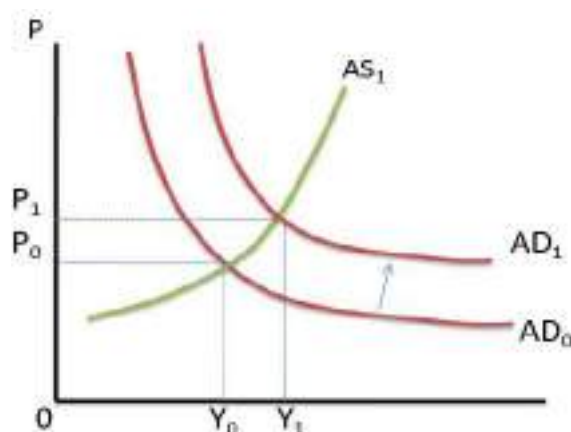
mengakibatkan perubahan harga secara proporsional. Artinya, jika jumlah uang beredar naik dua kali lipat maka akan mengakibatkan tingkat harga naik dua kali.

2.2.2 Teori Keynesian (*Demand Pull Theory*)

Teori ini menggambarkan hubungan antara permintaan dan penawaran. Dalam jangka pendek, ketika permintaan melebihi jumlah kapasitas produksi maka akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga. Dalam jangka panjang, kapasitas produksi akan menyesuaikan jumlah permintaan agregat, sehingga akan membentuk suatu keseimbangan pada tingkat harga yang baru. Laju inflasi akan berhenti hanya apabila masyarakat tidak bisa lagi memperoleh dana (tidak lagi memiliki daya beli) untuk membiayai pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi *supply* barang (*inflationary gap* menghilang) (Atmadja, 1999).

Pada gambar 2 menjelaskan bagaimana permintaan akan mempengaruhi tingkat harga. Dalam keadaan tidak ada pengangguran (*full-employment*) di asumsikan tingkat pendapatan sebesar Y_0 , sementara *agregat supply* menjadi inelastis dalam keadaan tidak ada pengangguran. Ketika permintaan bertambah dari D_0 ke D_1 , maka peningkatan jumlah permintaan tersebut akan mendorong tingkat harga naik dari P_0 ke P_1 .

Gambar 2. Ilustrasi Demand-Pull Inflation



Sumber: Case & Fair, 2012, diolah

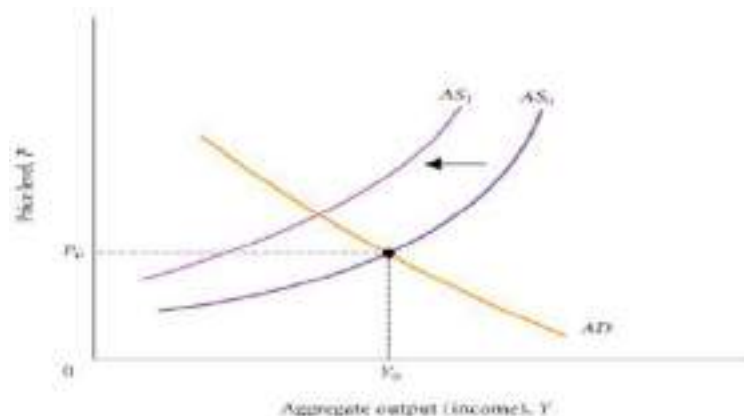
2.2.2. Cost Push Inflation Theory

Teori ini berpandangan bahwa tingkat harga tidak hanya dipengaruhi oleh adanya kelebihan permintaan (*excess demand*), namun juga dipengaruhi oleh kenaikan faktor-faktor produksi terutama bahan baku dan upah tenaga kerja. Sehingga, pada dasarnya inflasi lebih dipengaruhi oleh pasokan (*supply*) di

bandingkan faktor permintaan, dan menyebar ke seluruh perekonomian. Namun, guncangan penawaran yang bermanfaat, seperti persediaan minyak berlimpah yang menyebabkan turunnya harga minyak, dapat menyebabkan turunnya inflasi (Mankiw, 2010: 391)

Gambar 2 memperlihatkan fenomena dari *cost-push inflation*, dimana ketika terjadi guncangan pada sisi penawaran yang dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi negara mitra dagang, peningkatan harga komoditi yang diatur Pemerintah, maka akan menyebabkan kurva penawaran agregat bergerak ke atas dari AS_0 ke AS_1 , dalam asumsi tidak ada intervensi kebijakan dari Pemerintah, maka akan mengakibatkan permintaan agregat tetap. Sehingga akan menyebabkan tingkat harga naik, sementara *real income* akan menurun.

Gambar 3. Ilustrasi Cost-Push Inflation



Sumber: Case & Fair, 2012, diolah

2.3. Pengukuran Inflasi

Dalam pengukurannya selama ini, Inflasi yang diukur dengan IHK dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran berdasarkan *Classification of individual consumption by purpose* – COICOP), yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan harga berdasarkan tujuan pengeluarannya, 7 kelompok pengeluaran tersebut diantaranya:

- Kebutuhan bahan makanan;
- Kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau;
- Kelompok perumahan;
- Kelompok sandang;
- Kelompok kesehatan;
- Kelompok pendidikan dan olah raga;
- Kelompok transportasi dan komunikasi.

Namun sejak 2006, BPS mengumumkan inflasi IHK berdasarkan karakteristik perkembangan barang dan jasa yaitu permanen/resisten dan sementara/kontemporer. Pengelompokan inflasi yang disebut disagregasi inflasi ini bertujuan untuk menghasilkan indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental (Ginting, 2016). Dengan mekanisme perhitungan tersebut sumber-sumber penyebab inflasi IHK dapat dianalisis lebih baik berdasarkan sifat perubahan harganya (Bank Indonesia, 2006). Adapun pengukuran inflasi berdasarkan disagregasi inflasi, diklasifikasikan menjadi:

a. Inflasi Inti

Merupakan komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, dan inflasi mitra dagang), ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen (Bank Indonesia, 2018).

b. Inflasi komponen yang diatur Pemerintah

Merupakan komponen inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lainnya (Bank Indonesia, 2018).

c. Inflasi Bahan Bergejolak (*Volatile Foods*)

Merupakan komponen inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional (Bank Indonesia, 2018).

Dari ketiga komponen disagregasi inflasi tersebut, inflasi inti (elemen persisten) dianggap memiliki peran sangat penting dalam membentuk ekspektasi masyarakat, sementara komponen temporer (non-inflasi inti) kurang berperan karena kejadiannya tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh masyarakat (Friedman, 1963).

Hal tersebut diperkuat oleh konsep inflasi yang dijelaskan oleh Okun dan Fleming dalam Tjahjono, Endy Dwi et.al. (2000) yang menyatakan bahwa inflasi inti sebagai kecenderungan perubahan harga-harga secara umum. Sementara inflasi sesaat (*noises*) dianggap tidak dapat mendorong terjadinya kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum (yang bersifat persisten),

kecuali bila diakomodasikan oleh kebijakan moneter (Tjahjono, Endy Dwi et.al., 2000).

Roger (1998) juga menyatakan bahwa perubahan harga relatif pada umumnya akan terkait dengan laju inflasi sesaat, sementara komponen kenaikan harga-harga secara umum akan lebih bersifat menetap atau persisten.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga komponen inflasi dalam model *disaggregate inflation*, komponen inflasi intilah yang memiliki peranan paling penting terhadap pergerakan harga-harga secara umum. Sehingga, dalam penelitian ini hanya akan membahas determinan dari inflasi inti di Indonesia.

2.4. Determinan Inflasi

Berdasarkan teori serta pengukuran inflasi yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditentukan determinan dari inflasi inti. Bank Indonesia (2018) menjelaskan bahwa kurang lebih terdapat tiga faktor yang menyebabkan pergerakan dari inflasi inti, yaitu *output gap*, *imported inflation*, dan ekspektasi inflasi.

Output gap menggambarkan hubungan *supply-demand* yang terjadi di dalam perekonomian yang diperkirakan dapat mengakibatkan pergerakan dari nilai inflasi inti. Dalam penelitian ini, hubungan antara *supply-demand* tersebut di proksikan dengan GDP mewakili *demand*, dan IPI mewakili *supply*.

Imported inflation menggambarkan faktor-faktor yang ada di lingkungan eksternal, yang dapat mempengaruhi pergerakan harga di dalam negeri. Dalam penelitian ini, faktor-faktor eksternal yang diduga memengaruhi pergerakan inflasi inti antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar, serta harga emas dan harga BBM sebagai proksi dari komoditas internasional.

Di samping itu, berdasarkan teori kuantitas uang menjelaskan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh terhadap pergerakan harga-harga secara umum. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini juga memasukkan jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) sebagai salah satu variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap inflasi inti.

Adapun, hipotesis mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh GDP Terhadap Inflasi Inti

Dalam teori Keynesian (*demand pull theory*) menjelaskan bahwa inflasi disebabkan oleh adanya *excess demand* yang tidak mampu dipenuhi oleh kapasitas produksi yang tersedia pada suatu waktu tertentu. GDP merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam menggambarkan jumlah permintaan agregat dalam suatu negara. Sebab, salah satu metode perhitungan GDP adalah melalui sisi pengeluaran yang merupakan gambaran besaran konsumsi atau permintaan dalam suatu negara.

Dalam teori *Keynesian*, menggambarkan bagaimana permintaan dapat memengaruhi tingkat harga. Dalam teori ini menjelaskan bahwa ketika permintaan bertambah, maka peningkatan jumlah permintaan tersebut akan mendorong tingkat harga. Dengan demikian, diduga GDP sebagai proksi dari permintaan agregat memiliki pengaruh positif terhadap inflasi inti.

Sinclair et. al (2010) melakukan analisis tentang pertumbuhan PDB dan inflasi di The Fed. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pola dari pertumbuhan PDB dan inflasi secara umum menggambarkan pergerakan siklus ekonomi (Sinclair, Stekler, & Kitzinger, 2010).

2.4.2. Pengaruh Kurs Terhadap Inflasi Inti

Kurs dapat memengaruhi harga-harga konsumen domestik secara langsung melalui perubahan harga-harga impor, dan secara tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap permintaan domestik dan permintaan eksternal bersih atau ekspor (Simorangkir & Suseno, 2004).

Pengaruh kurs secara langsung terhadap permintaan domestik dapat terjadi melalui perubahan harga relatif antara harga barang domestik dengan harga barang impor. Kenaikan harga barang impor relatif terhadap harga barang di dalam negeri akibat depresiasi mengakibatkan masyarakat cenderung untuk membeli lebih banyak barang di dalam negeri (Dewayany, 2012). Kenaikan permintaan terhadap barang di dalam negeri tersebut dapat mendorong kenaikan harga barang di dalam negeri.

Sementara pengaruh kurs secara tidak langsung dapat melalui permintaan luar negeri (ekspor) berawal dari perubahan harga barang impor dan ekspor. Depresiasi nilai tukar mengakibatkan harga barang impor lebih mahal dan harga barang ekspor lebih murah. Kenaikan harga barang impor ini dapat menekan jumlah barang impor, sedangkan penurunan harga barang ekspor

dapat meningkatkan ekspor. Kedua faktor ini secara simultan akan meningkatkan permintaan luar negeri yang selanjutnya meningkatkan total permintaan agregat dan akhirnya meningkatkan laju inflasi (Dewayany, 2012).

Bleaney dan Fielding (2002) melakukan penelitian pada 80 negara berkembang. Penelitian tersebut menunjukkan adanya *trade off* antara kurs dengan inflasi dan stabilitas inflasi. Sistem kurs yang diterapkan suatu negara dapat memengaruhi tingkat inflasinya. Negara yang menerapkan *fixed rate* memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang menggunakan sistem kurs mengambang (Bleaney & Fielding, 2002).

2.4.3. Pengaruh M1 Terhadap Inflasi Inti

Berdasarkan teori kuantitas uang yang dikemukakan di atas, menggambarkan bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah uang beredar (M1) dengan tingkat inflasi inti. Artinya, ketika jumlah uang beredar meningkat, akan menyebabkan masyarakat untuk cenderung meningkatkan jumlah pengeluarannya untuk konsumsi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kenaikan pada tingkat harga.

Mankiw (2013; 159-160) juga menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah uang beredar menjadikan uang semakin banyak dan berdampak terhadap peningkatan harga atau inflasi. Berdasarkan teori ini, jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian menentukan nilai uang, sementara pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan sebab utamanya terjadinya inflasi.

2.4.4. Pengaruh IPI Terhadap Inflasi Inti

IPI mencerminkan peningkatan kinerja industri, serta menunjukkan bahwa peningkatan produksi dari industri manufaktur akan menyebabkan pasokan (*supply*) barang di pasar meningkat. Jika permintaan relatif konstan, maka peningkatan pasokan barang dapat menurunkan tingkat harga (Anugrah & Ismaya, 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Industrial Production Index* (IPI) memiliki pengaruh negatif terhadap inflasi inti.

2.4.5. Pengaruh Harga BBM Terhadap Inflasi Inti

Harga minyak meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Minyak masih digunakan nyaris di tiap lini bisnis, maka kenaikan harga minyak mendorong kenaikan biaya. Sejalan dengan konsep *cost-push inflation*, Peningkatan biaya (atau guncangan biaya) menggeser kurva *Aggregate Supply* (AS) ke kiri. Jika

diasumsikan Pemerintah tidak bereaksi pada pergeseran kurva AS dengan mengubah kebijakan fiskal atau moneter, kurva *Aggregate Demand* (AD) tidak akan bergeser. Pergeseran penawaran akan menyebabkan tingkat harga ekuilibrium naik (dari P0 ke P1) dan tingkat *output* agregat turun (dari Y0 ke Y1) (Case, Karl E., dan Fair, Ray. C., 2006). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga minyak (BBM), akan mengakibatkan tingkat harga naik, dan tingkat *output* agregat turun.

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Wimanda, Purwanto & Oktiyanto (2011) yang menunjukkan bahwa harga bahan bakar minyak secara signifikan memengaruhi inflasi inti di Indonesia.

2.4.6. Pengaruh Harga Emas Terhadap Inflasi Inti

Emas merupakan aset yang aneh, karena emas merupakan komoditas yang digunakan baik sebagai aset keuangan (*financial assets*), maupun bagian dari industri perhiasan, dan keduanya dapat menjadi aset lindung nilai. Selama beberapa abad, emas telah digunakan sebagai aset lindung nilai, karena secara psikologis memiliki keunggulan dibandingkan dengan aset lainnya (Bank of Canada, 2007).

Emas juga dianggap sebagai aset *safe haven*, yang digunakan sebagai aset lindung nilai dan atau hedging terhadap inflasi (Anugrah & Ismaya, 2018). Secara teoritis, ketika ekspektasi inflasi masa yang akan datang naik, maka akan mengakibatkan daya beli uang di masa yang akan datang menurun. Sehingga, masyarakat akan cenderung mengurangi kepemilikan atas uang, dan memilih meningkatkan kepemilikan atas emas. Kenaikan permintaan emas ini akan menyebabkan harga emas naik, sehingga kenaikan harga emas tersebut menandakan bahwa tingkat inflasi di masa yang akan datang diperkirakan lebih tinggi (Bank of Canada, 2007). Namun dalam jangka panjang, ketika jumlah uang beredar menurun, sebagai akibat meningkatnya kepemilikan emas, maka akan mengakibatkan tingkat konsumsi menurun, dan akhirnya mengakibatkan tingkat inflasi turun.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (*time series*) dalam bentuk data sekunder dan tergolong dalam jenis data kuantitatif dengan jenis data rasio. Data runtun waktu (*time series*) yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah data pada periode Januari 2009 - Juni 2019 dengan data kuartalan. Adapun definisi serta pengukuran dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. *Gross Domestic Product* (GDP), merupakan nilai dari barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dengan satuan Rupiah (Rp) pada periode Januari 2009 – Juni 2019.
- b. Kurs, merupakan harga jual Rupiah terhadap Dollar AS dengan satuan Rupiah/Dollar AS, yaitu nilai tukar nominal Rupiah apabila ditukarkan per 1 Dollar AS pada periode Januari 2009 – Juni 2019.
- c. *Money Supply* (M1), merupakan uang beredar dalam arti sempit yang terdiri dari uang kuartal dan uang giral dengan satuan Rupiah pada periode Januari 2009 – Juni 2019.
- d. *Industrial Production Index* (IPI), merupakan suatu index yang menggambarkan pertumbuhan industri di Indonesia digambarkan dengan pertumbuhan industri dalam satuan persentase (%) pada periode Januari 2009 – Juni 2019.
- e. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan satuan Rupiah (Rp), yaitu daftar harga BBM jenis premium yang disubsidi oleh pemerintah pada periode Januari 2009 – Juni 2019.
- f. Harga Emas, merupakan harga jual emas internasional dengan satuan Dollar/Oz dengan periode Januari 2009 – Juni 2019.

Sementara itu, data-data yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini bersumber dari:

Tabel 1. Nama Variabel dan Sumber Data

Nama Variabel	Sumber
Inflasi Inti	Badan Pusat Statistik (BPS)
<i>Gross Domestic Product</i> (GDP)	Badan Pusat Statistik (BPS)
Kurs	Bank Indonesia
Jumlah Uang Beredar (M1)	Bank Indonesia
<i>Industrial Production Index</i> (IPI)	CEIC
Harga BBM (Premium)	Kementerian Keuangan, dan PT. Pertamina (Persero)
Harga Emas	Gold.org

Sumber: berbagai sumber, diolah

3.2. Alat Analisis

Analisis determinan dari inflasi inti di Indonesia menggunakan pendekatan *Vector Error Correction Model* (VECM) untuk mengetahui variabel-variabel yang diduga mempengaruhi inflasi inti di Indonesia. VECM merupakan pengembangan

model *Vector Autoregression* (VAR) untuk menganalisis lebih mendalam jika kita ingin mempertimbangkan adanya perilaku data yang tidak stasioner (Ekananda, 2016).

Sebelum melakukan estimasi dengan menggunakan *Vector Error Correction Model* (VECM), terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menguji apakah model VECM layak untuk digunakan. *Seasonal Adjustment* atas data yang digunakan, Uji stasioneritas data, penentuan panjang *lag* optimum, uji kointegrasi, dan pengujian stabilitas model harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menguji apakah model VECM adalah model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Setelah memenuhi hipotesis yang disyaratkan, maka setelah itu dapat dilakukan pengujian VECM. Adapun, uraian dari langkah-langkah tersebut, sebagai berikut:

3.2.1. *Seasonal Adjustment*

Oleh karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuartalan, dimungkinkan terdapat efek musiman dalam pola data yang digunakan tersebut. Untuk itu, langkah pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghilangkan efek musiman dari data yang digunakan dalam penelitian.

3.2.2. Uji Stasioneritas Data

Tahap pertama yang harus dilakukan untuk menentukan pendekatan terbaik yang akan digunakan adalah pengujian stasioneritas data masing-masing variabel. Oleh karena data yang digunakan merupakan data runtun waktu (*time series*), dimana data *time series* menyimpan banyak permasalahan, salah satunya autokorelasi, maka uji akar unit menjadi penting untuk dilakukan. Autokorelasi merupakan penyebab yang mengakibatkan data menjadi tidak stasioner. Tidak stasionernya data akan mengakibatkan kurang baiknya model yang diestimasi (Ekananda, 2016).

3.2.3. Penentuan *Lag Optimum*

Penetapan *lag* optimal sangat penting karena variabel independen yang digunakan tidak lain adalah *lag* dari variabel endogennya. Pemilihan panjang *lag* penting karena bisa mempengaruhi penerimaan dan penolakan hipotesis nol, yang akan mengakibatkan bias estimasi dan bisa menghasilkan prediksi yang tidak akurat (Ekananda, 2016).

Penentuan panjang *lag* optimum dapat didasarkan pada beberapa kriteria seperti *Likelihood Ratio* (LR), *Final Prediction Error* (FPE), *Akaike Information Critrion* (AIC), *Schwarz Information Criterion* (SC), dan *Hannan-Quin Criterion* (HQ). Apabila kriteria informasi tersebut merujuk kepada satu *lag* saja, maka kandidat tersebutlah *lag* optimum. Namun, jika kriteria merujuk kepada beberapa kandidat, maka selanjutnya dipilih kandidat dengan nilai *Adjusted R²* terbesar (Ekananda, 2016).

3.2.4. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan hubungan antar variabel, khususnya dalam jangka panjang. Jika terdapat kointegrasi pada variabel-variabel yang digunakan di dalam model, maka dapat dipastikan adanya hubungan jangka panjang diantara variabel (Basuki dan Prawoto, 2016). Metode yang dapat digunakan dalam menguji keberadaan kointegrasi ini adalah metode *Johansen Cointegration*.

3.2.5. Pengujian Stabilitas Model

Pengujian sistem VAR dan VEC akan dilihat dari nilai *inverse roots* karakteristik AR polionomialnya. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai modulus di tabel AR-*roots*-nya, jika seluruh nilai AR-*roots*-nya < 1 , maka sistem tersebut dapat dikatakan stabil (Ekananda, 2016).

Setelah serangkaian pengujian tersebut dilakukan, maka hasil dari pengujian tersebut dapat dijadikan kesimpulan apakah VECM adalah model terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Uji Stasioneritas Data

Dalam penelitian ini uji akar unit dilakukan dengan *Augmented Dickey Fuller* (ADF) *Test*. Berdasarkan hasil pada tabel 2 dapat terlihat bahwa belum semua variabel stasioner pada tingkat *level* $I(0)$, namun semua variabel telah stasioner pada tingkat *first difference* $I(1)$. Model VECM mensyaratkan semua variabel harus stasioner pada diferensiasi pertama dan semua variabel harus memiliki ordo yang sama (Basuki dan Prawoto, 2016).

Tabel 2. Hasil Uji ADF menggunakan Intercept pada Tingkat Level & First Difference

Variabel	Level		First Difference	
	ADF t-Statistik	Probabilitas	ADF t-Statistik	Probabilitas
Core Inflasi	-2.943427	0.0000	-2.948404	0.0000
GDP	-3.536601	0.2859	-2.943427	0.0001
Kurs	-2.936942	0.0019	-2.945842	0.0000
M1	-2.936942	0.0000	-2.941145	0.0000
BBM_Price	-2.936942	0.0000	-2.945842	0.0000
Gold_Price	-2.936942	0.0008	-2.938987	0.0000
IPI	-2.943427	0.0000	-2.951125	0.0000

Sumber: diolah, 2019

Berdasarkan hasil pada tabel 2 dapat terlihat bahwa seluruh variabel telah stasioner pada *first difference* dengan nilai probabilitas < 0.05 , artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dengan kata lain, data sudah stasioner pada ordo yang sama, sehingga pengujian dapat dilanjutkan ke pengujian kointegrasi.

4.2 Penentuan Lag Optimum

Berdasarkan hasil pengujian *lag optimum* dengan menggunakan *Lag Length Criteria*, maka dapat ditentukan bahwa *lag optimum* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *lag kedua*. Hal tersebut didasari oleh hasil pengujian terhadap kelima kriteria dalam penentuan *lag*.

4.2. Uji Kointegrasi

Berdasarkan Tabel 3, dapat terlihat bahwa terdapat empat *rank* variabel yang memiliki hubungan kointegrasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai *trace statistic* yang lebih besar dari nilai *critical value* yang digunakan, yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dengan kata lain variabel-variabel yang digunakan memiliki hubungan dalam jangka panjang (kointegrasi) satu dengan lainnya. Oleh karena itu, estimasi VECM dalam penelitian ini dapat digunakan. Selanjutnya dapat dilakukan uji stabilitas VECM.

Tabel 3. Hasil Uji Johansen Cointegration Test

Hipotesis	Trace Statistic	Critical Value 5%	Prob.
None *	239.5572	125.6154	0.0000
At most 1 *	145.8657	95.75366	0.0000
At most 2 *	97.82094	69.81889	0.0001
At most 3 *	57.97871	47.85613	0.0042
At most 6 *	4.794459	3.841466	0.0285

Sumber: diolah, 2019

4.4 Uji Stabilitas Model VECM

Suatu sistem VAR dikatakan stabil jika seluruh akar atau *roots*-nya memiliki modulus lebih kecil dari satu. Berdasarkan hasil pengujian *VAR Stability Condition Check* terhadap seluruh variabel dan *lag* yang digunakan pada tabel 4, terlihat bahwa nilai modulus < 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa estimasi stabilitas VAR yang akan digunakan dalam analisis IRF dan FEVD telah stabil.

Tabel 4. Hasil Uji Stabilitas Estimasi VECM

Root	Modulus
-0.023754 – 0.984330i	0.984617
-0.023754 + 0.984330i	0.984617
-0.584389 – 0.439434i	0.731172
-0.584389 + 0.439434i	0.731172
0.602035	0.602035
0.378879 - 0.453717i	0.591108
0.378879 + 0.453717i	0.591108
0.572279	0.572279
-0.275242 – 0.478660i	0.552154
-0.275242 + 0.478660i	0.552154
-0.534484	0.534484
-0.283893 – 0.247628i	0.376716
-0.283893 + 0.247628i	0.376716
0.180656	0.180656

Sumber: diolah, 2019

4.5 Interpretasi Hasil Estimasi VECM (*Vector Error Correction Model*)

Setelah melalui serangkaian pengujian untuk mendapatkan kesimpulan apakah model VECM layak untuk digunakan, pada tahapan ini dilakukan analisis dengan model VECM. Adapun hasil estimasi VECM dapat ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Estimasi VECM (*Vector Error Correction Model*)

Variabel	Jangka Panjang		Jangka Pendek	
	Koefisien	t-Statistik Parsial	Koefisien	t-Statistik Parsial
GDP	0.000065	14.5452	-0.000003	-1.98876
Kurs	-0.000935	-3.71787	-0.000168	-2.07606
M1	-0.000007	-1.52872	0.0000044	2.66327
Industrial Production Index (IPI)	0.031208	1.13217	-0.016109	-2.26866
Harga BBM	0.001018	3.09926	-0.000073	-0.77074
Harga Emas	-0.00008	-0.08595	-0.000714	-1.86215
Adjusted R square	63.08%			

Sumber: diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisa estimasi VECM diatas, maka dapat dipaparkan hasil sebagai berikut:

4.5.1 Pengaruh GDP Terhadap Inflasi Inti di Indonesia

Berdasarkan hasil regresi diatas memperlihatkan bahwa GDP memiliki pengaruh signifikan terhadap core inflasi baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, terlihat bahwa GDP memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap core inflasi dengan nilai koefisien 0.000003. Artinya, apabila terjadi kenaikan GDP sebesar 1 poin, maka akan mengakibatkan inflasi inti turun sebesar 0.000003 poin.

Dalam jangka pendek, hasil dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa ketika jumlah permintaan agregat meningkat, inflasi inti justru akan menurun. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila dalam jangka pendek jumlah *output* riil lebih rendah dibandingkan *output* potensialnya. Sehingga, ketika terjadi kenaikan terhadap barang dan jasa pada sisi permintaan, akan direspon oleh produsen

dengan kenaikan jumlah produksi dalam jumlah yang lebih besar, sehingga kenaikan permintaan agregat akan mengakibatkan turunnya inflasi.

Sementara dalam jangka panjang, terlihat bahwa GDP memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap core inflasi dengan nilai koefisien 0.000065. Artinya, apabila terjadi kenaikan GDP sebesar 1 poin, maka akan mengakibatkan inflasi inti naik sebesar 0.000065 poin.

Dalam jangka panjang, hasil dalam penelitian ini telah sesuai dengan teori *demand-pull inflation*, dimana ketika terjadi peningkatan terhadap permintaan agregat, sementara kapasitas produksi belum mampu untuk menyesuaikan, maka akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat harga (inflasi inti meningkat).

4.5.2 Pengaruh Kurs Terhadap Inflasi Inti di Indonesia

Berdasarkan hasil regresi diatas memperlihatkan bahwa kurs memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi inti baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Hasil dalam penelitian ini menggambarkan bahwa ketika nilai tukar rupiah melemah (depresiasi), maka akan meningkatkan inflasi inti.

Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa ketika kurs rupiah melemah terhadap US Dollar (depresiasi), maka baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang akan mengakibatkan kenaikan inflasi inti. Kondisi tekanan inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan *output* riil merupakan kondisi dimana ketergantungan sektor produksi terhadap impor bahan baku relatif tinggi. Ketika terjadi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, maka harga input untuk bahan baku industri menjadi naik sehingga menambah beban peningkatan biaya produksi. Peningkatan biaya produksi pada akhirnya akan mendorong terjadi peningkatan harga atau inflasi (Baroroh, 2012).

4.5.3 Pengaruh M1 Terhadap Inflasi Inti di Indonesia

Berdasarkan hasil regresi di atas memperlihatkan bahwa M1 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi inti dalam jangka pendek, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi inti dalam jangka panjang.

Hasil tersebut sesuai dengan teori kuantitas uang yang menjelaskan bahwa dalam jangka pendek tingkat harga umum (inflasi) berubah secara proporsional dengan perubahan uang yang diedarkan oleh Pemerintah. Dengan kata lain, dalam teori ini ingin menggambarkan bahwa jika jumlah uang beredar di masyarakat meningkat, maka dalam jangka pendek akan meningkatkan jumlah

konsumsi yang akan di keluarkan oleh masyarakat, sehingga akan meningkatkan inflasi inti.

Namun, dalam jangka panjang ketika jumlah uang beredar meningkat, peningkatan jumlah uang beredar tersebut tidak lagi memberikan pengaruh signifikan terhadap inflasi inti. Karena, dalam jangka panjang, ketika jumlah uang beredar meningkat, pasar telah mampu mengantisipasi peningkatan permintaan masyarakat dengan memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang lebih banyak, maka peningkatan jumlah uang beredar tidak lagi memberikan *shock* dalam jangka panjang.

4.5.4 Pengaruh IPI Terhadap Inflasi Inti di Indonesia

Berdasarkan hasil regresi di atas memperlihatkan bahwa IPI memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *core* inflasi dalam jangka pendek, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap *core* inflasi dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anugrah & Ismaya (2018) yang menyebutkan bahwa Peningkatan kinerja industri yang diprosikan dengan IPI menunjukkan bahwa peningkatan produksi dari industri manufaktur akan menyebabkan *supply* barang di pasar meningkat. Jika permintaan relatif konstan, maka peningkatan pasokan barang akan menurunkan inflasi.

Sementara menurut penelitian Hutabarat (2005), menyebutkan bahwa inflasi yang bersifat persisten (inflasi inti) tidak dapat dipisahkan dari pengaruh guncangan (*shock*) pada sisi *supply*, yang merupakan kondisi dimana tingkat pasokan lebih rendah daripada tingkat permintaan.

4.5.5 Pengaruh Harga BBM Terhadap Inflasi Inti di Indonesia

Berdasarkan hasil regresi diatas memperlihatkan bahwa harga bbm bersubsidi (premium) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi inti dalam jangka pendek, namun berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi inti dalam jangka panjang.

Energi fosil masih menjadi energi utama penopang perekonomian Indonesia saat ini. Dengan posisi Indonesia yang saat ini telah menjadi net importir minyak, kenaikan harga minyak akan mengakibatkan kenaikan harga secara umum. BBM dengan Ron 88 atau BBM jenis premium yang merupakan jenis BBM yang diatur oleh Pemerintah, memiliki peran yang sangat signifikan terhadap inflasi inti

karena merupakan jenis bbm dengan tingkat konsumsi nasional yang relatif tinggi (Anugrah & Ismaya, 2018).

Sesuai dengan teori *cost-push inflation*, kenaikan harga BBM akan memengaruhi pergerakan kurva penawaran agregat dalam jangka pendek (SRAS) kearah kiri, sehingga akan mempengaruhi *output* (Y) dan meningkatkan harga (P). Dengan kata lain, dalam keadaan *aggregate demand* yang tetap, kenaikan harga bbm akan menurunkan tingkat *output* (Y) dan menaikkan tingkat harga (P).

Hasil penelitian ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Perry & Cline (2013), dan Afandi (2015), yang menyatakan bahwa harga BBM merupakan variabel utama dalam kegiatan produksi dan distribusi (*cost-push inflation*).

4.5.6 Pengaruh Harga Emas Terhadap Inflasi Inti di Indonesia

Berdasarkan hasil regresi diatas memperlihatkan bahwa harga emas berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap inflasi inti baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Secara teoritis, emas merupakan salah satu komoditas yang termasuk dalam *safe haven* yang umumnya digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Investasi dalam instrumen emas relatif aman karena dapat menjaga daya beli (Anugrah & Ismaya, 2018). Dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa harga emas berkorelasi negatif terhadap inflasi inti. Artinya, ketika terjadi kenaikan harga emas, mencerminkan bahwa permintaan terhadap emas sedang meningkat, dan akan mengakibatkan konsumsi masyarakat untuk jenis barang dan jasa lainnya menjadi turun, sehingga akan mengakibatkan tingkat inflasi inti turun.

5. Penutup

Berdasarkan model VECM yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek PDB, IPI, Kurs, dan jumlah uang yang beredar M1 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai inflasi inti di Indonesia. Sedangkan dalam jangka panjang, harga bahan bakar, PDB, serta nilai kurs memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai inflasi inti di Indonesia.

Setelah diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi, maka penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk membangun model yang dapat memprediksi nilai inflasi secara tepat dan akurat.

Daftar Pustaka

- Afandi, Muhammad Anif. (2015). *Determinan Inflasi Dari Sisi Supply (Cost-Push Inflation) di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Anugrah, D. F., Ismaya, B. I., & Pratama, R. (2018). *Determinat of Food Inflation: The Case of Indonesia*. Bulletin Of Monetary Economics and Banking, Volume 21, Number 1, 81-94.
- Anugrah, D. F., Ismaya, B. I., & Pratama, R. (2018). *The Determinants of Inflation: The Case of Indonesia*. In T. S. Center, *Behaviour and Inflation Dynamics in SEACEN Member Economies and Their Implications for Inflation* (pp. 127-144). Kuala Lumpur: The SEACEN Center.
- Atmadja, Adwin S. (1999). *Inflasi Indonesia: Sumber Sumber Penyebab dan Pengendaliannya*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 1(1).
- Bank Indonesia. *Pengenalan Inflasi, Disagregasi Inflasi*. (2018). (<https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>, diakses 15 Juli 2019).
- Bank Indonesia. (2006). *Metode Perhitungan Inflasi Terbaru Oleh Badan Pusat Statistik*. (<https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp%208606.aspx>, diakses 15 Juli 2019).
- Baroroh, Utami. (2012). *Pengaruh Guncangan Output Gap dan Inflasi Terhadap Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter di Indonesia*. Signifikan. Vol. 1(2).
- Basuki, Agus Tri and Prawoto, Nano. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Bleaney, M., & Fielding, D. (2002). *Exchange Rate Regimes, Inflation and Output Volatility in Developing Countries*. Journal of Development Economics Vol 68, 233-245.
- Case, Karl E., Ray C. Fair. (2012). *Principles of Economics 10th Edition*. England: Pearson Education Limited.
- Dewayany, Herina Prasnowaty. (2012). *Analisis Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Pasa Penerapan Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali dan Implikasi Penerapan Inflation Targeting Framework Terhadap Inflasi di Indonesia*. Depok. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Ekananda, Mahyus. (2016). *Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian Ekonomi, Sosial, dan Bisnis Edisi Pertama*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Friedman, Milton. (1963). *Inflation, Causes and Consequence*. New York: Asia Publishing House.
- Friedman, Milton. (1963). *Quantity Theory of Money*. New York: Stockton Press; and London: Macmillan.

- Ginting, Ari Mulia. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi: Studi Kasus di Indonesia Periode Tahun 2004-2014*. Jakarta. Peneliti. Badan Keahlian DPR RI.
- Hutabarat, Akhis R. (2005). *Determinan Inflasi Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lee, B.-S. (1992). *Casual Relations among Stock Returns, Interest Rate, Real Activity, and Inflation*. The Journal of Finance, 47 (4), 1591-1603.
- Lim, Y. C., & Sek, S. K. (2015). *An Examination on the Determinants of Inflation*. Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3, No.7, 678-682.
- Mankiw, N. (1994). *Monetary Policy*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Mankiw, N. Gregory, Euston Quah dan Peter Wilson. (2010). *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers. hal. 391.
- Mankiw, N. Gregory, Euston Quah dan Peter Wilson. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro Principles of Economics*. Jakarta: Salemba Empat, hal.159-160.
- Perry, N. and Cline, N. (2013). *Wages, exchange rates, and the great inflation moderation: A Post-Keynesian View*. Working Paper No. 759. Levy Economics Institute of Bard College.
- Roger, Scott. (1998). *Core Inflation: Concepts, Uses, and Measurement*. New Zealand.
- Santoso, A. B. (2017). *Analisis Inflasi di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers Unisbank, 445-452.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suseno, dan Siti Astiyah. (2009). *Inflasi*. Seri Kebanksentralan. Jakarta: Bank Indonesia.
- Tjahjono, Endy Dwi *et.all*. (2000). *Pengukuran Inflasi Inti (Core Inflation) di Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Jakarta: Bank Indonesia.
- Tkacz, Greg. (2007). *Gold Prices and Inflation*. Canada: Bank of Canada Working Paper 2007-35.
- Wimanda, R.E.; N. M. A. Purwanto. dan F. Oktiyanto. (2011). *Analysis of Factors Affecting Core Inflation in Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Working Paper, No.13.
- Simorangkir, Iskandar. Dan Suseno. (2004). *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Sinclair, T. M., Stekler, H., & Kitzinger, L. (2010). *Directional forecast of GDP and Inflation: a join evaluation with an application to Federal Reserve predictions*. Applied Economics, 42, 2289-2297.

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA SEBELUM DAN SESUDAH PENGALOKASIAN DANA DESA DI TAHUN 2014 DAN TAHUN 2017

*Financial Performance of Villages Government Before and After Villages
Fund Allocation In 2014 and 2017*

Slamet Widodo

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI
email: slamet.widodo@dpr.go.id

Abstract

An assessment of local government financial performance can be used as an input in the process of policy improvements in the future. The allocation of villages fund from National budget considered as momentum to review some financial indicator performance. This study measures village government financial ratios namely the ratio of independence, the ratio of revenues effectiveness, ratio of expenditure efficiency, ratio of operational expenditure, capital expenditure ratio, and ratio of revenues growth using secondary data from BPS survey results in 2014 and 2017. The analysis method used is One-way Anova. The purpose of the study was to see whether there was a change in the ratio before and after village funds allocation from National Budget. The results showed a significant difference between those ratios, except the efficiency ratio of village government spending.

Keywords: *village independence, village funds, one way anova*

1. Pendahuluan

Keberpihakan pemerintah dalam memajukan daerah telah digaungkan sejak pemberlakuan otonomi daerah di tahun 1999. Pengalihan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah membawa angin segar berupa peningkatan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah. Tidak hanya itu, pelaksanaan otonomi daerah yang telah berlangsung hampir dua dekade, telah melahirkan banyak daerah otonomi baru (DOB). Selama tahun 1999-2015, telah ada DOB terdiri dari 8 provinsi, 181 Kabupaten, dan 34 Kota (Kemendagri, 2019). Hal ini tentunya semakin meningkatkan alokasi pendanaan daerah yang bersumber dari APBN.

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengalokasian dana kelurahan dalam mekanisme DAU tambahan, semakin

meningkatkan porsi APBN bagi pemerintah daerah. Berbagai kebijakan dan penyempurnaan regulasi yang semakin meningkatkan sumber pendapatan daerah tentu saja harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah, sesuai dengan tujuan utama otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan kreatifitas, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Peningkatan kinerja pemerintah daerah pada akhirnya harus dievaluasi untuk menilai seberapa besar efektivitas alokasi dana yang bersumber dari APBN mampu memberikan manfaat bagi publik. Beberapa indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah antara lain berkaitan dengan tingkat kemandirian, efisiensi, dan efektivitas daerah dalam mengelola belanja dan pendapatannya, dan seberapa besar anggaran aparatur dan infrastruktur mampu meningkatkan kinerja pendapatan daerah.

Pemanfaatan indikator ini tidak hanya berguna untuk mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah, namun juga pemerintahan desa yang dalam lima tahun terakhir menjadi fokus penganggaran bagi terwujudnya salah satu agenda prioritas ke-3 Nawacita, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Penganggaran dana desa dalam APBN tentu saja dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Transfer dana desa yang dimulai pada tahun 2015 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Alokasinya meningkat di tahun 2016 menjadi sebesar Rp46,9 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp800 juta (Dirjen Pajak, 2018).

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui dana desa ini, desa juga memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Bahkan evaluasi

penggunaan dana desa oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dana desa juga telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Demikian juga dengan jumlah penduduk miskin yang menurun dari 17,7 juta di tahun 2014 menjadi 17,1 juta di tahun 2017 (Kemenkeu, 2017). Keberadaan dana desa yang bersumber dari APBN semakin membuka peluang bagi meningkatnya kemandirian desa seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian di desa.

Meskipun baru dialokasikan sejak tahun 2015, perlu dilakukan evaluasi terkait kinerja pemerintahan desa dengan membandingkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2015 dan tahun 2017 yaitu sebelum dan sesudah adanya dana desa. Kinerja dimaksud mencakup rasio Kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan pendapatan pada pemerintahan desa. Rasio-rasio ini secara umum digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah kabupaten/kota dan belum banyak digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan desa. Meskipun pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dalam mengelola dan menggali pendapatannya (melalui pajak dan retribusi) dibanding pemerintahan desa, namun pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemandirian desa secara ekonomi dan mampu menggali sumber-sumber pendapatan desa, diluar pajak dan retribusi, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.

Hasil dari evaluasi ini tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas keberpihakan pusat kepada daerah, terutama pemerintahan desa, serta mengurangi ketergantungan desa terhadap sumber-sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Dana Desa

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana desa dialokasi untuk seluruh desa berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Secara umum prioritas

penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Secara khusus prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun demikian, desa juga diberi keleluasaan untuk membiayai kegiatan di luar prioritas penggunaannya sepanjang mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota, dan kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Kemenkeu, 2017).

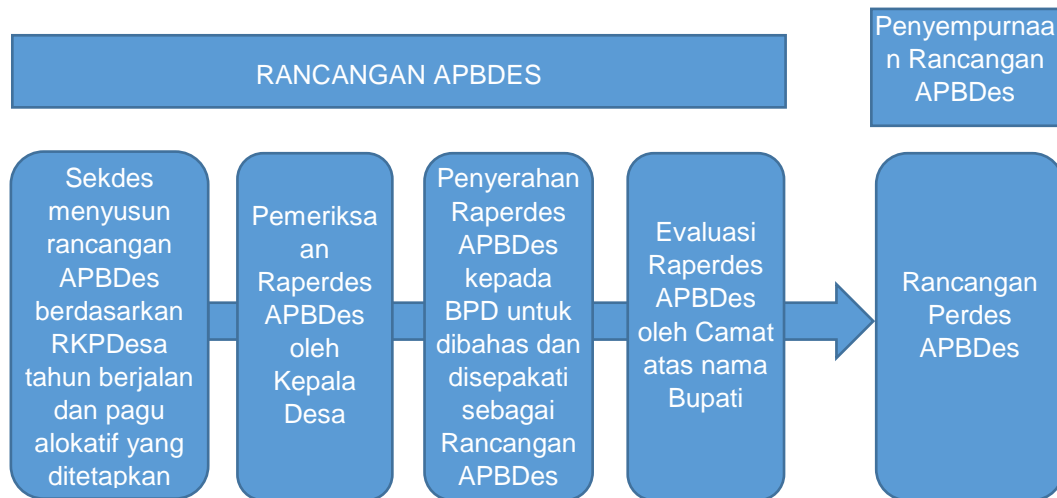
2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2.2.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDes memuat pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. APBDes juga dapat dilihat dari perspektif pengelolaan keuangan penyelenggara/aparat desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa, pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

2.2.2. Proses Penyusunan APBDes

Pedoman penyusunan APBDes mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Secara ringkas alur penyusunan APBDes dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Alur Penyusunan APBDes

Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Untuk menjamin adanya kesesuaian prioritas antar tingkatan pemerintah, maka Rancangan Perdes APBDes harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- prinsip penyusunan APBDes;
- kebijakan penyusunan APBDes;
- teknis penyusunan APBDes; dan
- hal khusus lainnya.

2.2.3. Prinsip Pengelolaan APBDes²

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

² Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa,

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.2.4. Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBDes

Dalam penyusunan APBDes, prinsip-prinsip yang harus dimuat, antara lain adalah:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes;
- d. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; dll.

Kebijakan penyusunan APBDes yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam perencanaan penyusunan APBDes Tahun Anggaran berkenaan, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan adalah sebagai berikut³:

³ BPS, Statistik Pemerintahan Desa

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Pendapatan desa berasal dari:

- Pendapatan Asli Desa yaitu penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa, terutama dalam membiayai belanja langsung dan tidak langsung. Sumber pendapatan asli desa terdiri dari: kekayaan desa, swadaya, gotong-royong masyarakat desa, pungutan desa, dan hasil usaha desa.
- Bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintahan di atasnya. Sumber bagi hasil pajak berasal dari pajak daerah, PBB, dan lainnya.
- Bagi Hasil Retribusi yaitu pengembalian sebagian hasil retribusi yang diambil dari usaha maupun bukan usaha dari desa tersebut oleh pemerintah di atasnya.
- Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu bagian penting dari dana perimbangan ini adalah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa, dimana besarnya paling sedikit 10 persen.
- Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lain adalah segala bentuk bantuan yang diperuntukan bagi desa/nagari baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa lain, termasuk dana desa.
- Hibah adalah pemberian sumbangan yang biasanya ditujukan bukan dalam rangka program-program pemerintah desa/nagari. Dana ini dapat berasal baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, badan/lembaga/organisasi swasta, maupun kelompok masyarakat/perorangan.
- Sumbangan Pihak Ketiga

b. Belanja Desa

Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja desa diklasifikasikan dalam kelompok kewenangan desa yaitu:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja ini selanjutnya dibagi dalam kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan dirinci berdasarkan jenis belanja yaitu:

- Belanja Pegawai yaitu pengeluaran yang langsung dikeluarkan untuk upah dan gaji perangkat desa sehubungan dengan tugasnya. Tetapi jika pamong desa/nagari tersebut adalah pegawai negeri atau pegawai daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota, maka gajinya tidak dimasukkan dalam realisasi ini. Yang dimasukkan dalam butir ini hanyalah honor yang diterima dari desa/nagari.
- Belanja Barang dan Jasa yaitu semua pengeluaran pemerintah desa/nagari yang ditujukan untuk kelancaran kegiatan/aktivitas pemerintahan desa. Belanja barang dan jasa meliputi biaya perjalanan dinas, belanja bahan/material, dan lain-lain.
- Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan desa/nagari, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.3. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan capaian atas suatu hasil kerja pengelolaan keuangan daerah yang diukur selama satu tahun anggaran berdasarkan indikator tertentu sesuai dengan tujuan penilaian kinerja. Pengukurannya dapat dilakukan dengan membandingkan antar pos-pos anggaran sesuai dengan realisasi terhadap pagu anggarannya, atau capaian atas realisasinya dalam satu tahun anggaran. Metode untuk pengukuran kinerja ini biasanya menggunakan rasio keuangan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan. Secara umum perhitungan atas rasio keuangan ini dapat digunakan pada setiap tingkat pemerintahan, dari level pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dan pemerintahan desa. Rasio kemandirian, sebagai contoh, dapat digunakan oleh setiap level pemerintahan yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah di atasnya dan pemerintah yang sederajat, atau sumber lainnya di luar pendapatan aslinya.

2.3.1. Rasio Keuangan Daerah

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

Tinggi rendahnya rasio kemandirian menggambarkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, dapat digambarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : DJPK, Kemenkeu RI

- Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

b. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, dapat digambarkan tingkat efektivitas pendapatan sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
$X > 100\%$	Efektif
$X = 100\%$	Efektif Berimbang
$X < 100\%$	Tidak Efektif

Sumber: DJPK, Kemenkeu RI

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio

Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2013 hal. 112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, dapat digambarkan tingkat efektivitas pendapatan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Pengukuran Efisien

Persentase	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mohamad Mahsun (2012:187) dalam Puput Risky Pramita, 2015.

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Abdul Halim 2007:236 dalam Puput Risky Pramita, 2015). Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

- Rasio Belanja Operasi.

Rasio ini merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah, yang menggambarkan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.

Menurut Mahmudi (2010 hal.164) di dalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Ketentuan mengenai besaran belanja operasi dalam pemerintahan desa yaitu paling banyak 30 persen dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk i) penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; ii) operasional pemerintahan desa; iii) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan iv) insentif rukun tetangga dan rukun warga. ⁴Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat digambarkan pengelompokan rasio belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Belanja Operasi

Persentase	Kriteria
30% ke atas	Tidak Sesuai
30%	Sangat Sesuai
Kurang dari 30%	Sesuai

Sumber: PP Nomor 47 Tahun 2015, diolah

- Rasio Belanja Modal

Rasio ini merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Menurut Mahmudi (2010 hal. 164 dalam Puput Risky Pramita, 2015) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sejak tahun 2018 pemerintah telah mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan paling sedikit 25 persen dari dana transfer umum untuk belanja infrastruktur daerah. Sesuai ketentuan, paling sedikit 70 persen dari belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan

⁴ PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Meskipun penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik, ketentuan paling sedikit 25 persen dari belanja desa untuk belanja modal dapat diterapkan untuk memastikan percepatan pembangunan ekonomi di perdesaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat digambarkan pengelompokan rasio belanja modal sebagai berikut:

Tabel 5. *Kriteria Belanja Operasi*

Persentase	Kriteria
25% ke atas	Sangat Sesuai
25%	Sesuai
Kurang dari 25%	Tidak Sesuai

Sumber: PP No. 47 Tahun 2015, diolah

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan menggambarkan pertumbuhan pendapatan dengan membandingkan pendapatan dalam periode tahun anggaran terhadap pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya, untuk mengetahui apakah pertumbuhannya positif atau negatif. Apabila pertumbuhannya positif maka terjadi peningkatan kinerja keuangan pendapatan daerah, dan sebaliknya. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

Meskipun ukuran rasio pertumbuhan hanya diukur berdasarkan arahnya saja (positif atau negatif), namun dalam untuk kepentingan penelitian ini penulis memberikan skala penilaian tentang rasio pertumbuhan, sebagai berikut:

Tabel 6. *Kriteria Rasio Pertumbuhan Pendapatan*

Persentase	Kriteria
50% ke atas	Baik sekali
50%	Baik
Kurang dari 50%	Cukup baik
Kurang dari 0%	Buruk

Sumber: BPS, diolah

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Penelitian	Hasil Penelitian
1	Berna Sudjana Ermaya	Kemandirian Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Penelitian menganalisis kemandirian desa untuk mengatasi keterbatasan dan kesenjangan antar desa.	Hasil penelitian menyatakan bahwa Kemandirian desa dapat dilakukan melalui kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga. Hasil penelitian ini belum menyinggung mengenai peningkatan pendapatan desa sebagai akibat dari adanya transfer dana desa yang semakin memberi keleluasaan desa dalam mengelola pendapatannya.
2	Kiki Endah	Mewujudkan kemandirian desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	Penelitian ini menganalisis secara kualitatif mengenai pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kemandirian desa.	Hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan lembaga badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki tujuan memberikan kesejahteraan masyarakat desa dan sekaligus memberikan pemasukan untuk pendapatan asli desa, serta menggerakkan ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi desa. Hasil penelitian belum menyinggung tentang potensi pemerintah desa dalam melakukan penyertaan modal pada BUMDes pasca peningkatan pendapatan desa melalui transfer dana desa.
3	Inten Meutia Liliana	Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Penelitian ini menganalisis tentang penggunaan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dan menganalisis kesesuaian penggunaannya dengan ketentuan yang berlaku.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan menyarankan agar dikembangkan pedoman bagi desa dalam menentukan prioritas kegiatan yang paling utama dan yang paling bermanfaat. Hasil penelitian belum mengulas tentang kemandirian, efisiensi, efektivitas keuangan Pemkab sebelum dan sesudah adanya Dana Desa.

Sumber: Peneliti, diolah

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan pendekatan Anova satu arah. Anova merupakan singkatan dari “analysis of varian”. *Analysis of Varian* adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean (rata-rata) data lebih dari dua kelompok. Ada dua jenis Anova, yaitu analisis varian satu faktor (*one-way anova*)

dan analisis varian dua faktor (*two ways anova*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *one-way Anova* (Statiskian, 2012).

Dalam menggunakan Anova untuk menganalisis data penelitian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syaratnya antara lain:

- Independensi observasi, setiap observasi dalam analisis anova harus bersifat independen.
- Normalitas, *Residual* atau *error* harus mengikuti distribusi normal.
- Homogenitas varians, varians antara kelompok yang dibandingkan harus homogen.

Asumsi yang pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa (> 2) kelompok yang independen, yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga dapat dicek melalui uji normalitas dan uji homogenitas. Jika asumsi ini tidak terpenuhi dapat dilakukan transformasi terhadap data. Apabila proses transformasi tidak juga dapat memenuhi asumsi ini maka uji Anova tidak valid untuk dilakukan, sehingga harus menggunakan uji non-parametrik misalnya Kruskal Wallis.

Prinsip Uji Anova adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi yaitu variasi di dalam kelompok (*within*) dan variasi antar kelompok (*between*). Bila variasi *within* dan *between* sama (nilai perbandingan kedua varian mendekati angka satu), maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan, dengan kata lain nilai mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda, dengan kata lain nilai mean yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan.

3.2. Sumber data

Data statistik keuangan pemerintah desa diperoleh dari Survey Statistik Keuangan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan dalam penelitian adalah Survey Statistik Keuangan Pemerintah Desa tahun 2015 dan tahun 2017. Dengan prosedur pengambilan sampel di tingkat kabupaten/kota, dan dengan mengeluarkan beberapa kabupaten/kota hasil pemekaran yang tidak terdapat di tahun 2014, maka diperoleh sampel kabupaten/kota sebanyak 389 kabupaten/kota.

3.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

- Berdasarkan uji Anova satu arah apakah ada perbedaan rasio-rasio keuangan pemerintah desa sebelum adanya dana desa yaitu tahun 2014 dan setelah adanya dana desa yaitu tahun 2017.
- Membandingkan hasil uji Anova satu arah dengan perhitungan rumus atas rasio-rasio keuangan sebelum adanya dana desa tahun 2014 dan setelah adanya dana desa pada tahun 2017.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam melakukan uji beda dengan menggunakan anova satu arah, penulis melakukan prosedur analisis sebagai berikut :

a. Melakukan uji asumsi untuk mengetahui normalitas dan homogenitas data.

- Uji normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus di uji kenormalan distribusinya. Data yang baik itu adalah data yang berdistribusi normal. Tahapan uji normalitas adalah sebagai berikut :

- Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk data yang berjumlah lebih dari 50. Dasar pengambilan keputusan :

- Jika nilai Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal
- Jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

Jika hasil uji menunjukkan data tidak berdistribusi normal, maka alternatif analisis data sebagai pengganti *uji one way Anova* adalah dengan menggunakan statistik *non parametric*, yakni dengan uji Kruskal Wallis.

- Uji Kruskal-Wallis

Kruskal wallis merupakan bagian dari statistik non parametrik untuk data lebih dari dua sample yang tidak saling berhubungan atau tidak berpasangan. Uji ini umumnya digunakan oleh peneliti sebagai alternatif dari uji Anova ketika salah satu atau seluruh sebaran data tidak berdistribusi normal. Pengambilan keputusan dilakukan dengan

membandingkan nilai signifikansi (Asymp.Sig) dengan probabilitas 0,05.

Adapun ketentuan pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- Jika nilai Asymp.Sig > 0,05, maka TIDAK ADA perbedaan atau HO diterima.
- Jika nilai Asymp.Sig < 0,05, maka ADA perbedaan atau HO ditolak.

- Uji homogenitas

Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dari *Levene Statistic*. Dasar pengambilan keputusannya adalah ‘:

- Jika nilai signifikansi > 0,05, maka data homogen.
- Jika nilai signifikansi < 0,05, maka data tidak homogen.

- Uji Mann Whitney

Uji Mann Whitney dilakukan apabila berdasarkan *Levene statistic* nilai signifikansi menunjukkan hasil data tidak homogen dan membutuhkan pendekatan non parametrik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Mann Whitney yaitu dengan melihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed), yaitu

- Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, maka ADA perbedaan antara dua kelompok.
- Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, maka TIDAK terdapat perbedaan antara dua kelompok.

b. Melakukan analisis rasio kinerja keuangan

Berdasarkan pada prosedur uji sebagaimana tersebut diatas, maka hasil pengujian terhadap variabel rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan, rasio efisiensi, rasio belanja operasional, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan dalam periode sebelum adanya dana desa, yaitu tahun 2014, dan setelah adanya dana desa, yaitu tahun 2017, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Hasil Uji Asumsi Anova Satu Jalur

No	Rasio	Uji normalitas		Uji homogen		Keterangan
1	Kemandirian	Uji Kruskal Wallis	Asymp. Sig: 0,000	Uji Mann Whitney	Asymp. Sig: 0,000	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017
2	Efektivitas Pendapatan	Uji Kruskal Wallis	Asymp. Sig: 0,000	Uji Mann Whitney	Asymp. Sig: 0,000	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017
3	Efisiensi	Uji Kruskal Wallis	Asymp. Sig: 0,082	Levene stat	Sig: 0,917	Tidak terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017
4	Belanja Operasional	Uji K-S	Sig: 0,200	Uji Mann Whitney	Asymp. Sig: 0,000	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017
5	Belanja Modal	Uji Kruskal Wallis	Asymp. Sig: 0,000	Uji Mann Whitney	Asymp. Sig: 0,000	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017
6	Pertumbuhan Pendapatan	Uji Kruskal Wallis	Asymp. Sig: 0,000	Uji Mann Whitney	Asymp. Sig: 0,000	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017

Sumber : BPS, diolah

Hasil uji asumsi atas variabel yang diobservasi menunjukkan hasil yang sama sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Hasil Uji Asumsi Anova Satu Jalur dengan Variabel Observasi

Tahun	Rasio Kemandirian	Rasio Efektivitas Pendapatan	Rasio Efisiensi	Rasio Bel. Operasional	Rasio Bel. Modal	Rasio Pertumbuhan Pendapatan
2014	0.10	1.26	0.96	0.57	0.31	0.34
2017	0.02	1.03	0.96	0.29	0.56	0.25
Signifikansi	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017	Tidak terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017	Terdapat perbedaan tahun 2014 dan 2017

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan hasil diatas dan berdasarkan perhitungan atas semua rasio yang diobservasi, maka dapat dilihat adanya perbedaan sebagai berikut:

Gambar 2. Perkembangan Rasio yang Diobservasi, Tahun 2014 dan Tahun 2017

Sumber : BPS, diolah

Transfer dana desa belum mampu meningkatkan kemandirian desa. Hasil perhitungan atas rasio kemandirian desa menunjukkan adanya penurunan rasio kemandirian. Jumlah desa yang memiliki rasio kemandirian rendah sekali meningkat pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2014. Dari rasio efektivitas pendapatan, pemerintah desa belum mampu merealisasikan pendapatan yang dianggarkan. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak di daerah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah, yang harus dibagihasilkan kepada pemerintah desa. Meskipun penerapan dana desa yang bersumber dari APBN tidak mengubah rasio efisiensi belanja pemerintahan desa, namun berbagai peraturan dan pedoman pengelolaan keuangan desa dan dana desa telah mampu

memperbaiki kinerja rasio belanja operasional, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan pada pemerintah desa. Beberapa aturan tersebut mengatur tentang komposisi belanja aparatur desa dan belanja pembangunan desa, ketentuan mengenai tunjangan aparatur desa, dan petunjuk teknis penggunaan dana desa.

5. Penutup

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan atas rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan, rasio belanja operasional, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan pada struktur keuangan pemerintahan desa tahun 2014 dan tahun 2017.
- b. Tidak terdapat perbedaan atas rasio efisiensi belanja pemerintahan desa tahun 2014 dan tahun 2017.
- c. Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang instruktif (kebijakan afirmasi) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui kebijakan yang memberi penekanan pada berbagai program pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pemerintah perlu mendorong efektivitas pengelolaan BUMDes melalui asistensi atau pendampingan agar BUMDes yang sudah dibentuk mampu memberi kontribusi bagi pendapatan desa.
- d. Pemerintah perlu mendorong efisiensi belanja operasional (termasuk belanja untuk aparatur desa) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling banyak 30 persen dari belanja desa untuk memastikan bahwa fokus pembangunan desa dalam menciptakan kemandirian ekonomi dapat terwujud seiring dengan peningkatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2014*. BPS.
- _____. (2015). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2015*. BPS.
- _____. (2018). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2018*. BPS.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2015). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Apa Kabar Dana Desa*. Diperoleh 13 November 2019 dari <https://pajak.go.id/artikel/apa-kabar-dana-desa>.

- Globalstats Academic. *Uji Anova Satu Arah*. Diperoleh 9 Oktober 2019 dari <https://www.globalstatistik.com/uji-anova-satu-dua-arah/>
- Kementerian Dalam Negeri. *Data Jumlah DOB beserta Kecamatan, Kelurahan dan Desa*. Diperoleh 13 November 2019 dari <https://otda.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Data-Jumlah-DOB-beserta-Kecamatan-Kelurahan-dan-Desa.pdf>.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 2019 dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 2019 dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?attachment_id=5564.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*.
- Konsistensi: Panduan Olah Data dengan SPSS. *Uji Normalitas Rumus Kolmogorov-Smirnov*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 219 dari <https://www.konsistensi.com/2013/07/uji-normalitas-rumus-kolmogorov-smirnov.html>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. *Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Risky Pramita, Puput. (2015). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Yogyakarta. Universitas Negeri.
- SPSS Indonesia. *Cara melakukan uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 2019b dari <https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-normalitas-kolmogorov-smirnov-spss.html>.
- _____. *Cara Uji Kruskal Wallis Statistik Non Parametrik dengan SPSS*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 2019 dari <https://www.spssindonesia.com/2018/11/uji-kruskal-wallis-dengan-spss.html>.
- _____. *Cara Melakukan Uji Homogenitas dengan SPSS beserta Contoh Lengkap*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 2019 dari <https://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-homogenitas-dengan-spss.html>.
- Statistikian. (2012). *Uji ANOVA – One Way Anova dalam SPSS*. Diperoleh 9 Oktober 2019 dari <https://www.statistikian.com/2012/11/one-way-anova-dalam-spss.html>.
- _____. (2012). *Tutorial Uji Mann Whitney U Test dengan SPSS*. Diperoleh tanggal 9 Oktober 2019 dari <https://www.statistikian.com/2014/04/mann-whitney-u-test-dengan-spss.html>.

ANALISIS EFEKTIVITAS JALUR SUKU BUNGA DALAM MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA (PERIODE 2009-2018)

The Analysis of The Effectiveness Interest Rate Channel in a Transmission Mechanism Monetary Policy in Indonesia (Period 2009-2018)

Rastri Paramita

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI
Email: rastri.paramita@dpr.go.id

Abstract

This research was conducted to determine the effectiveness of the interest rate channel in the mechanism of monetary policy in Indonesia. The variables used are policy rates (r_{SBK}) as monetary policy tool, deposit rates ($r_{Deposito}$), and credit rates (r_{Kredit}) as transmission to the real sector and CPI as a proxy of inflation which is the target of monetary policy. The VECM method is used since the variables are cointegrated but are stationary in the first difference. The results impulse response operational targets respond weakly to changes in monetary policy variables because they require a deadline of 5 periods to be able to influence the CPI. While the result of variance decomposition showed the low strength of the $r_{Deposito}$ variable which only reached 1.84 percent, r_{Credit} was only 0,54 in response to the shock of the r_{SBL} . Thus, the effect on CPI is only 1,03 percent. It can be concluded based on this research, the effectiveness of monetary policy which only relies on the policy interest rate channel is less effective in the transmission mechanism of monetary policy in Indonesia for the periode 2009-2018 to impact the inflation.

Keywords: *Effectiveness, monetary policy, CPI*

1. Pendahuluan

Kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral dalam memengaruhi perkembangan variabel moneter (uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar) dalam mencapai tujuan ekonomi tertentu diantaranya pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. (Litteboy and Taylor, 2006 dan Mishkin, 2004). Agar tujuan yang ditetapkan bank sentral tercapai, dibutuhkan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang tepat.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada hakekatnya mendeskripsikan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat

mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Taylor (1995: 8) mendefinisikan mekanisme transmisi kebijakan moneter sebagai “*the process through which monetary policy decisions are transmitted into changes in real GDP and inflation*”.

Beberapa penelitian mengenai transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga dengan berbagai hasil yang berbeda diantaranya penelitian yang dilakukan Rania Al-Mashat dan Andreas Billmeier mengenai mekanisme transmisi moneter di Mesir (2008) periode 1996-2005, menghasilkan saluran suku bunga berada dalam tanda yang sesuai namun tidak signifikan dan amplitudo hasilnya tidak memuaskan memengaruhi inflasi dibandingkan pengaruh dari jalur lain seperti nilai tukar, kredit, dan surat berharga. Rayati. T dan Wahyu A.P telah melakukan penelitian dengan membandingkan peranan jalur suku bunga dan nilai tukar pada mekanisme kebijakan moneter di ASEAN: studi komparatif Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Hasilnya, jalur suku bunga dan jalur nilai tukar di Indonesia, Malaysia, dan Singapura membutuhkan *time lag* respon variabel ketika *shock* instrumen kebijakan moneter diberikan hingga mencapai tujuan akhir berupa GDP (pertumbuhan ekonomi) selama 5 tahun. Sedangkan untuk kecepatan respon variabel ketika terjadi *shock* hingga mencapai target akhir, baik di Indonesia maupun Malaysia menunjukkan sama-sama efektif menggunakan jalur suku bunga, dan nilai tukar dalam mencapai target akhir yaitu pertumbuhan ekonomi. Untuk Singapura, kecepatan respon variabel ketika terjadi *shock* hingga mencapai target akhir lebih cepat dari Indonesia dan Malaysia.

Berkembangnya peran pasar dalam perekonomian cenderung menyebabkan semakin pentingnya transmisi kebijakan moneter melalui “harga” uang atau suku bunga. Perkembangan pembiayaan ekonomi yang semakin meluas yang tidak saja melibatkan bank dan lembaga keuangan lainnya tetapi juga melibatkan cara pembiayaan yang lebih luas dari instrumen konvensional (kredit), menekankan pentingnya mekanisme transmisi pengendalian moneter melalui suku bunga (Hartadi.A.S dan Perry Warjiyo: 1998:13). Menurut Bond (1994), suku bunga merupakan “harga” uang yang terpenting dalam perekonomian sehingga merupakan jalur transmisi kebijakan moneter yang

diyakini lebih mendekati kenyataan karena suku bunga menentukan keputusan mengenai alternatif investasi di masyarakat⁵.

Permasalahan terkait mekanisme transmisi kebijakan moneter terutama yang menggunakan jalur suku bunga terhadap sektor riil atau pengendalian inflasi masih menarik untuk dilakukan kajian. *Time lag* yang dibutuhkan dari mulai kebijakan berlaku hingga memengaruhi inflasi serta kekuatan variabel-variabel dari suatu jalur merespon *shock* bunga kebijakan masih menjadi permasalahan yang dihadapi suatu negara dalam menjalankan kebijakan moneter melalui jalur suku bunga. Berdasarkan penelitian mekanisme jalur suku bunga yang ada umumnya menggunakan jalur suku bunga kebijakan dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (rPUAB) sebagai alat transmisi suku bunga kebijakan ke inflasi. Pada penelitian ini mencoba meneliti pengaruh suku bunga kebijakan kepada suku bunga deposito dan suku bunga kredit sebagai transmisi ke inflasi. Tujuannya untuk melihat efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga dalam memengaruhi inflasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, berikut ini pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam studi ini:

1. Bagaimana efektivitas jalur suku bunga terhadap inflasi periode 2009-2018 dengan mengukur kecepatan atau *time lag* yang dibutuhkan dalam merespon *shock* suku bunga kebijakan ?
2. Bagaimana efektivitas jalur suku bunga terhadap inflasi periode 2009-2018 dengan mengukur berapa besar kekuatan variabel-variabel pada suatu jalur dalam merespon adanya *shock* suku bunga kebijakan ?

Berikut ini yang merupakan tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui efektivitas jalur suku bunga terhadap inflasi periode 2009-2018 dengan mengukur kecepatan atau *time lag* yang dibutuhkan dalam merespon *shock* suku bunga kebijakan.
2. Mengetahui efektivitas jalur suku bunga terhadap inflasi periode 2009-2018 dengan mengukur berapa besar kekuatan variabel-variabel pada suatu jalur dalam merespon adanya *shock* suku bunga kebijakan.

⁵ Dalam artikel Hartadi A. Sarwono dan Perry Warjiyo. Juli 1998. *Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel: Suatu Pemikiran untuk Penerapannya di Indonesia*. Bank Indonesia. Jakarta. Hlm 10.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Definisi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral berupa pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian seperti stabilitas ekonomi makro yang tercermin dari stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/kesempatan kerja yang tersedia (Perry W & Solikin: 2). Kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang pelaksanaannya mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Strategi kebijakan moneter yang diambil oleh suatu negara didasari oleh tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang dipilih. Terdapat beberapa strategi kebijakan moneter, antara lain: (i) penargetan nilai tukar (exchange rate targeting); (ii) penargetan besaran moneter (monetary targeting); (iii) penargetan inflasi (inflation targeting); dan (iv) strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas (implicit but no explicit anchor) (Perry W & Solikin:14-15).

Terdapat perbedaan pemikiran antara monetarist dan keynesian terkait hubungan uang dengan kegiatan ekonomi. Aliran Monetarist berpendapat bahwa permintaan agregat hanya dipengaruhi oleh perkembangan uang beredar terhadap permintaan agregat adalah stabil dengan asumsi bahwa mekanisme pasar di dalam perekonomian dapat berjalan secara otomatis sehingga harga-harga dapat segera menyesuaikan apabila terjadi perbedaan antara permintaan dan penawaran di pasar. Sedangkan Kelompok Keynesian memandang permasalahan dalam suatu perekonomian pada dasarnya sangat kompleks sehingga tidak hanya uang yang berperan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, namun juga terdapat variabel-variabel lain dengan asumsi bahwa terjadi sejumlah kekakuan dalam bekerjanya mekanisme pasar di dalam perekonomian seperti pengaturan harga sejumlah komoditas oleh pemerintah. Sehingga jika terjadi *shock*, dalam perekonomian, contohnya adanya kebijakan moneter yang aktif melakukan pelonggaran atau pengetatan, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi riil akan terpengaruh, walaupun pada akhirnya dalam jangka menengah-panjang perkembangan harga juga akan terpengaruh. (Perry W & Solikin: 26).

2.2. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Mekanisme transmisi kebijakan moneter diawali dari tindakan bank sentral menggunakan instrumen moneter dalam menjalankan kebijakan moneternya melalui berbagai saluran transmisi kebijakan moneter. Saluran transmisi kebijakan moneter diantaranya saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Dalam bidang keuangan, kebijakan moneter memengaruhi perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham di samping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi, saham maupun sekuritas lainnya. Sedangkan pada sektor ekonomi riil, kebijakan moneter memengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor, hingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Menurut Bernanke & Blinder (1992: 901-902) dan Taylor (1995:11-26), mekanisme transmisi kebijakan moneter selalu dikaitkan dengan dua pertanyaan utama, yaitu pertama, apakah kebijakan moneter dapat memengaruhi ekonomi riil disamping pengaruhnya terhadap harga. Dan kedua, apabila jawabannya ya, melalui mekanisme transmisi apa pengaruh kebijakan moneter terhadap ekonomi riil tersebut terjadi.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam pelaksanaannya merupakan proses yang kompleks, oleh karena itu dalam teori ekonomi moneter sering disebut sebagai “*black box*” (Mishkin, 1995: 4) (gambar 1). Kompleksitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi terutama oleh ketiga faktor berikut, yakni (i) perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan; (ii) lamanya tenggat waktu (*lag*) dari kebijakan moneter mulai diberlakukan hingga mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan; dan (iii) terjadi perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan.

Gambar 1. Mekanisme Transmisi Moneter Sebagai “Black Box”



Sumber: Buku Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia, diolah

Penjelasan lebih lanjut dari ketiga faktor tersebut, sebagai berikut: faktor *pertama*, perubahan perilaku bank sentral, perbankan, sektor keuangan dan

pelaku ekonomi akan memengaruhi interaksi dengan berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan yang akhirnya akan membawa perubahan pada mekanisme transmisi kebijakan moneter juga. Menurut Blinder (1998), dalam banyak hal, karena terkait perubahan perilaku dan ekspektasi, mekanisme transmisi kebijakan moneter dimaksud diliputi oleh ketidakpastian dan relatif sulit diprediksi.

Faktor *kedua*, mengenai tenggat waktu. Friedman dan Schwartz (1963) mengungkapkan transmisi kebijakan moneter ke pertumbuhan ekonomi dan inflasi telah lama diakui berlangsung dengan tenggat waktu yang lama dan bervariasi. Hal ini disebabkan transmisi moneter banyak berkaitan dengan pola hubungan antara berbagai variabel ekonomi negara bersangkutan. Hubungan antara uang beredar dengan aktivitas ekonomi riil tergantung pada perkembangan sektor keuangan. Semakin maju sektor keuangan, maka keterkaitan uang beredar dengan sektor riil akan merenggang, begitu pula sebaliknya. Kondisi tersebut akan memengaruhi pada lamanya tengat waktu mekanisme transmisi kebijakan moneter.

Faktor *ketiga*, terkait perubahan pada saluran transmisi moneter dengan perkembangan ekonomi dan keuangan. Kompleksitas mekanisme transmisi berkaitan dengan perubahan pada peran dan cara bekerjanya saluran-saluran transmisi moneter dalam suatu perekonomian. Peranan saluran uang masih dominan dengan pola hubungan antara berbagai aktivitas ekonomi relatif stabil terjadi jika perekonomian berbentuk tradisional dengan peran perbankan yang dominan dengan produk yang relatif stabil. Apabila perbankan dan pasar keuangan semakin berkembang, maka ragam produk keuangan dan jenis transaksi keuangan juga akan semakin bervariasi. Pada perekonomian terbuka, perkembangan ekonomi dan keuangan di negara lain akan memengaruhi perkembangan ekonomi dan keuangan di negara lain. Transmisi pengaruh tersebut dapat melalui nilai tukar, suku bunga, kredit, obligasi, saham, dan ekspektasi yang menjadi semakin penting dalam transmisi kebijakan moneter.

2.3. Saluran Transmisi Kebijakan Moneter

Terdapat lima saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam teori moneter⁶ (Mishkin, 1995, 1996; Bank for International Settlement, 1995; Kakes, 2000; De Bondt, 2000; Bofinger, 2001:45), yaitu saluran moneter langsung (*direct monetary channel*), saluran suku bunga (*interest rate channel*), saluran harga aset (*asset price channel*), saluran kredit (*credit channel*), dan saluran ekspektasi (*expectation channel*). Dalam penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada saluran suku bunga sebagai transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.

Saluran uang merupakan salah satu transmisi kebijakan moneter yang lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil. Bentuk transmisinya diawali dengan bank sentral menjalankan kebijakan moneter berupa menaikkan atau menurunkan suku bunga jangka pendek (*7 days Reserve REPO* dan *Pasar Uang Antar Bank/PUAB*) di pasar uang Rupiah. Perubahan ini selanjutnya akan memengaruhi suku bunga deposito yang diberikan perbankan pada simpanan masyarakat dan suku bunga kredit yang diberikan bank-bank kepada para debiturnya. Proses transmisi ini membutuhkan tenggat waktu, terutama kondisi internal perbankan dalam manajemen aset dan kewajibannya (*ALMA – Asset and Liability Management*).

Ditahap selanjutnya, transmisi suku bunga dari sektor keuangan ke sektor riil akan tergantung pada reaksi dari permintaan konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Suku bunga mampu memengaruhi permintaan konsumsi terutama karena bunga deposito merupakan komponen dari pendapatan masyarakat (*income effect*) dan bunga kredit sebagai pembiayaan konsumsi (*substitution effect*). Sedangkan permintaan investasi dapat dipengaruhi suku bunga karena suku bunga kredit merupakan komponen biaya modal (*cost of capital*), selain *yield* obligasi dan dividen saham, dalam pembiayaan investasi. Reaksi investasi dan konsumsi terhadap perubahan suku bunga tersebut akan berdampak pada besarnya permintaan yang akhirnya dapat menentukan tingkat inflasi serta *output* riil dalam perekonomian.

⁶ Dalam Warijo, Perry. 2004. *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia*. Buku Seri Kebansentralan No. 11. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK). Bank Indonesia. Hlm 14.

2.4. Indikator Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Efektivitas kebijakan moneter tergantung pada kecepatan atau tenggat waktu dan kekuatan variabel-variabel pada jalur transmisi moneter dalam merespon *shock* suku bunga hingga terwujudnya sasaran akhir (inflasi). *Order of magnitude* merupakan alat ukur indikator kekuatan variabel dalam merespon *shock* suatu variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Apabila semakin kuat suatu variabel merespon *shock* instrumen moneter atau perubahan variabel lainnya, maka semakin lebar (jauh dari titik keseimbangan) *order of magnitude* variabel tersebut (Natsir, 2011).

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Instrumen kebijakan moneter yang digunakan dalam penelitian ini adalah jalur suku bunga. Jalur suku bunga diproyeksikan dengan tingkat suku bunga kebijakan. Pemilihan jalur ini karena suku bunga merupakan salah satu instrumen moneter yang kerap digunakan oleh Bank Indonesia dalam mencapai target kebijakan moneter. Sedangkan transmisi di sektor riil menggunakan tingkat suku bunga kredit dan tingkat suku bunga deposito jangka waktu 3 bulan pada bank umum. Sasaran moneter yang akan dicapai berupa inflasi diproyeksikan dengan indeks harga konsumen (IHK). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder bulanan (*time series*) periode 2009-2018. Definisi variabel operasional tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel (satuan)	Definisi Operasional Variabel Penelitian	Sumber
<i>Suku Bunga Kebijakan (rSBK)</i>	Tingkat suku bunga kebijakan yang ditentukan oleh Bank Indonesia yang diukur dalam persen.	SEKI, Bank Indonesia
<i>Suku Bunga kredit (rKredit)</i>	Tingkat suku bunga rata-rata dari suku bunga konsumsi, suku bunga modal kerja, dan suku bunga pinjaman investasi pada bank umum yang diukur dalam persen.	SEKI, Bank Indonesia
<i>Suku Bunga Deposito (rDeposito)</i>	Tingkat suku bunga deposito jangka waktu tiga bulan yang berlaku	SEKI, Bank Indonesia

	pada bank umum. Suku bunga ini diukur dalam persen.	
<i>Indeks Harga Konsumen (IHK)</i>	Indeks harga konsumen menurut kelompok pengeluaran.	BPS

Sumber: berbagai sumber, diolah penulis

Teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah *vector error correcting model* (VECM). Penggunaan VECM didasari dari data yang stationer pada 1st *difference* semua terkointegrasi. Untuk mengetahui efektivitas jalur suku bunga terhadap sektor riil, terdapat dua indikator yang akan diukur, yaitu: (1) mengetahui berapa kecepatan atau tenggat waktu (*time lag*) yang dibutuhkan dari instrumen suku bunga berlaku hingga mencapai target moneter yang ditetapkan. (2) mengetahui kekuatan variabel-variabel pada masing-masing jalur transmisi moneter dalam merespon *shock* suku bunga kebijakan hingga tercapainya sasaran moneter yang ditargetkan. Untuk mengukur *shock* kekuatan variabel-variabel tersebut digunakan uji *Impulse Respons Function* (IRF) dan uji *variance decomposition* (VD).

3.2. Model Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu suku bunga kebijakan. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah suku bunga pinjaman modal kerja, suku bunga pinjaman investasi, suku bunga pinjaman konsumsi serta nilai indeks harga konsumen (IHK) menurut kelompok pengeluaran. Model penelitian ini sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 rSBK_t &= C_1 + a_{1i} \sum rSBK_{t-k} + a_{1i} \sum rKredit_{t-k} + a_{1i} \sum rDeposito_{t-k} + a_{1i} \sum IHK_{t-k} + \varepsilon_i \\
 rKredit_t &= C_2 + a_{2i} \sum rSBK_{t-k} + a_{2i} \sum rKredit_{t-k} + a_{2i} \sum rDeposito_{t-k} + a_{2i} \sum IHK_{t-k} + \varepsilon_i \\
 rDeposito_t &= C_3 + a_{3i} \sum rSBK_{t-k} + a_{3i} \sum rKredit_{t-k} + a_{3i} \sum rDeposito_{t-k} + a_{3i} \sum IHK_{t-k} + \varepsilon_i \\
 rIHK_t &= C_4 + a_{4i} \sum rSBK_{t-k} + a_{4i} \sum rKredit_{t-k} + a_{4i} \sum rDeposito_{t-k} + a_{4i} \sum IHK_{t-k} + \varepsilon_i
 \end{aligned}$$

3.3. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
M.Natsir	Peranan Jalur Suku Bunga Dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter (MTKM) di Indonesia Periode 1990:2-2007:1	Menggunakan alat analisis pengujian model VAR.	Hasil disertasinya adalah mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga efektif mewujudkan sasaran akhir kebijakan moneter di Indonesia periode 1990:2-2007:1. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga membutuhkan time lag sekitar 10 triwulan hingga terwujudnya sasaran akhir kebijakan moneter. Respon variabel-variabel pada jalur ini terhadap shock rSBI relatif kuat dan variabel utama jalur ini yaitu rPUAB mampu menjelaskan variasi sasaran akhir kebijakan moneter secara efektif sebagai sasaran operasional kebijakan moneter Indonesia.
Linda Seprillina dan Munawar Ismail	Efektivitas Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Periode 1999:1-2012:2)	Menggunakan alat analisis pengujian model VAR.	Penelitian ini menghasilkan analisis bahwa kebijakan moneter dengan menggunakan instrumen jumlah uang beredar (JUB) dan suku bunga SBI mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, instrumen JUB dan suku bunga BI dalam jangka pendek dan jangka panjang

			<p>sama-sama memengaruhi pertumbuhan ekonomi namun memiliki pengaruh yang berbeda.</p> <p>Dari kedua instrumen moneter yang digunakan (JUB dan suku bunga), jalur suku bunga SBI lebih efektif memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan <i>lag</i> 3 kuartal. Sedangkan JUB membutuhkan waktu hingga 4 kuartal.</p> <p>Perbedaan efektivitas instrumen JUB dan suku bunga SBI dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh kemampuan respon dari sektor perbankan dan sektor riil yang menjadi jembatan untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi lebih cenderung lebih cepat merespon kebijakan suku bunga BSI dari pada melihat kondisi dari JUBnya.</p>
Regina Mayo, Ghozali Maskie, dan Devanto Shasta Pratomo	Efektivitas Jalur Kredit Dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia	Menggunakan alat analisis pengujian model VECM.	<p>Jalur kredit pada periode Januari 2002-Desember 2012 efektif berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Kredit investasi sektoral (dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran) yang paling efektif dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter untuk memengaruhi inflasi. Sedangkan kredit modal kerja dari sektor pertambangan dan</p>

			penggalan yang paling efektif menjelaskan inflasi.
--	--	--	--

Sumber: Berbagai sumber, diolah

4. Pembahasan

4.1. Efektivitas Jalur Suku Bunga Terhadap IHK Periode 2009-2018 dengan Mengukur Kecepatan atau *Time Lag* yang Dibutuhkan Dalam Merespon *Shock* Suku Bunga Kebijakan

Sebelum melakukan pengukuran terhadap efektivitas jalur suku bunga kebijakan terhadap IHK, Uji stasioneritas dilakukan untuk menganalisis dan membuktikan apakah masing-masing variabel memiliki pola yang stasioner atau tidak. Pengujian stasioneritas dilakukan dengan membandingkan antara Augmented Dickey Fuller (ADF) *statistic* dengan *critical values* Mac Kinnon pada derajat 1%, 5%, dan 10%. Dalam uji Augmented Dicky-Fuller (ADF), H_0 akan ditolak apabila nilai ADF test lebih besar daripada *critical value* pada alfa (α) tertentu dan H_0 akan tidak ditolak jika nilai ADF test lebih kecil daripada *critical value* pada alfa (α) tertentu.

Tabel 3. Hasil Uji ADF

Variable	ADF Statistic (level)	ADF Statistic (first difference)
rSBK	-1.983467	-6.749239**
rKredit	-1.666664	-2.697883**
rDeposito	-2.878884	-3.747682**
IHK	-2.239672	-10.74841**

Sumber: Eviews 10, diolah

Keterangan:

Critical Value: 1% = -4.103198

5% = -3.479367

10% = -3.167404

*Signifikan pada *level*

** Signifikan pada *first difference*

Hasil uji stasioner menunjukkan masing-masing variabel telah stasioner pada *first difference*. Artinya data tersebut valid digunakan untuk pengujian kointegrasi. Sebelum melakukan Johansen *Cointegration Test*, perlu diketahui panjang *lag* yang digunakan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan pengaruh dari masing-masing variabel terhadap variabel masa lalunya. Panjang *lag* optimal dapat ditunjukkan dalam tabel 4.

Tabel 4. Pengujian panjang lag

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-100.2330	NA	7.69e-05	1.878073	1.975713*	1.917682*
1	-78.65975	41.20302	6.95e-05	1.777653	2.265857	1.975703
2	-56.72430	40.31379	6.26e-05	1.670708	2.549475	2.027198
3	-49.60384	12.57306	7.36e-05	1.830700	3.100029	2.345629
4	-40.59026	15.26625	8.40e-05	1.956581	3.616474	2.629951
5	-22.07102	30.03120	8.09e-05	1.911190	3.961645	2.742999
6	19.03601	63.69737*	5.22e-05*	1.458811*	3.899829	2.449060
7	26.73097	11.36913	6.17e-05	1.608451	4.440032	2.757140
8	37.80543	15.56411	6.91e-05	1.697199	4.919343	3.004328

Sumber: Eviews 10 (diolah)

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa panjang *lag* optimal terletak pada *lag* 6. Pemilihan *lag* 6 sebagai *lag* optimal karena berdasarkan hasil eviews bahwa jumlah bintang terbanyak berada pada *lag* 6. Setelah panjang *lag* optimal sudah ditemukan, maka dapat dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu uji kointegrasi.

Manfaat dari pengujian kointegrasi adalah untuk mengetahui hubungan jangka panjang masing-masing variabel. Syarat dalam estimasi VECM, yaitu terdapat hubungan kointegrasi di dalamnya. Dalam penelitian ini, menggunakan *critical value* 0,05. Hasil uji kointegrasi ditunjukkan oleh tabel 5.

Tabel 5. Pengujian Kointegrasi Uji Johansen

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.275521	83.86571	47.85613	0.0000
At most 1 *	0.184853	47.76790	29.79707	0.0002
At most 2 *	0.149188	24.87651	15.49471	0.0015
At most 3 *	0.058751	6.781367	3.841466	0.0092

Sumber: Eviews 10 (diolah)

Pada tabel 5 menunjukkan terdapat semua *rank* variabel berhubungan kointegrasi. Hal tersebut terlihat pada *trace statistic* lebih besar dari *Critical Value* 0,05, yang artinya, H_0 diterima atau variable-variabel yang digunakan memiliki hubungan dalam jangka panjang (kointegrasi) satu dengan lainnya.

Uji berikutnya yaitu uji kausalitas *Granger* untuk mengetahui adanya ketergantungan antara satu variabel dengan satu atau beberapa variabel yang lain dalam persamaan yang digunakan.

Tabel 6. *Pengujian Granger*

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
RKREDIT_SA does not Granger Cause RSBK	114	0.78378	0.5846
RSBK does not Granger Cause RKREDIT_SA		1.98817	0.0742
RDEPOSITO_SA does not Granger Cause RSBK	114	0.45613	0.8391
RSBK does not Granger Cause RDEPOSITO_SA		2.79297	0.0148
IHK_A does not Granger Cause RSBK	114	0.04641	0.9996
RSBK does not Granger Cause IHK_A		1.90987	0.0864
RDEPOSITO_SA does not Granger Cause RKREDIT_SA	114	1.10329	0.3658
RKREDIT_SA does not Granger Cause RDEPOSITO_SA		1.51542	0.1807
IHK_A does not Granger Cause RKREDIT_SA	114	0.45629	0.8390
RKREDIT_SA does not Granger Cause IHK_A		1.97604	0.0760
IHK_A does not Granger Cause RDEPOSITO_SA	114	6.14600	2.E-05
RDEPOSITO_SA does not Granger Cause IHK_A		2.86412	0.0128

Sumber: Eviews 10 (diolah)

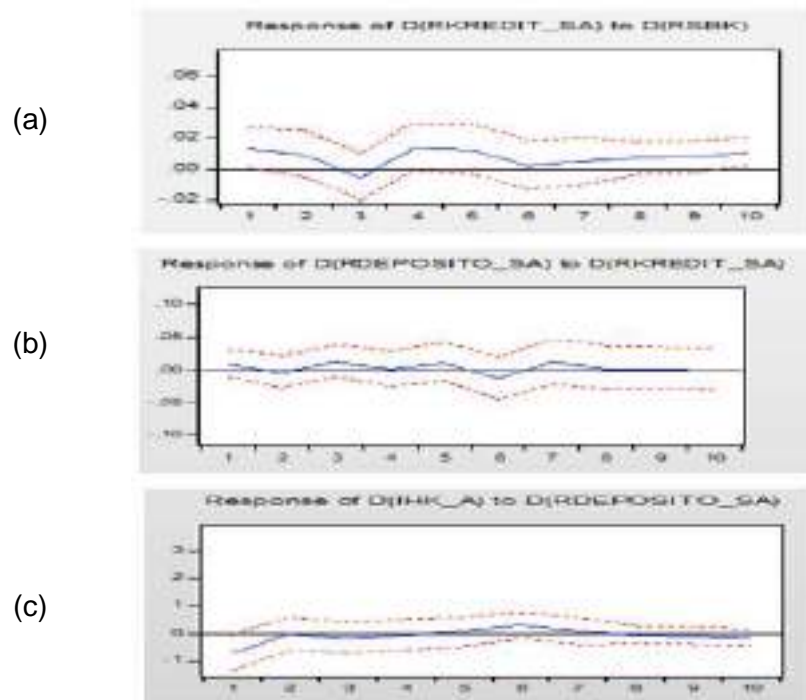
Berdasarkan hasil tabel 6, diketahui bahwa yang memiliki kausalitas adalah yang memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari pada $\alpha = 0,05$. Sehingga H_0 akan ditolak apabila suatu variabel akan memengaruhi variabel yang lain. Dari pengujian *granger*, hubungan timbal-balik atau kausalitas sebagai berikut:

1. Variabel rSbk secara statistik tidak signifikan memengaruhi rKredit begitu juga sebaliknya dengan dibuktikan nilai Prob masing-masing lebih besar dari 0,05 yaitu 0,5846 dan 0,0742. Sehingga disimpulkan tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel rSBK dan rKredit.
2. Variabel rDeposito secara statistik signifikan memengaruhi rSBK dengan nilai Prob 0,0148. Namun, rBK secara statistik tidak signifikan memengaruhi rDeposito. Sehingga disimpulkan terjadi kausalitas searah antara rDeposito dan rSBK.
3. Variabel IHK secara statistik tidak signifikan memengaruhi rSBK begitu juga sebaliknya dengan dibuktikan nilai Prob masing-masing lebih besar dari 0,05 yaitu 0,9996 dan 0,0864. Sehingga disimpulkan tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel IHK dan rSBK.
4. Variabel rDeposito secara statistik tidak signifikan memengaruhi rKredit begitu juga sebaliknya dengan dibuktikan nilai Prob masing-masing lebih besar dari 0,05 yaitu 0,3658 dan 0,1807. Sehingga disimpulkan tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel rDeposito dan rKredit.

5. Variabel IHK secara statistik tidak signifikan memengaruhi rKredit begitu juga sebaliknya dengan dibuktikan nilai Prob masing-masing lebih besar dari 0,05 yaitu 0,8390 dan 0,0760. Sehingga disimpulkan tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel IHK dan rKredit.
6. Variabel IHK secara statistik signifikan memengaruhi rDeposito dengan nilai Prob 0,0128. Namun, rDeposito secara statistik tidak signifikan memengaruhi IHK. Sehingga disimpulkan terjadi kausalitas searah antara IHK dan rDeposito.

Setelah melakukan tahapan VECM, berikut ini analisis efektivitas MTKM melalui jalur suku bunga yang didasari hasil uji IRF yang tertera pada gambar 2. Tahapan analisisnya sebagai berikut:

Gambar 2. Uji Impulse Respon Function



Sumber: *evIEWS 10, diolah*

- a. Pada gambar 2 (a), menganalisis hubungan antara instrumen kebijakan moneter (rSBK) dengan rKredit sebagai salah satu jalur transmisi ke sasaran moneter. Dengan adanya *shock* rSBK direspon menurun oleh rKredit hingga periode 3 kembali meningkat hingga periode 5. Kembali tertekan pada periode 6 kemudian meningkat menuju keseimbangan hingga periode 10. *Time lag* yang dibutuhkan rKredit dalam merespon *shock* rSBK selama 1 periode.

- b. Pada gambar 2 (b), menganalisis hubungan antara rKredit dengan rDeposit yang menunjukkan bahwa respon rDeposit terhadap shock rKredit mengalami penurunan dan mencapai titik terendah pada periode 2. Pada periode 3 hingga periode 8 mengalami fluktuasi hingga pada periode 9 menurun menuju konvergen. *Time lag* yang dibutuhkan rDeposito dalam merespon *shock* rKredit selama 3 periode.
- c. Pada gambar 2 (c) menunjukkan hubungan antara IHK dengan rDeposito. Pada periode pertama IHK merespon positif meningkat terhadap *shock* rDeposito hingga periode 2. Namun, kembali menurun di periode 3. Pada periode 4 mengalami peningkatan hingga periode 6. Pada periode 7 berangsur-angsur ke posisi konvergen. *Time lag* yang dibutuhkan IHK dalam merespon *shock* rDeposito selama 1 periode.

Gambar 3. Flowchart Time Lag Transmisi Moneter Jalur Suku Bunga



Sumber: *evIEWS 10*, diolah

Berdasarkan analisis tersebut, menunjukkan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga sejak terjadi perubahan kebijakan moneter melalui shock rSBK hingga terwujudnya sasaran akhir kebijakan moneter membutuhkan tenggat waktu atau dengan kecepatan 5 periode sebagai mana terlihat pada gambar 3.

4.2. Efektivitas Jalur Suku Bunga Terhadap Inflasi Periode 2009-2018 dengan Mengukur Berapa Besar Kekuatan Variabel-Variabel pada Suatu Jalur dalam Merespon Adanya *Shock* Suku Bunga Kebijakan

Untuk mengetahui kekuatan variabel-variabel dalam merespon *shock* suku bunga kebijakan hingga tercapainya sasaran moneter yang ditargetkan dilakukan uji *variance decomposition* sebagaimana ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji VD

Variance Decomposition of D(RSBK):					
Period	S.E.	D(RSBK)	D(RKREDI...	D(RDEPOS...	D(IHK_A)
1	0.191251	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000
2	0.209320	97.94604	0.254963	1.764753	0.034249
3	0.224723	98.15614	0.240725	1.540138	0.062993
4	0.234834	97.92846	0.325008	1.626471	0.120056
5	0.242413	97.63455	0.561912	1.567961	0.235577
6	0.252712	97.69887	0.517361	1.537809	0.245961
7	0.260379	97.44707	0.496759	1.821804	0.234365
8	0.273601	97.35744	0.602495	1.804441	0.235623
9	0.285031	96.47457	0.576100	1.859195	1.090139
10	0.293370	96.58727	0.544682	1.838709	1.029335

Sumber: Eviews 10, diolah

Berdasarkan hasil uji *variance decomposition*, variabel rSBK memiliki kontribusi terbesar 96,59 persen. Sedangkan pengaruh rSBK terhadap rKredit hanya sebesar 0,54 persen dan rDeposito sebesar 1,84 persen. Sehingga tidak mengherankan pengaruh dari kebijakan moneter melalui suku bunga hanya berpengaruh sebesar 1,03 persen terhadap IHK. Berdasarkan hasil uji VECM tersebut, maka efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga pada periode 2009-2018 bulanan menunjukkan hasil kurang efektif dalam memengaruhi inflasi karena memiliki lag yang lama dan *shock* dari suku bunga kebijakan cukup lemah pengaruhnya terhadap variabel suku bunga kredit dan suku bunga deposito yang menjadi transmisi inflasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori ekonomi moneter "*black box*" (Mishkin, 1995) yang membahas tentang tiga faktor yang memengaruhi kompleksitas transmisi kebijakan moneter. Berdasarkan faktor pertama terkait perubahan perilaku bank sentral, perbankan, sektor keuangan dan pelaku ekonomi akan memengaruhi interaksi dengan berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan. Hasil VD membuktikan bahwa tranmisi kebijakan moneter diliputi oeh ketidakpastian dan relatif sulit diprediksi. Kondisi ini sejalan dengan situasi perekonomian global yang *uncertainty* sehingga memengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Kondisi ini mendorong pelaku usaha berhati-hati dalam menjalankan usaha maupun investasi. Pelemahan permintaan global juga

memengaruhi lambatnya pertumbuhan industri manufaktur di tahun 2018 yang hanya mampu tumbuh sebesar 4,27 persen lebih rendah dari tahun 2017 yang mampu mencapai 4,29 persen. Padahal industri manufaktur memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB yang pada tahun 2018 mencapai 19,86 persen.

Penelitian ini juga sejalan dengan Friedman dan Schwartz (1963) mengungkapkan transmisi kebijakan moneter ke pertumbuhan ekonomi dan inflasi memiliki cenderung berlangsung dengan tenggat waktu yang lama dan bervariasi. Target inflasi dari pemerintah yang rendah juga kurang mampu mendorong sektor riil bergairah. Rendahnya akan permintaan kredit yang diakibatkan kondisi perekonomian yang melemah menyebabkan perbankan tetap menjaga tingkat suku bunga yang tinggi agar mendapatkan keuntungan yang lebih dari *spread* antara suku bunga simpanan dengan suku bunga kredit meskipun Bank Indonesia telah melakukan penurunan suku bunga *7 Day Repo*. Hal ini dilakukan sebagai langkah *prudential* perbankan dalam menghadapi kondisi perekonomian saat ini.

Berdasarkan teori Mishkin (1995), hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompleksitas mekanisme transmisi berkaitan dengan perubahan pada peran dan cara bekerjanya saluran-saluran transmisi moneter dalam suatu perekonomian. Berkembangnya perbankan dan pasar uang Indonesia saat ini berdampak pada beragamnya produk keuangan dan jenis transaksi keuangan. Begitu juga dengan moda pembiayaan dari pasar utang yang menjadi tren perusahaan-perusahaan domestik. Semakin mudahnya memperoleh pendanaan dari pasar uang mengurangi peran perbankan dalam penyedia sumber pendanaan yang konvensional.

Hasil penelitian ini sesuai dengan studi yang dilakukan Kusmiarso dkk (2002) bahwa transmisi saluran suku bunga pada periode setelah krisis tidak sensitif terhadap pertumbuhan investasi maupun pertumbuhan konsumsi. Suku bunga deposito lebih dipengaruhi suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan kondisi likuiditas bank dibandingkan suku bunga kebijakan. Sedangkan suku bunga kredit dipengaruhi oleh suku bunga deposito dan likuiditas perbankan. Sedangkan hasil penelitian Bank Indonesia tahun 2006 juga menghasilkan fakta bahwa rSBI ditransmisikan dengan baik melalui jalur suku bunga ke rPUAB dan rDeposito, Sedangkan *shock* rSBI ditransmisikan relatif lambat dan lemah ke rKredit.

5. Penutup

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur bunga belum efektif memengaruhi inflasi karena berdasarkan hasil *granger* tidak terjadi kausalitas antara rSBK dengan IHK. Tenggat waktu yang dibutuhkan mencapai 5 periode. Sedangkan *shock* dari suku bunga kebijakan cukup lemah pengaruhnya terhadap variabel suku bunga kredit dan suku bunga deposito yang menjadi transmisi inflasi yaitu di bawah 2 persen. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mishkin (1995) bahwa kompleksitas mekanisme transmisi berkaitan dengan perubahan pada peran dan cara bekerjanya saluran-saluran transmisi moneter dalam suatu perekonomian. Berkembangnya perbankan dan pasar uang Indonesia saat ini berdampak pada beragamnya produk keuangan dan jenis transaksi keuangan. Begitu juga dengan moda pembiayaan dari pasar utang yang menjadi tren perusahaan-perusahaan domestik. Semakin mudahnya memperoleh pendanaan dari pasar uang mengurangi peran perbankan dalam penyedia sumber pendanaan yang konvensional.

Saran terhadap penelitian selanjutnya agar menambahkan transmisi ke sektor riil tidak hanya melalui suku bunga deposito dan suku bunga kredit saja. Selain itu, sebaiknya juga dilakukan penambahan terhadap faktor yang lebih mencerminkan sektor riil sehingga mampu lebih detail mencermati variabel apa saja yang dominan memengaruhi transmisi kebijakan moneter di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Mashat, Rania dan Billmeier, Andreas. (2008). *The Monetary Transmission Mechanism in Egypt*. Working Paper 411. Economic Research Forum. Mesir.
- Bank for International Settlements. (1995). *Financial Structure and the Monetary Transmission Mechanism*. BIS Basle.
- Bernanke, B.S & Blinder, A.S. (1992.) *The Federal Funds Rate and the Channel Monetary Transmission*. The American Economic Review, 2(12).
- Blinder, Alan S. 1998. *Central Banking in Theory and Practice*. Cambridge MA: MIT Press.
- De Bondt, G.J. (2000). *Financial Structure and Monetary Transmission in Europe*. Edward Elgar Publ.
- Bofinger, Peter. (2001). *Monetary Policy: Goal, Institutions, Strategies and Instrument*. New York: Oxford University Press.

- Friedman, M. and D. Meiselman. (1963). *The Relative Stability of Monetary Velocity and the Investment Multiplier in the United States, 1897-1958 in Stabilization Policies*. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
- Gujarati, Damodar. 1997. *Ekonometrika Dasar*. Alih Bahasa Sumarno Zain. Jakarta. Erlangga.
- Kakes, Janes. (2000). *Monetary Transmission in Europe: The Role of Financial Markets and Credit*. Edward Elgar: Cheltenham.
- Kusmiarso, Bambang, Elizabeth Sukowati, Andry Prasmuko, Sudiro Pambudi, Dadal Angkoro, Iss Savitri Hafid (2002). *Interest Rate Channel of Monetary Transmission in Indonesia*. Dalam Perry Warjiyo dan Juda Agung (editor). *Transmission Mechanism of Monetary Policy in Indonesia*. Bank Indonesia: Jakarta, Juli 2002.
- Litteboy, Bruce, and Taylor, B John. (2006). *Macroeconomics*. 3RD Edition. Australia: John Wiley & Sons LTS.
- Mayo, Regina, Maskie, Ghozali, dan Pratomo, Devanto S. (2014). *Efektivitas Jalur Kredit Dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 18, No 1. Universitas Brawijaya.
- Mishkin, F. (1995). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 4th edition, New York: Harper Collins.
- Mishkin, F.S. (2004). *Can Inflation Targeting Work in Emerging Market Countries*. National Bureau of Economic Research. Cambridge.
- Mishkin, F.S. (2004). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. Seventh Edition. International Edition, New York: Pearson Addison Wesley Longman.
- Natsir, M. (2011). *Peranan Jalur Suku Bunga dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*. Tesis. Pascasarjana Universitas Halu Oleo Kendari.
- Natsir, M. (2008). *Studi Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia Melalui Jalur Suku Bunga, Jalur Nilai Tukar, Dan Jalur Ekspektasi Inflasi Periode 1990:2–2007:1*. Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sarwono, Hartadi.A. and Perry Warjiyo. (1998). *Mencari paradigma baru manajemen moneter dalam Sistem nilai tukar fleksibel: Suatu pemikiran untuk penerapannya di Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 1, No. 1. Bank Indonesia. Jakarta.
- Seprillina, Linda dan Ismail, Munawar. (2013). *Efektivitas Instrumen Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Periode 1999:1-2012-2)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.
- Taylor, J.B. (1995). *The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework*. Journal of Economic Perspective, 9(4).
- Togatorop, Rayati dan Pratomo, Wahyu Ario. (2014). *Analisis Perbandingan Peranan Jalur Suku Bunga Dan Jalur Nilai Tukar Pada Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di ASEAN: Studi Komparatif (Indonesia, Malaysia, Singapura)*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2, No 4. Universitas Sumatera Utara.

Warijo, Perry. (2004). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia*. Buku Seri Kebansentralan No. 11. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK). Bank Indonesia.
[bi.go.id /id/moneter/transmisi-kebijakan/Contents/Default.aspx](http://bi.go.id/id/moneter/transmisi-kebijakan/Contents/Default.aspx)
<https://www.wartaekonomi.co.id/read182729/pertumbuhan-kredit-vs-pertumbuhan-ekonomi-kausalitas.html>. Diunduh kembali tanggal 19-10-2019.

EVALUASI SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PADA PEMERINTAH PUSAT

Evaluation of National Planning and Budgeting Alignment on Housing and Settlement Program

Dwi Resti Pratiwi

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI
email: dwi.pratiwi@dpr.go.id

Abstract

Aligning national planning and budgeting are crucial to achieving national development's goals. One of Indonesia development goals as stated on Mid-Term National Development Planning (RPJMN) 2015-2019 was to reduce poverty at 7-8 percent by the end of 2019. This target however is hard to be reached. It is indicated that there was a problem on planning and budgeting system at program priority and activity level. One of program priority that was mandated to achieve poverty target is housing and settlement. The outcome of the program unfortunately were unreachable. They were to reduce the housing backlog by 5 million unit and universal access to water supply and sanitation by 2019. This paper aims to evaluate the national planning budgeting alignment on Housing and Settlement Program. It used descriptive analysis methode by comparing between planning document such as RPJMN, Government Strategic Plan (Renstra), Government Work Plan (RKP) and Budget States (APBN). This analysis resulted that there is inconsistency outcome indicators across planning document (i.e RPJMN and RKP). Beside that, the mismatch between planning and budget document is found in this housing and settlement program which cause many activities were not funded in APBN. So that, the next government should evaluate the implementation of planning and budgeting during 2015-2019 and improve the alignment between them to achieve naional development goals as stated in RPJMN 2020-2024.

Keywords: *Planning, budgeting, housing backlog, settlement*

1. Pendahuluan

Sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Pemerintah harus mampu mencapai tujuan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan dilakukan dalam proses manajemen pemerintah yang efektif dan

efisien. Tahapan dalam proses pemerintah antara lain adalah perencanaan dan penganggaran. Tahapan tersebut diatur terpisah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengaturan yang terpisah ini memunculkan masalah keterlempaskaitan antara perencanaan dan penganggaran. Hasil telaah kelembagaan pentingnya sinergisme perencanaan dan penganggaran mendapatkan bahwa secara kelembagaan institusi perencanaan dan penganggaran terpisah dan saling mengisolasi. Bila dibandingkan dengan kelembagaan yang menangani perencanaan dan penganggaran di banyak negara di dunia, kelembagaan perencanaan dan penganggaran menjadi satu kesatuan terintegrasi. Kelembagaan tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Presiden untuk melakukan kegiatan alokasi anggaran pemerintah ke prioritas yang disusun oleh Presiden.

Untuk pengalaman Indonesia, terlihat sekali bahwa perlu adanya integrasi dan sinergi perencanaan dan penganggaran. Ketidaksinkronan bukan hanya terjadi antara perencanaan dan penganggaran, namun dalam dokumen perencanaan itu sendiri juga ditemukan ketidaksinkronan capaian pembangunan untuk beberapa program prioritas nasional yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemertintah (RKP). Hal inilah yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah mengingat saat ini telah memasuki masa pemerintahan yang baru. Namun, diujung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 kurang menunjukkan hasil yang memuaskan. Terlihat dari salah satu sasaran utama (*impact*) yang hendak dicapai ialah tingkat kemiskinan diangka 7-8 persen pada tahun 2019. Namun kenyataannya hingga semester I tahun 2019 masih berada di angka 9,4 persen. Salah satu cara mencapai sasaran utama tersebut diturunkan ke dalam beberapa kebijakan strategis diantaranya, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar berupa perumahan yang layak, akses terhadap air minum dan sanitasi.

Perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar sangat penting untuk diperhatikan oleh suatu negara karena berkaitan dengan kualitas hidup dan pembangunan manusia terutama bagi masyarakat kurang mampu. Diantara pemenuhan hak dasar tersebut adalah akses terhadap rumah tinggal yang layak dan infrastruktur dasar permukiman seperti akses air minum dan sanitasi. Dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan kekurangan *backlog* berdasarkan perspektif

menghuni dari 7,6 juta (2014) menjadi 5 juta (2019), kawasan permukiman kumuh perkotaan dari 38.431 Ha tahun 2014 menjadi 0 Ha tahun 2019, akses air minum dan sanitasi layak sebesar 100 persen ke seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan hak dasar rakyat tersebut kenyataannya pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Di Pemerintah Pusat sendiri, kewenangan terhadap pelaksanaan pemenuhan akses rumah tinggal dan infrastruktur permukiman berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Adapun program prioritas dalam mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan melalui (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman, ditangani oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya; (2) Program Pengembangan Perumahan yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Pada tulisan ini akan mengevaluasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk kebijakan perumahan dan permukiman layak. Adapun batasan evaluasi dalam tulisan ini yaitu menilai konsistensi perencanaan dalam RKP yang merupakan penjabaran RPJMN serta menilai gap antara perencanaan dan penganggaran baik itu perencanaan yang tercantum dalam rencana strategis Kementerian PUPR maupun dalam RKP.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Perencanaan dan Politik Penganggaran

Perencanaan adalah upaya untuk menentukan konsekuensi dari suatu tindakan, semakin banyak konsekuensi yang ditentukan maka semakin berhasil perencanaan tersebut. Dengan kata lain, perencanaan adalah kemampuan mengendalikan masa depan dengan tindakan saat ini. Perencanaan itu sendiri membutuhkan dua hal yaitu spesifikasi dari tujuan masa depan dan rangkaian aksi yang didesain pada kurun waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan (Widavsky, 1975). Lebih lanjut, Wildavsky (1975) menyebutkan bahwa perencanaan memiliki dua prinsip utama yaitu, perencanaan mengandung pengetahuan kasualitas (*causal knowledge*) dan perencanaan merupakan kekuatan (*planning as power*). Pertama, perencanaan mengandung hubungan kausalitas, dimana perencanaan perlu diawali dengan keberadaan suatu teori dan setidaknya beberapa bukti untuk menentukan hubungan sebab akibatnya. Kedua, perencanaan membutuhkan kekuatan (dukungan anggaran) untuk mempertahankan keunggulan masa depan di masa sekarang.

Para perencana terdiri dari institusi/kementerian/lembaga yang membutuhkan pendanaan yang besar untuk berbagai proyek yang dipercaya dapat mengamankan pertumbuhan ekonomi. Namun di lain pihak, perencana adalah musuh para pengendali anggaran atau dalam hal ini Kementerian Keuangan yang membatasi pengeluaran. Kondisi ini banyak terjadi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Widavsky (1975) menggambarkan kondisi yang terjadi di Inggris ketika Departemen Urusan Ekonomi dan Dewan Pembangunan Ekonomi Nasional mengumumkan akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan beberapa program pemerintah yang sudah direncanakan walaupun kurang didukung dengan landasan teori yang memadai. Kenyataan yang terjadi ialah pertumbuhan ekonomi jatuh dibawah angka yang telah ditetapkan. Atas kondisi tersebut, Departemen Anggaran menemukan belanja negara yang tumbuh lebih cepat dibandingkan penerimaannya sehingga berdampak pada keseimbangan primer dan inflasi yang memburuk. Pada akhirnya, baik departemen keuangan maupun dewan tidak mempublikasikan angka pertumbuhan ekonomi tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dari sisi perencana yaitu tidak berdaya (*powerless*) dalam hal anggaran tetapi memiliki pengetahuan yang baik (*knowledgeable*) sementara institusi anggaran memiliki kewenangan (*powerful*) tetapi tidak peka (*ignorant*).

Konsistensi penyusunan perencanaan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kredibilitas anggaran publik. Menurut Schick (1998) konsistensi dari suatu tujuan kebijakan (*objective policy*) merupakan kriteria penilaian utama dari keberhasilan suatu proyek dan program. Lebih lanjut, Rubin (1990) menyampaikan bahwa, kredibilitas suatu anggaran dapat dilihat dari konsistensi antara target dan realisasi dari suatu perencanaan anggaran serta kemampuan suatu sistem dalam menyampaikan barang dan jasa yang tergambar dalam suatu anggaran indikatif. Kredibilitas anggaran dapat ditingkatkan dengan cara pendetailan keselarasan *input* dan *output* serta mekanisme penguatan anggaran melalui perbaikan administrasi maupun pemantauan kinerja keuangan yang dapat dilakukan oleh lembaga independen keuangan. Namun, terdapat kelemahan dalam mewujudkannya kredibilitas anggaran melalui kedua hal tersebut. William (1998) menyampaikan bahwa, semakin detail spesifikasi suatu anggaran dan semakin mendalam pemantauan pelaksanaannya maka semakin besar biaya administrasi yang ditimbulkan dengan begitu pemilik anggaran atau

dalam hal ini Kementerian Keuangan menghadapi *trade off* antara kredibilitas dan efisiensi.

2.2. Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia

Di Indonesia sendiri sudah terdapat instrumen legislasi yang mengatur perencanaan dan penganggaran yaitu UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Namun, kedua undang-undang tersebut belum mencerminkan pandangan komprehensif tentang hubungan Perencanaan dan Penganggaran (PGSP, 2013). Salah satunya dilihat dari lahirnya UU Keuangan Negara setahun sebelum ditetapkannya UU SPPN, sehingga banyak ditemukan ketidakharmonisan mekanisme penganggaran dalam UU Keuangan Negara yang seharusnya berpedoman pada mekanisme perencanaan pembangunan nasional.

Kurang tegasnya peran dokumen perencanaan dalam UU Keuangan Negara turut mencerminkan lemahnya kewenangan institusi perencanaan. Abimanyu (2011) mengatakan bahwa di tingkat pusat, fungsi koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan nasional ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sedangkan fungsi anggaran ada di Kementerian Keuangan. Apapun yang direncanakan, keputusan akhir ada di anggaran. Lebih lanjut, gambaran ketidaksinkronan perencanaan penganggaran juga kerap terjadi di tingkat daerah. Octaviani (2008) dalam penelitiannya memetakan konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang Pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Solok menyimpulkan bahwa: (1) hanya 60 persen APBN sinkron dengan rencana kerja (renja) dinas Pendidikan bidang Pendidikan dasar dan (2) hanya 25 persen APBD sinkron dengan renja dinas Pendidikan bidang Pendidikan menengah.

UU 25/2004 mengatur proses perencanaan pembangunan dari kewajiban membuat Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) yang akan memandu Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) dan RPJMN selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan (gambar 1). Peraturan turunan dari UU tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Meskipun demikian, pada akhirnya pemerintah menyadari kurangnya keharmonisan kedua

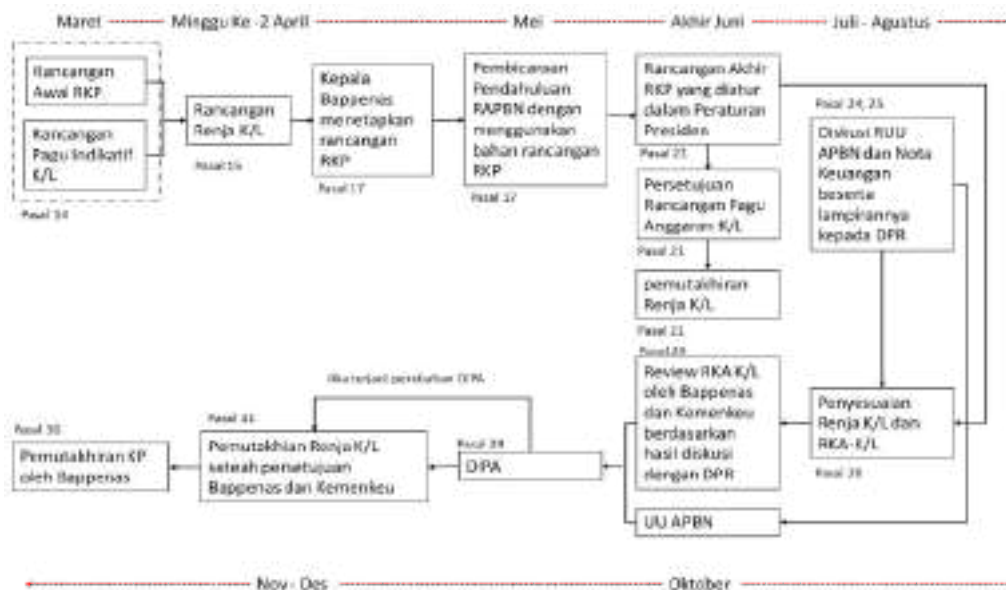
aturan tersebut yaitu dengan menggabungkan dua Peraturan Pemerintah (PP) yang sebelumnya menjadi acuan dalam pembentukan anggaran. Peraturan tersebut ialah PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran.

Gambar 1. Implementasi Sistem Perencanaan dalam Sistem Penganggaran

Sumber: UU No.25/2004 dan UU No. 17/2003

PP 17 Tahun 2017 tersebut akan memberikan wewenang kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam mengalokasikan anggaran untuk program pemerintah yang memiliki prioritas pembangunan ekonomi. Alokasi anggaran selanjutnya akan lebih diutamakan untuk program pembangunan nasional, bukan menurut fungsi dan kementeriannya. Artinya, kementerian yang memiliki program prioritas pembangunan akan mendapatkan alokasi anggaran yang diutamakan dibandingkan dengan kementerian lain, meskipun fungsinya lebih penting. Pada Pasal 33 PP 17/2017 ini disebutkan bahwa kaidah perencanaan pembangunan nasional yaitu dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program melalui penganggaran berbasis kinerja dan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif. Selanjutnya pada gambar 2 menunjukkan bagaimana persetujuan antara RKP dan APBN melalui berbagai proses pembahasan untuk mensinkronkan keduanya.

Gambar 2. Kerangka Waktu dan Tahapan Pembahasan RUU APBN



Sumber: PP 17/2017

2.3. Urgensi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat untuk Program Perumahan dan Permukiman

Perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar sangat penting untuk diperhatikan oleh suatu negara karena berkaitan dengan kualitas hidup dan pembangunan manusia terutama bagi masyarakat kurang mampu. Diantara pemenuhan hak dasar tersebut adalah akses terhadap rumah tinggal yang layak dan kawasan permukiman. Rumah selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembina keluarga yang mendukung perikehidupan dan penghidupan juga mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan penyiapan generasi muda (Pasal 28H Amandemen UUD NRI Tahun 1945). Sebuah kajian yang dilakukan oleh Crisp et al (2016) menunjukkan terdapat hubungan yang erat antara perumahan (*housing*) dan kemiskinan (*poverty*), dimana terdapat lima variabel kunci dari perumahan yang dapat meningkatkan angka kemiskinan yaitu ketersediaan, biaya, kualitas, lokasi dan keamanan. Sebaliknya, pengembangan dan pembangunan perumahan dapat mengurangi kemiskinan jika kondisinya mendukung penciptaan lapangan kerja. Pada dasarnya pemerintah menyadari permasalahan perumahan berdasarkan lima aspek tersebut, sehingga penyediaan perumahan layak huni menjadi prioritas pemerintah periode 2015-2019 ini.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019 tertuang bahwa salah satu *outcome* dalam pembangunan selama 2015-2019 ialah penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8-

9 persen. Dimana dalam mencapai kondisi tersebut diturunkan dalam beberapa program prioritas diantaranya terkait penyediaan perumahan dan permukiman. Upaya pemerintah untuk mewujudkan percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat dilakukan melalui program induk yaitu Program Satu Juta Rumah (PSR). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalankan fungsi, baik sebagai regulator, maupun sebagai penyedia rumah/hunian, MBR dan sebagai pendorong bagi para pengembang perumahan melalui pemberian kemudahan perizinan dan skema pembiayaan. Mengingat tahun ini adalah tahun terakhir dari RPJM 2019, hasil yang dicapai sejauh ini masih jauh dari harapan. Dapat dikatakan Kementerian PUPR belum berhasil dalam memenuhi tanggung jawab dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat dan mengurangi *backlog* perumahan.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Evaluasi Keterkaitan Program/Kegiatan antar Dokumen Perencanaan

Dengan berakhirnya pelaksanaan RPJMN 2015-2019 maka sudah seharusnya dilaksanakan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaannya, untuk perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran kedepannya, baik itu untuk program perumahan permukiman maupun program lainnya. Mekanisme evaluasi yang disebutkan dalam RPJMN 2015-2019 salah satunya dengan memetakan keterkaitan antara program/kegiatan dalam dokumen perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan dalam dokumen tahunan sejalan dengan dokumen lima tahunan. Adapun keterkaitan antar dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Contoh Pemetaan Keterkaitan Program/Kegiatan Antar Dokumen Perencanaan

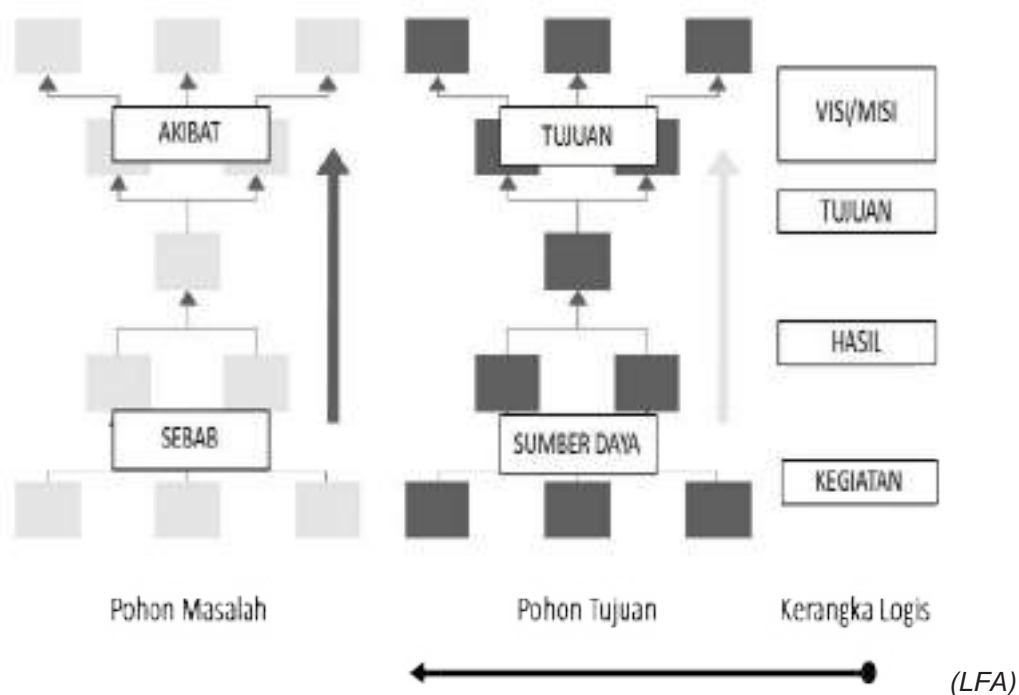


Sumber: RPJMN 2015-2019

3.2. Analisis Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dalam analisis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program perumahan dan permukiman ini menggunakan pendekatan *Logical Framework Analysis* (LFA). LFA merupakan alat analisis dalam manajemen berorientasi hasil atau *Results based Management*. LFA membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi risiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*output*) dan hasil (*outcomes*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan, serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek (Ausguidline, 2005). Pendekatan LFA sudah diaplikasikan dalam proses perencanaan proyek di lembaga-lembaga internasional dan juga pada proses perencanaan pembangunan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU SPPN.

Gambar 4. Konsep Analisis Kerangka Logis



Sumber: Dirgahayani; Wold Bank (2019)

4. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, maka sasaran kebijakan RPJMN dijabarkan kedalam RKP. Analisis ini mengadopsi pendekatan “penganggaran berorientasi hasil” sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran atau yang dikenal dengan *money follow program*. Sasaran pembangunan atau dampak pembangunan yang dimaksud oleh PP ini adalah RPJMN dan RKP. Untuk informasi lebih rinci tentang target dan lokasi, Renstra K/L juga digunakan sebagai turunan operasional dari RPJMN. Pada bagian pembahasan ini akan dibatasi pada perencanaan penganggaran di pemerintah pusat yang dilihat dari:

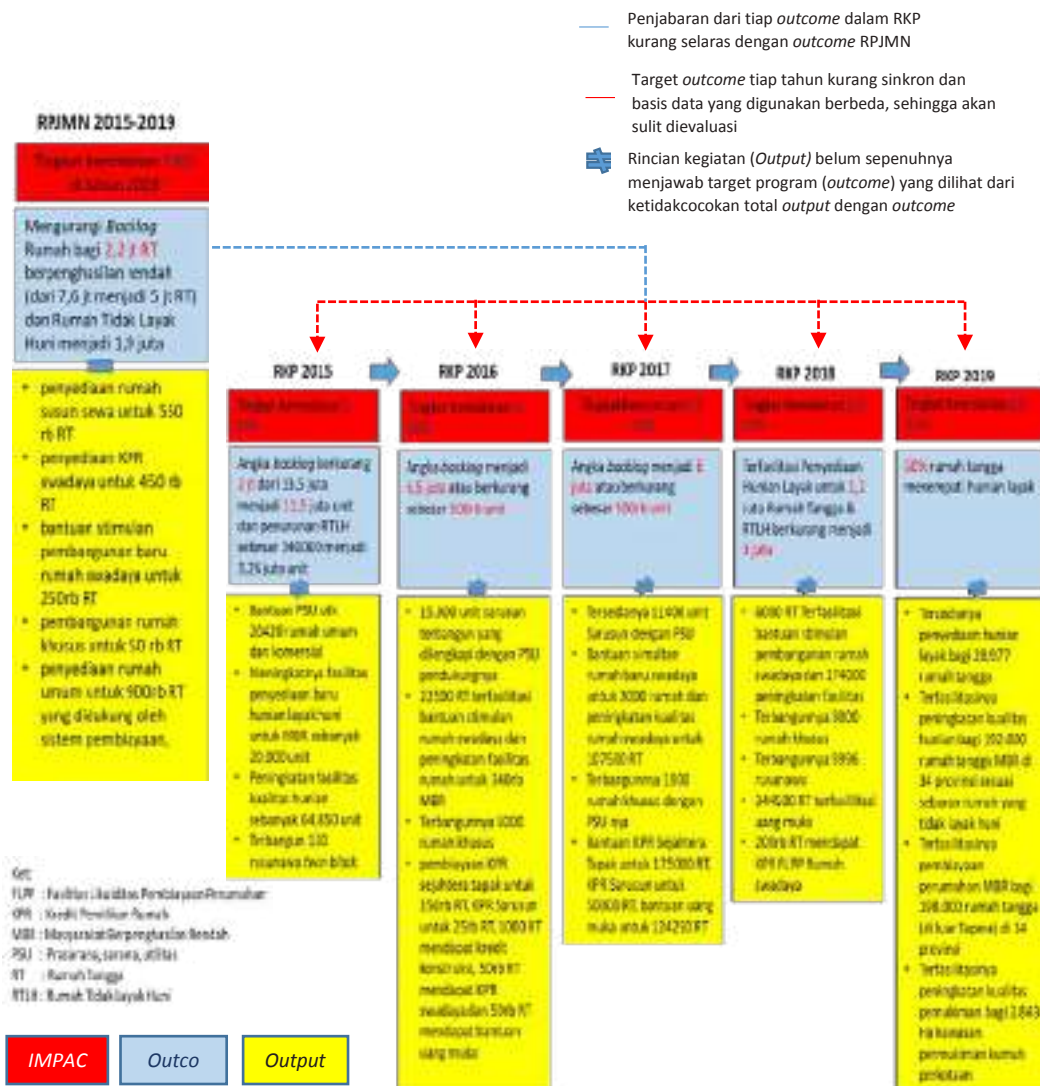
1. Konsistensi perencanaan antar dokumen RPJMN 2015-2019 dan RKP 2015-2019 untuk kebijakan pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman layak yang terdiri dari 2 (dua) program prioritas yaitu penyediaan perumahan serta pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman
2. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR dan APBN 2015-2019 serta RKP dan APBN 2019 untuk kebijakan pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman layak

4.1. Konsistensi perencanaan antar dokumen RPJMN dan RKP

Menurut Schick (1998) konsistensi dari suatu tujuan kebijakan (*objective policy*) merupakan kriteria penilaian utama dari keberhasilan suatu proyek dan program yang diturunkan kedalam capaian *outcome* maupun output. Sehingga konsistensi penyusunan perencanaan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kredibilitas anggaran publik. Namun, konsistensi tersebut belum dapat diwujudkan untuk program penyediaan perumahan layak. Dari sisi indikator keberhasilan *outcome* yang dijabarkan dalam RKP 2015 hingga 2019 terlihat tidak konsisten. Dapat dilihat dari basis data yang digunakan antara RPJMN dan RKP memiliki perbedaan. Pada gambar 5 menunjukkan bahwa target capaian penyediaan perumahan layak dalam RPJMN menggunakan konsep penghunian dengan basis data backlog berada diangka 7,6 juta. Namun, pada RKP 2015 terlihat basis data yang digunakan berbeda dengan RPJMN yaitu menggunakan konsep kepemilikan dengan basis data backlog 13,5 juta unit. Hal ini tentu mempengaruhi target dan tujuan yang hendak dicapai, dimana pada tahun 2015 ditarget pengurangan backlog diangka 2 juta sementara capaian RPJMN hingga 2019 sebesar 2,2 juta unit. Ketidaksinkronan *outcome* pada RKP berlanjut hingga tahun 2019. Indikator *outcome* yang ditargetkan yaitu 50 persen rumah tangga (RT) menempati hunian layak. Dalam RKP tidak dijelaskan berapa total angka absolutnya hunian layak.

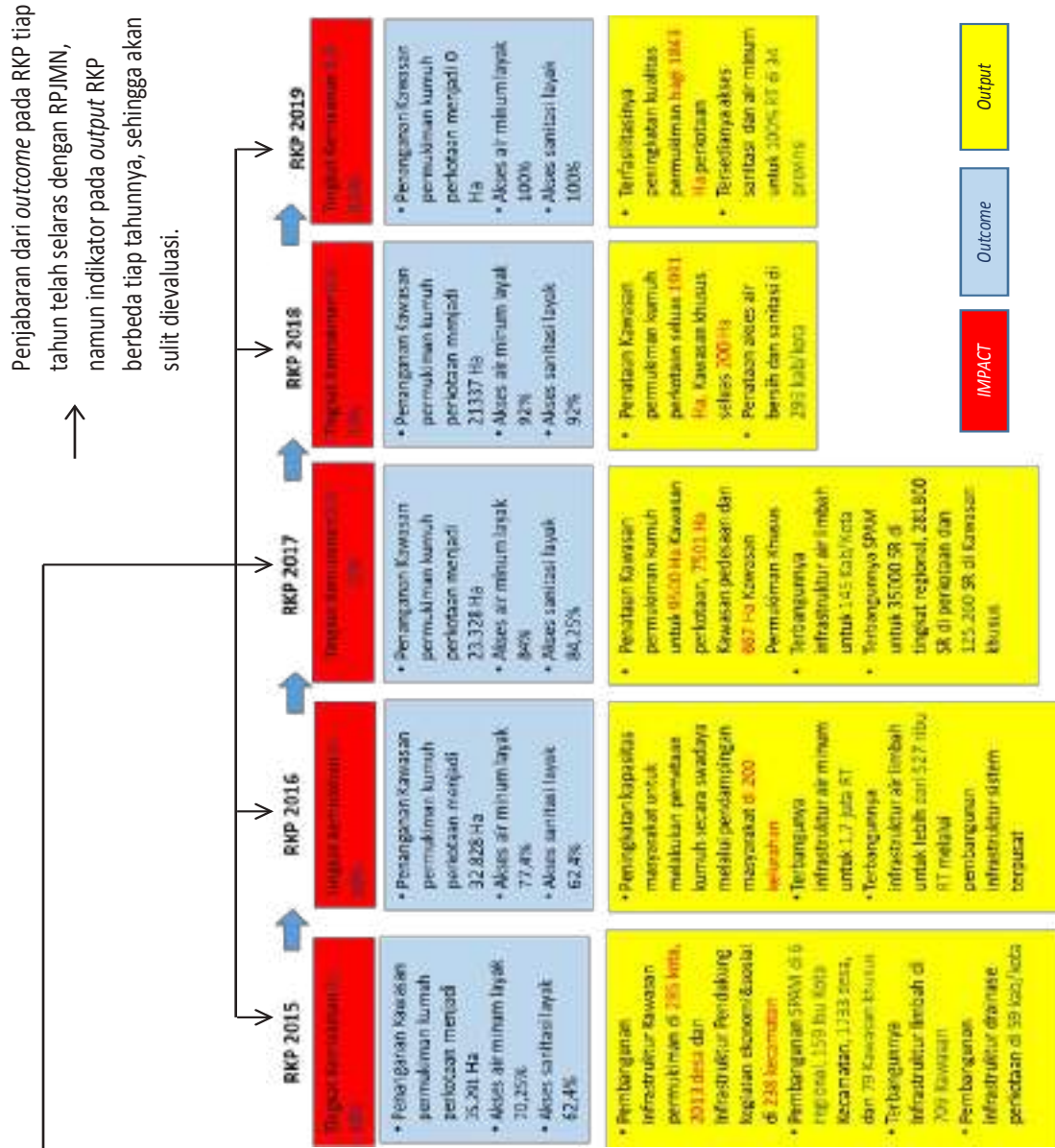
Ketidakkonsistenan perencanaan juga terlihat pada kegiatan prioritas (*output*) yang mendukung capaian program. Dalam RPJMN terlihat jelas kegiatan pembangunan unit rumah yang terdiri dari rumah susun, swadaya, khusus dan lain sebagainya, jumlahnya sama dengan target program (*outcome*) yaitu 2,2 juta unit. Namun, konsep serupa tidak diturunkan ke dalam RKP dimana total *output* tidak sama dengan *outcome* yang dihasilkan sehingga akan menyulitkan menilai keberhasilan program ini. Pada program “Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman” dapat dikatakan lebih konsisten dalam menjabarkan target outcome RPJMN ke dalam target tahunan yang tertuang dalam RKP. Namun, yang menjadi persoalan ialah indikator output pada suatu kegiatan yang sama memiliki unit analisis yang berbeda-beda tiap tahunnya (lihat Gambar 6).

Gambar 5. Sinkronisasi RPJMN dan RKP untuk Program Penyediaan Perumahan



Sumber : RPJMN 2015-2019,

Gambar 6. Sinkronisasi Dokumen RPJMN dan RKP untuk Sasaran Program Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

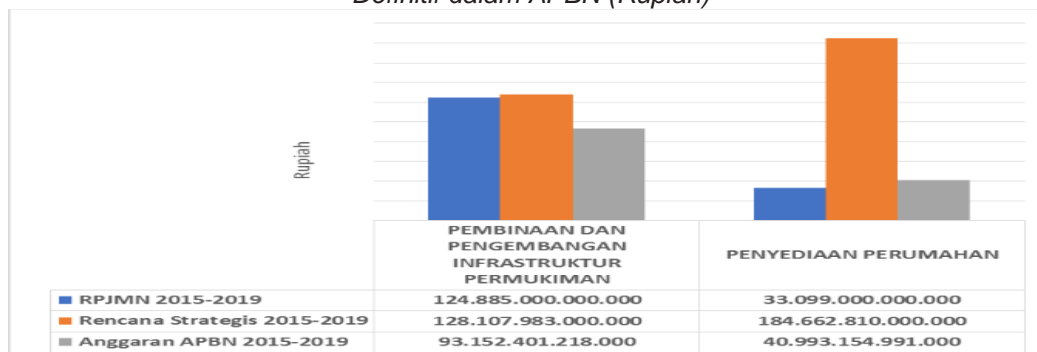


Sumber : RPJMN 2015-2019, RKP 2015-2019, diolah

4.2. Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran untuk Program Perumahan dan Permukiman Layak

Pendekatan perencanaan penganggaran berbasis program (*money follows program*) cukup nyaring digaungkan sejak Pemerintahan Joko Widodo dalam melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggarnya. Sinkronisasi ini dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan *money follow program* ini masih belum terealisasi sepenuhnya terlihat cukup tingginya *gap* antara perencanaan dan penganggaran. Terlihat dari gambar 7, ketidakjelian pemerintah dalam menyusun rencana dan mengalokasikan anggaran. Dalam renstra Kementerian PUPR tercantum bahwa anggaran indikatif yang dialokasikan untuk Program Pengembangan Rumah sebesar Rp184 triliun namun yang benar-benar dialokasikan dalam APBN hanya sebesar Rp40 triliun. *Gap* yang sangat tinggi tersebut menjadi indikasi bahwa kurang harmonisnya koordinasi kementerian teknis dan Bappenas selaku koordinator perencanaannya dengan Kementerian Keuangan yang memiliki anggaran. Bagaimanapun juga perencanaan tanpa anggaran yang mendukung akan sia-sia. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Widavsky (1975) bahwa perencana cenderung *powerless* dibandingkan institusi keuangan negara.

Gambar 7. Gap Alokasi Anggaran Indikatif dalam RPJMN dan Renstra dengan Anggaran Definitif dalam APBN (Rupiah)



Sumber: RPJMN 2015-2019, Renstra 2015-2019, LAKIP Kemen PUPR 2015-2018 dan Nota Keuangan 2015-2019

4.2.1 Gap Perencanaan dalam Renstra Kementerian PUPR dan Penganggaran dalam APBN untuk Program Penyediaan Perumahan

Program Penyediaan Perumahan merupakan salah satu program prioritas yang diamanatkan dalam RPJMN untuk mengurangi *backlog* perumahan melalui alokasi belanja K/L. Di Pemerintah Pusat, program penyediaan perumahan ini dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan indikator *outcome* yaitu

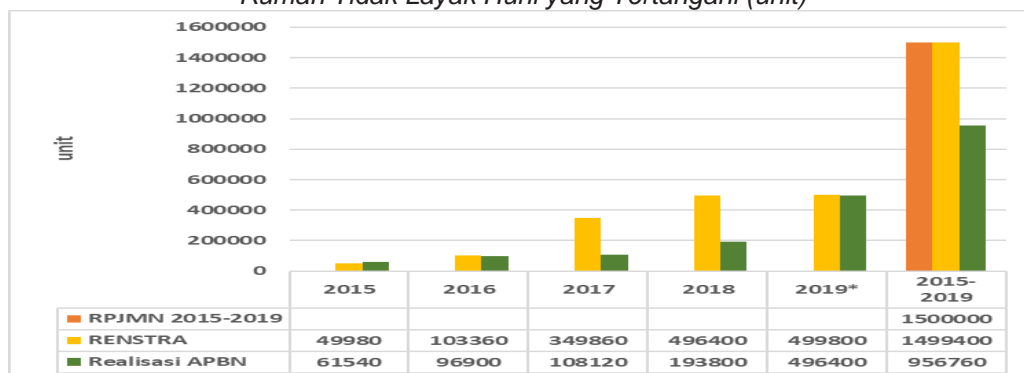
pengurangan *backlog* bagi MBR sebesar 2,2 juta unit dan pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 1,5 juta unit hingga tahun 2019. Dari 2,2 juta target pengurangan *backlog* perumahan yang tertera dalam RPJMN, sebanyak 850 ribu unit rumah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dalam periode 2015-2019 (Renstra Kementerian PUPR 2015-2019). Namun, dalam gambar 8 menunjukkan hanya 340 ribu unit rumah yang mampu dianggarkan dalam APBN. Selanjutnya untuk *outcome* pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditargetkan dalam renstra sebesar 1,5 juta unit rumah hanya 940 ribu unit yang dianggarkan APBN dalam kurun waktu 2015-2019 (gambar 9). Kurangnya dukungan anggaran ini tentunya sangat memengaruhi keberhasilan target pembangunan pemerintah, namun *gap* yang tinggi ini juga menunjukkan lemahnya koordinasi antara perencana dan pengelola anggaran.

Gambar 8. Gap Perencanaan dan Penganggaran untuk Indikator Outcome Backlog Perumahan Berdasarkan Konsep Hunian (unit)



Sumber: RPJMN 2015-2019, Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, Lakip Kementerian PUPR, APBN 2019

Gambar 9. Gap Perencanaan dan Penganggaran untuk Indikator Outcome Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (unit)



Sumber: RPJMN 2015-2019, Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, Lakip Kementerian PUPR, APBN 2019

Adapun pendetailan dari program tersebut yang diturunkan ke dalam kegiatan prioritas (*output*) dapat terlihat pada tabel 1 berikut. Pada tabel tersebut

menunjukkan besarnya *gap* perencanaan pembangunan unit rumah susun, khusus dan swadaya dengan yang teranggarkan oleh APBN. Dari target Renstra sebesar 850.000 rumah yang dibangun hanya 12 persen yang dianggarkan oleh APBN. Kegiatan yang memiliki kinerja terburuk yaitu terjadi pada pembangunan rumah susun, dimana dari perencanaan pembangunan unit rumah susun sebanyak 550.000 unit hanya 8,7 persen yang dianggarkan untuk dibangun. Hal ini tentu menjadi catatan pemerintah dalam melakukan perencanaan kedepannya.

Tabel 1. Gap Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Prioritas (Output) untuk Program Penyediaan Perumahan

Jenis Rumah	2015			2016			2017			2018			2019		
	RPJMN*	Renstra	Realisasi APBN	RPJMN*	Renstra	Realisasi APBN	RPJMN*	Renstra	Realisasi APBN	RPJMN*	Renstra	Realisasi APBN	RPJMN*	Renstra	APBN
I. Pemenuhan Backlog															
1. Rumah Susun	13.360	20.500	10.497	134.160	15.000	7.740	134.160	160.000	13.251	134.160	165.000	11.670	134.160	189.500	4.798
2. Rumah Khusus	4.500	7.320	6.713	10.000	5.000	6.048	15.000	10.000	5.047	15.000	12.680	4.525	5.500	15.000	2.130
3. Rumah Swadaya	20.000	20.000	20.756	45.000	22.500	1.007	50.000	60.000	2.000	60.000	69.500	5.999	75.000	78.000	8.000
Total	37.860	47.820	37.966	189.160	42.500	14.795	199.160	230.000	20.298	209.160	247.180	22.194	214.660	282.500	14.928
II. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni															
Rumah Swadaya (Peningkatan kualitas)	-	50.000	61.489	-	103.500	96.881	-	350.000	110.732	-	496.500	195.305	-	500.000	198.500
III Bantuan PSU															
Fasilitas Bantuan PSU	-	40.700	29.956	-	42.000	26.884	-	180.000	17.266	-	190.000	30.406	-	224.250	13.000

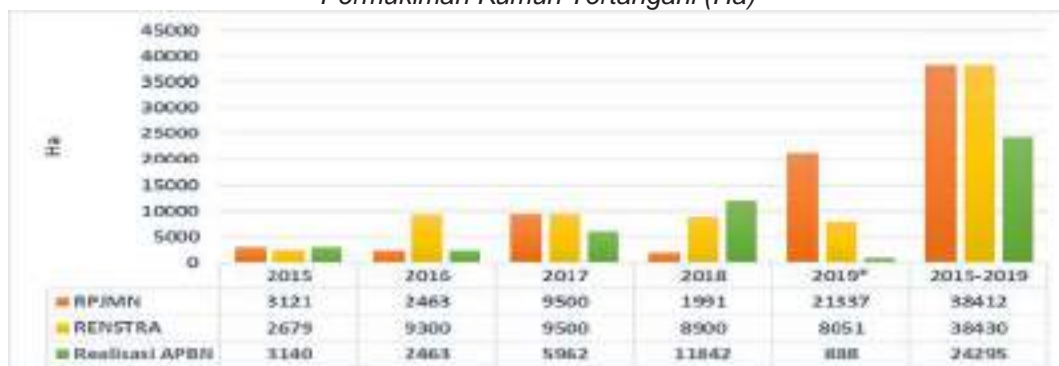
Sumber: RPJMN 2015-2019, Renstra Kemen PUPR 2015-2019, Lakip DJCK 2015, 2016, 2017 2018, DIPA DJCK 2019, Lakip Ditjen Penyediaan Perumahan 2015,2016,2017, 2018 dan DIPA Ditjen Penyediaan Perumahan 2019

4.2.2 Gap Perencanaan dalam Renstra Kementerian PUPR dan Penganggaran dalam APBN untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pada program prioritas pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, terdapat tiga indikator dalam menilai keberhasilan program tersebut yaitu tertanganinya pemukiman kumuh seluas 38412 Ha, akses air minum layak 100 persen dan akses sanitasi layak sebesar 100 persen di tahun 2019. Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan unit dalam Kementerian PUPR yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program tersebut. Namun, pada gambar 10 terlihat bahwa pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dapat dianggarkan oleh APBN hanya 63 persen. Sementara itu, komitmen pemenuhan air minum dan sanitasi layak yang dianggarkan APBN hingga 2019 hanya 92 persen dari target 100 persen (gambar 11 dan 12). Hal ini

menunjukkan ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran mengakibatkan target pembangunan tidak tercapai.

Gambar 10. Gap Perencanaan dan Penganggaran untuk Indikator Outcome Permukiman Kumuh Tertangani (Ha)



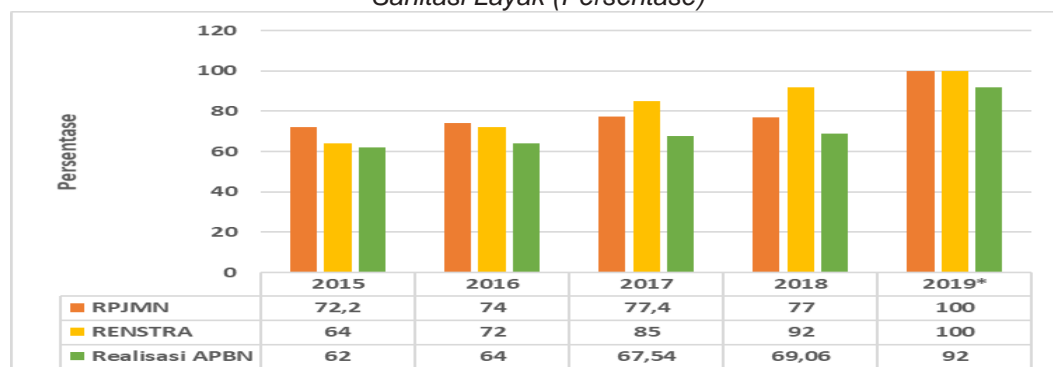
Sumber: RPJMN 2015-2019, Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, Lakip Kementerian PUPR, APBN 2019

Gambar 11. Gap Perencanaan dan Penganggaran untuk Indikator Outcome Akses Air Minum Layak (Persentase)



Sumber: RPJMN 2015-2019, Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, Lakip Kementerian PUPR, APBN 2019

Gambar 12. Gap Perencanaan dan Penganggaran untuk Indikator Outcome Akses Sanitasi Layak (Persentase)



Sumber: RPJMN 2015-2019, Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, Lakip Kementerian PUPR, APBN 2019

Tabel 2 menunjukkan beberapa kegiatan prioritas yang mendukung tercapainya program prioritas peningkatan kualitas permukiman yang dilihat dari berkurangnya permukiman kumuh, meningkatnya sanitasi dan air minum layak. Perbedaan unit analisis di dokumen RPJMN, Renstra dan APBN menjadi tantangan dalam menilai kegiatan yang dianggap berkontribusi besar dalam mencapai tujuan program prioritas dan yang berkinerja kurang akibat rendahnya anggaran yang dialokasikan. Meskipun demikian, beberapa kegiatan yang ditampilkan pada tabel 2 telah memperoleh dukungan anggaran sesuai dengan target yang dicapai. Diantaranya dalam memenuhi air minum layak dilaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur SPAM untuk 3,6 juta sambungan rumah (SR) berdasarkan renstra 2015-2019. Dari target tersebut, lebih dari 100 persen telah dianggarkan dalam APBN yaitu 4 juta rumah telah tersambung infrastruktur SPAM baik di tingkat regional, perkotaan, perdesaan maupun kawasan khusus. Namun, yang perlu menjadi catatan ialah dalam peningkatan kawasan permukiman kumuh belum tertangani secara optimal. Dari target 38.300 Ha kawasan perkotaan yang ditingkatkan kualitas permukimannya, hanya 23.900 Ha yang dianggarkan dalam APBN. Tentunya dalam merancang perencanaan selanjutnya hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah, agar alokasi dalam program prioritas dapat diutamakan.

Tabel 2. Gap Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Prioritas (Output) untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Output/Indikator	2015			2016			2017			2018			2019		
	RPJMN	Renstra	Realisasi APBN	RPJMN	Renstra	Realisasi APBN	RPJMN	Renstra	Realisasi APBN	RPJMN	Renstra	Realisasi APBN	RPJMN	Renstra	Realisasi APBN
Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan (Ha)	1.610	2.679	2.762	8.975	9.300	2.463	9.956	9.500	5.961	9.500	8.900	11.842	8.390	8.051	888
Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan (Ha)	47.530	47.530	47.530	7.683	7.683	28.135	7.501	7.501	15.644	7.835	7.835	10.225	7.835	7.835	2.235
Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman di kawasan khusus (Ha)	266	266	266	500	500	438	667	667	1.351	833	833	2.555	8.390	8.051	738
Pembangunan infrastruktur SPAM regional (sambungan rumah/SR)	240.000	70.000	64.000	280.000	70.000	96.000	280.000	35.000	75.000	280.000	70.000	59.200	240.000	105.000	62.400
Pembangunan infrastruktur SPAM Perkotaan (sambungan rumah/SR)	463.200	210.000	462.600	1.200.000	210.000	318.400	2.400.000	216.000	326.250	3.200.000	98.000	139.500	2.728.000	186.000	80.250
Pembangunan infrastruktur SPAM Perdesaan (sambungan rumah/SR)	927.360	407.680	463.680	1.280.000	407.680	70.720	1.920.000	491.520	246.400	2.560.000	508.160	790.080	2.978.560	511.360	617.600
Pembangunan infrastruktur SPAM Kawasan Khusus (sambungan rumah/SR)	32.000	18.000	87.400	120.000	18.000	7.500	136.000	16.000	40.320	152.000	14.000	34.800	1.221.600	11.000	24.450
Pembangunan infrastruktur Sistem Pengelolaan Drainase (Luas Tertangani dim Ha)	4.500	600	2.650	4.500	600	850	4.500	1.000	533	4.500	1.000	608	4.500	1.300	25

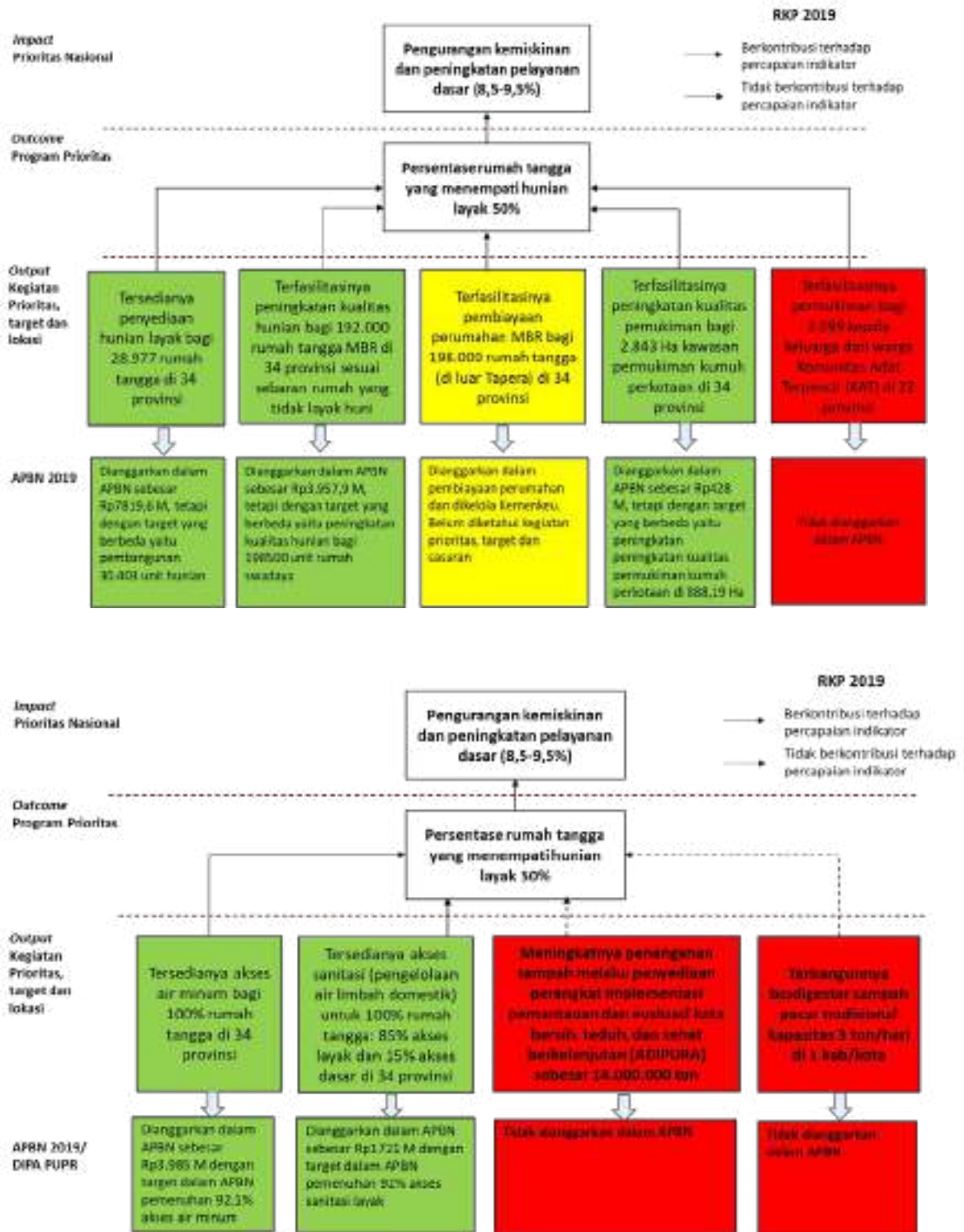
Sumber: RPJMN 2015-2019, Renstra Kemen PUPR 2015-2019, Lakip DJCK 2015, 2016, 2017 2018, DIPA DJCK 2019, Lakip Dijen Penyediaan Perumahan 2015, 2016, 2017, 2018 dan DIPA Dijen Penyediaan Perumahan 2019

4.2.3 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Kebijakan Perumahan dan Permukiman dalam Dokumen RKP dan APBN untuk Tahun 2019

Analisis ini bertujuan untuk melihat kesesuaian program prioritas dalam dokumen RKP yang dianggarkan dalam APBN. Dengan diterbitkannya PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, maka sudah seharusnya pendekatan *money follow program* dijalankan lebih baik dari tahun sebelumnya. Pemerintah mengklaim bahwa politik perencanaan dan penganggaran dalam RKP 2019 dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (*policy-driven*), dan bukan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau tugas dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, dalam analisis ini menggunakan perencanaan dan penganggaran 2019 dengan menyusun pohon tujuan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antara indikator kegiatan prioritas, dengan indikator program prioritas, dan indikator prioritas nasional terkait.

Pada gambar 13 menunjukkan bahwa program prioritas akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak yang tercantum dalam RKP diturunkan ke dalam 2 program dalam APBN dengan nama program yang berbeda yaitu: (i) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman senilai Rp20.245,20 miliar; dan (ii) program pengembangan perumahan Rp7.819,70 miliar. Kedua program tersebut dinilai selaras dengan program prioritas RKP karena kegiatan prioritasnya terkait, walaupun indikatornya tidak persis sama. Adapun program lain dalam APBN yang menjadi turunan dalam program hunian layak dalam RKP yaitu pembiayaan perumahan. Namun, dalam APBN tidak diketahui kegiatan prioritas, target, dan sasaran. Selain itu, masih terdapat beberapa kegiatan dalam program hunian layak yang tidak dialokasikan dalam APBN yaitu kegiatan permukiman bagi 2099 kepala keluarga dari komunitas adat terpencil di 22 provinsi, meningkatnya penanganan sampah melalui penyediaan perangkat implementasi pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh dan sehat berkelanjutan, serta terbangunnya biodigester sampah pasar tradisional. Perbedaan penamaan program antar nama program yang tercantum dalam APBN dan RKP serta terdapat beberapa kegiatan program dalam RKP yang tidak teranggarkan menunjukkan bahwa masih kurangnya sinkronisasi antar perencanaan dan penganggaran.

Gambar 13. Pohon Tujuan Prioritas Nasional 1 Sektor Infrastruktur: Hunian Layak



Sumber: RKP dan APBN 2019

5. Penutup

Pendekatan *money follow program* yang digaungkan pemerintah periode 2015-2019 dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran kurang menunjukkan hasil yang sesuai. Sebagaimana disampaikan oleh Wildavsky (1975), bahwa jika indikator dalam suatu *output* tidak dapat dinilai secara akurat maka tujuan akan sulit tercapai. Pada kebijakan Pemenuhan Permukiman dan Perumahan Layak yang dilaksanakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, nyatanya belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan kurang sinkronnya hubungan sebab akibat antara kegiatan dan program pemerintah serta dengan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian target tersebut disebabkan oleh kelemahan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran serta koordinasi antara kementerian/lembaga yang membidangi perencanaan dan penganggaran. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Dengan membandingkan perencanaan dalam dokumen RPJMN dan RKP terlihat terdapat ketidaksinkronan indikator program (*outcome*) diantara dua dokumen tersebut dalam menjalankan Kebijakan Pemenuhan Perumahan dan Permukiman Layak. Ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dibuat tidak berorientasi pada capaian yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun tersebut dikarenakan perencanaan tahunannya tidak menjawab target perencanaan jangka menengah tersebut. Diantaranya, terdapat perbedaan basis data yang digunakan antara RPJMN dan RKP dimana dalam RPJMN dalam indikator penyediaan rumah layak, basis data *backlog* yang digunakan dengan konsep penghunian yaitu berada diangka 7,6 juta unit. Sementara itu, pada RKP 2015 menggunakan konsep kepemilikan dengan basis data *backlog* 13,5 juta unit. Tentunya dengan basis data yang berbeda antara dokumen RKP dan RPJMN maka target yang hendak dicapai pun tidak akan tercapai.
2. Perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik (Yuwono, 2008). Dari hasil evaluasi penganggarannya saja ditemukan *gap* yang besar antara pagu indikatif di renstra dengan besaran alokasi yang dianggarkan dalam APBN. Anggaran indikatif yang tercantum dalam program pengembangan perumahan pada renstra Kementerian PUPR

hanya 22 persen yang teranggarkan dalam APBN. Hal itu terlihat dari banyaknya kegiatan yang akhirnya dipangkas, dimana hanya 12 persen unit rumah yang dapat terbangun dari total yang direncanakan sebesar 850.000 unit (target pembangunan rumah dengan APBN).

3. Dalam memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pemerintah menerbitkan PP Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Namun, dengan membandingkan *input*, *output* hingga *outcome* antara RKP dan APBN 2019 masih ditemukan ketidaksinkronan perencanaan dan penganggarnya. Berdasarkan hasil analisis, terdapat ketidakcocokan antara program yang tercantum dalam RKP dengan yang tercantum dalam RAPBN, khususnya perbedaan nama. Pada *level* program, penamaan program pada RAPBN bersifat umum, cenderung mengacu pada fungsi kementerian terkait. Sementara RKP menggunakan nama program yang tematik dan spesifik, diturunkan dari prioritas nasional. Selain itu, masih terdapat beberapa kegiatan dalam program prioritas dalam RKP yang tidak dianggarkan dalam APBN 2019.

Dari hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran kebijakan pemenuhan perumahan dan permukiman layak maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diperhatikan oleh pemerintah:

1. Perencanaan sebaiknya disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sumber daya yang ada. Selain itu, indikator-indikator yang disusun dalam menilai keberhasilan capaian suatu program perlu dibuat lebih terukur dan konsisten di tiap dokumen perencanaan dan pada lintas tahun yang berbeda. Perencanaan yang terlalu ambisius hanya akan berdampak pada penilaian kinerja pemerintah yang kurang optimal yang pada akhirnya tujuan akhir dari sebuah perencanaan tidak akan tercapai.
2. Dalam melaksanakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pemerintah telah mengaturnya dalam PP nomor 17 Tahun 2017 tentang Proses Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Tahapan perencanaan dan penganggaran dilaksanakan harus sesuai dengan aturannya. Salah satu kunci dari terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran ini ialah pada tahap tinjauan ulang antara Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas terhadap penyusunan pagu indikatif Kementerian/Lembaga. Pada tahap ini seharusnya jangan hanya

sebagai seremonial dalam penyusunan sinkronisasi, tetapi benar-benar dimanfaatkan dengan meninjau sedetail mungkin baik itu rencana dan ketersediaan anggarannya agar berada pada satu tujuan yang sama. Walaupun setelah penyusunan pagu indikatif ini akan ada perubahan setelah dilakukan pembahasan di DPR RI tetapi setidaknya perencanaan dan target yang disusun benar-benar sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Sehingga koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian/Lembaga menjadi penentu dari sinkronnya perencanaan dan penganggaran.

3. Fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah perlu diperkuat sebagai bahan evaluasi dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.
4. Permukiman dan perumahan layak yang dilengkapi dengan infrastruktur air minum dan sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, dan negara wajib dalam mengusahakannya. Namun, masifnya pembangunan infrastruktur konektivitas pada periode 2015-2019 dapat menjadi salah satu penyebab terbengkalainya pencapaian pembangunan infrastruktur dasar permukiman. Dengan demikian, sebaiknya pemerintahan periode 2019-2024 dapat lebih memperhatikan pelaksanaan program prioritas ini dengan dukungan anggaran yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Abimanyu, Anggito (2012). *Kajian Hukum Sinergitan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran*. Bappenas. Jakarta.
- Crisp, R., Gore, T., Pearson, S. and Tyler, P. with Clapham, D., Muir, J. and Robertson, D. (2014). *Regeneration and poverty: evidence and policy review*. Sheffield: CRESR, Sheffield Hallam University.
- Dirgahayani, Puspita (2019). *Analisis RAPBN untuk Sektor Infrastruktur*. Jakarta World Bank dan Pusat Kajian Anggaran..
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Laporan Kinerja Pemerintah 2015-2018*.
- Fozzard, Adrian. (2001). *The Basic Budget Problem: Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and their Implications for Poor Budgeting*. London. Overseas Development Institute.
- Joseph rowntree foundation (2016). *Housing and Poverty*. Diakses melalui www.jrf.org.uk Tanggal akses 2 Oktober 2019.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *RPJMN 2015-2019*.
- Kementerian Keuangan. *APBN dan Nota Keuangan 2015-2019*.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Rencana Strategis 2015-2019*.
- Octaviani, Rini. (2008). *Analisa Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Solok Selatan*. Universitas Andalas.
- PGSP Project. (2013). *Aligning National-Regional Planning and Budgeting System*. Jakarta. PPGSP Paper Series No.9.
- Rubin, Irene. (1990). *The Politics of Public Budgeting*. Northern Illinois University. New Jersey. Catham Publisher.
- Schick, Alan. (1998). *A Contemporary Approach to Public Expenditure Management*. World Bank Institute.
- Wildavsky, Aaron. (1975). *Budgeting A comparative Theory of Budgetary*. Boston. Little and Brown.
- Williamson, Oliver. (1998). *Transaction Cost Economics: How it works, where it is headed*. De Economist, 146 (1) 23-58.
- Yuwono, Sony, Tengku Agus Indrajaya, dan Hariyandi. (2005). *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban APBD (Berdasarkan kinerja)*. Malang. Bayumedia.

PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA DESA DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

The Effect of Revenue Sharing Fund (DBH), Special Allocation Fund (DAK), Village Fund and Gross Regional Domestic Product on Poverty in Indonesia

**Rendy Alvaro dan **Ervita Luluk Zahara*

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI
email: *rendy.alvaro@dpr.go.id, **ervita.zahara@dpr.go.id

Abstract

The study aims to analyze the effect of revenue sharing fund (DBH), special allocation fund (DAK), village fund, Gross Regional Domestic Product (GRDP) on poverty at the districts/city in Indonesia. Types of data use secondary data about revenue sharing fund (DBH), special allocation fund (DAK), village fund, Gross Regional Domestic Product (GRDP) in 2015-2018. Data analysis using panel data regression analysis. Result of research found that revenue sharing fund and special allocation fund had no significant effect on poverty. This study also proves village fund and Gross Regional Domestic Product (GRDP) have significant influence on poverty in Indonesia.

Keywords: *Revenue sharing fund; special allocation fund; village fund; Gross Regional Domestic Product; poverty*

1. Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama bangsa yang harus diselesaikan. Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, salah satu sasaran pembangunan adalah penurunan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia terus menunjukkan perbaikan dimana dalam kurun waktu 2015-2019 tingkat kemiskinan turun dari 11,22 persen pada Maret 2015 menjadi 9,41 persen pada Maret 2019. Angka kemiskinan tersebut merupakan yang terendah sejak era kemerdekaan Republik Indonesia.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi dalam menilai apakah pembangunan yang telah dilakukan pemerintah berhasil. Pemerintah daerah berwenang dalam merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Suparmoko (2002) mengutarakan “semakin mendekatnya pemerintah kepada masyarakat diharapkan pelayanan publik dapat diwujudkan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” Dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam TKDD serta pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pengentasan kemiskinan dapat lebih terarah karena semakin dekatnya jarak antara masyarakat dengan pemerintah yang berfungsi sebagai penampung aspirasi dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Pemerintah telah mengalokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang salah satu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu komponen TKDD yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK bertujuan untuk pemerataan akses ke pelayanan dasar masyarakat. Selain itu dialokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih berfungsi untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan, termasuk sebagai pengkoreksi atas eksploitasi SDA selama ini.

Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sejak tahun 2015, dimana Dana Desa ini juga bertujuan untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Sebagaimana termuat dalam Nota Keuangan dalam periode 2015-2019, alokasi Dana Desa terus meningkat dari sebesar Rp20,8 triliun pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp69,8 triliun pada tahun 2019. Untuk RAPBN TA 2020 alokasi untuk Dana Desa direncanakan sebesar Rp72 triliun. DAK dan Dana Desa manfaatnya

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga level terendah di desa. Sehingga diharapkan dapat menjadi stimulus peningkatan kemandirian fiskal di daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Giovanni (2018) telah melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh PDRB, pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009-2016. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Indonesia. Maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam studi ini yaitu:

1. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap kemiskinan?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kemiskinan?
3. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan?
4. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap kemiskinan?

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Siregar (2015), Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas

daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Halim (2001) menyatakan bahwa tujuan dari penggunaan DAK dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan. Hal ini dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah.

DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik merupakan instrumen untuk mendanai infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik dan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah dengan memerhatikan prinsip *money follow program*. DAK Fisik terdiri dari DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi. Sedangkan DAK Nonfisik merupakan dana yang dialokasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Cakupan DAK Nonfisik telah mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan RAPBN 2020, DAK Nonfisik terdiri atas : (1) Dana BOS, (2) Dana BOP PAUD, (3) Dana tunjangan profesi guru PNSD, (4) Dana tambahan penghasil guru PNSD, (5) Dana tunjangan khusus guru PNSD, (6) Dana BOK, (7) Dana BOKB, (8) Dana PK2UKM, (9) Dana pelayanan administrasi kependudukan, (10) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, (11) Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, (12) Dana Pelayanan

Kepariwisataan, dan (13) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

2.3. Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. (Buku Pintar Dana Desa, 2017). Dana Desa dianggarkan dalam APBN setiap tahun yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan UU Desa, besarnya Dana Desa yang berasal dari APBN ditentukan 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap, yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Besaran alokasi Dana Desa per desa dibangun dari alokasi dasar dan besaran alokasi yang dihitung berdasarkan formula. Alokasi dasar Dana Desa per desa dihitung dengan memperhatikan variabel alokasi dasar per desa dan jumlah desa. Sedangkan variabel yang diperhatikan dalam penghitungan alokasi Dana Desa per desa dengan menggunakan formula adalah jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

Dalam kajian KOMPAK (2017) dijelaskan bahwa dari sisi kebijakan, penataan desa baik oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Untuk itu, pembangunan desa

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung dari potensi faktor-faktor produksi di daerahnya. Dengan adanya perekonomian suatu daerah yang meningkat maka pertumbuhan ekonomi pada daerah/wilayah tersebut akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin meningkat mempunyai peran penting terhadap kesuksesan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut BPS (2019), data PDRB merupakan statistik pendapatan regional yang dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi hasil pembangunan sekaligus sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

2.5. Kemiskinan

Konsep kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan seseorang lebih miskin dibandingkan dengan lainnya. Kondisi ini terjadi apabila antar kelompok pendapatan menunjukkan fenomena ketimpangan. (Bappenas, 2018).

Chambers (1984) mengemukakan pandangannya tentang kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan yaitu kemiskinan merupakan klaster dari berbagai kondisi kurang menguntungkan yang saling berkaitan satu sama lain, dan menyebabkan seseorang terperangkap serta sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Menurut World Bank, kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Seperti berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya sarana dan kapasitas memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik.

2.6. Penelitian Terdahulu

Santosa (2013) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan daerah.

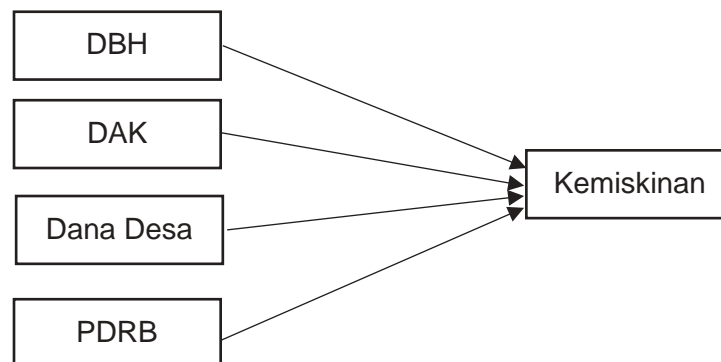
Sari dan Abdullah (2017) melakukan penelitian mengenai analisis ekonomi kebijakan Dana Desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. Penelitian tersebut menunjukkan variabel Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2016. Nafiudin (2018) telah meneliti mengenai Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Dana Desa sudah mampu mengurangi angka kemiskinan.

Saskia (2014) menguji pengaruh pertumbuhan pendapatan perkapita, pengangguran dan tingkat pendidikan di Sulawesi Tenggara. Hasil uji regresi yakni antara pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan dapat dikatakan berpengaruh negatif dan signifikan. Dimana semakin tinggi pendapatan perkapita maka tingkat kemiskinan tinggi dan memiliki pengaruh secara signifikan. Ulfa (2015) menguji pengaruh PDRB dan PAD terhadap tingkat kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil PDRB dan PAD signifikan dengan elastisitas negatif terhadap kemiskinan.

2.7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pendahuluan yang sebelumnya telah dijelaskan serta diperkuat dengan penelitian terdahulu, maka penulis menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah penulis

3. Metodologi

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia. Cakupan penelitian penelitian ini adalah 33 provinsi di Indonesia yang terdiri dari 434 kabupaten/kota dengan series data tahun 2015-2018.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya adalah data runtut waktu (*time series*) yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni cara memperoleh data dengan mempelajari dan menyelidiki dokumen-dokumen yang sesuai.

3.2. Model Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan di Indonesia sedangkan variabel independennya adalah Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Dana Bagi Hasil dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat bantu *EViews* versi 9.

3.2.1. Perumusan Model

Analisis penelitian ini menggunakan model persamaan regresi data panel. Data panel adalah data yang diperoleh dengan menggabungkan antara data *cross section* dan data *time series*. Berikut rumus regresi data panel jika ditulis dalam fungsi matematis.

$$TK = \beta_0 + \beta_1.DBH + \beta_2.DAK + \beta_3.DD + \beta_4.PDRB + e$$

Penjelasan Simbol :

TK = Tingkat Kemiskinan

β_0 = Konstanta (*intercep*)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
DBH	= Dana Bagi Hasil
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DD	= Dana Desa
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto
e	= error

Terdapat tiga jenis teknik dalam menganalisis data panel yaitu model dengan metode *Ordinary Least Squares (Common Effect)*, model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*. Dan selanjutnya untuk tahap pemilihan terhadap model panel yang telah dihasilkan, terdapat beberapa uji yang dilakukan:

3.2.2. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih regresi yang diuji itu berbeda. Uji Chow ini digunakan untuk memilih model *Pooled Least Squared* dan *Fixed Effect*. Hipotesa dalam uji chow ini adalah:

H_0 : model *Pooled Least Square* (PLS) lebih baik

H_a : model *Fixed Effect* lebih baik.

Kesimpulan dari Uji Chow ini adalah jika hasil prob. > F lebih kecil dari nilai α (5 persen), maka H_0 akan ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain model *Fixed Effect* lebih baik. Sebaliknya, jika hasil prob. < F lebih besar dari nilai α , maka H_0 akan diterima dan H_a ditolak.

3.2.3. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Hipotesa dalam Uji Hausman ini adalah:

H_0 : model *random effect* lebih baik

H_a : model *fixed effect* lebih baik

Kesimpulan dari Uji Hausman adalah jika prob dari *Chi-square* > 0,05 maka H_0 diterima model yang digunakan adalah *random effect*. Sebaliknya jika prob < 0,05 maka model yang digunakan *fixed effect*.

3.2.4. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM dilakukan untuk memilih antara *Pooled least Squared* atau *Random Effect*. Hipotesa dalam uji LM ini adalah:

Ho : model *Pooled Least Squared* lebih baik

Ha : model *random effect* lebih baik

Kesimpulan dari hasil pengujian ini adalah jika hasil prob $< \alpha$ (0,05) maka ho ditolak, yang artinya model *random effect* lebih baik, dan sebaliknya.

3.3. Uji Statistik

Berdasarkan hasil dari regresi didapatkan hasil besarnya koefisien determinasi, uji F, dan Uji t.

3.3.1. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin tinggi nilai *R-Squared* berarti model dikatakan semakin baik karena semakin besar keragaman variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel independen. Nilai *adjusted R-Squared* juga berguna untuk menentukan model terbaik jika penelitian memiliki berbagai alternatif model. Model terbaik yang dipilih berdasarkan nilai *adjusted R-Square* yang terbesar, dengan asumsinya model tidak melanggar kriteria ekonometrik. Nilai R^2 biasanya dinyatakan dalam hitungan persen. Nilai *adjusted R-Squared* berkisar antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$) dimana semakin mendekati 1 maka semakin dekat pula hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau dapat dikatakan model tersebut adalah baik.

3.3.2. Uji Simultan (*F-Test*)

Uji F digunakan untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan koefisien persamaan regresi signifikan dalam menentukan nilai dari variabel endogen. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap

variabel dependen pada α tertentu. Uji F juga dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan membandingkan F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai prob. F lebih kecil dari α terbesar yang digunakan.

3.3.3. Uji Parsial (*T-Test*)

Uji t digunakan untuk membuktikan bahwa koefisien dari masing-masing variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Sama seperti uji F, uji t dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel atau membandingkan probabilitas t dengan α . Variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen jika nilai t hitung lebih besar dari t-tabel atau nilai probabilitas t lebih kecil dari α terbesar yang digunakan.

4. Hasil dan Pembahasan

Pemilihan metode terbaik dalam metode analisis data panel dilakukan dengan pengujian statistik melalui *Chow Test* dan *Hausman Test*.

4.1. Uji Chow

Berdasarkan hasil metode Uji *Chow Test* menunjukkan nilai probabilitas dari *Cross-Section Chi-Square* sebesar $0.0000 < 0.05$, H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya apabila pada *Chow test* H_0 ditolak, maka dilanjutkan dengan *Hausman Test*.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	264.300485	(433,1298)	0.0000
Cross-section Chi-square	7795.547281	433	0.0000

Sumber: output regresi EViews 9, 2019

4.2. Uji Hausman

Berdasarkan hasil estimasi model dengan metode *Fixed Effect* dan *Random Effect*, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian *Hausman Test*. Uji *Hausman* dilakukan untuk memilih kesesuaian model menggunakan *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	39.703743	4	0.0000

Sumber: output regresi EViews 9, 2019

Hasil dari *Hausman Test* menunjukkan nilai probabilitas dari *Cross-Section Random* sebesar $0.0000 < 0.05$, H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah *Fixed Effect Model*. Kedua hasil pengujian menunjukkan *Fixed Effect Model*, maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 3. Kesimpulan Hasil Uji Chow Test dan Hausman Test

Method	Effect Test	Prob.	Hyphotesis	Conclusion
Chow Test	Cross-Section Chi-Square	0.0000	H_0 Rejected	Fixed Effect Model
Hausman Test	Cross-Section Random	0.0000	H_0 Rejected	Fixed Effect Model

Sumber: output regresi EViews 9, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi *Fixed Effect Model* yang digunakan dalam penelitian ini maka pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di kabupaten/kota di Indonesia diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Kesimpulan Pengaruh Variabel Independen Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan				
Variabel Independen	Koefisien	Prob.	Hipotesa	Kesimpulan
Dana Bagi Hasil	-4.45E-07	0.1680	Ha Ditolak	Tidak Signifikan
Dana Alokasi Khusus	3.40E-07	0.4739	Ha Ditolak	Tidak Signifikan
Dana Desa	-7.10E-06	0.0000	Ha Diterima	Signifikan
Produk Domestik Regional Bruto	-5.00E-05	0.0022	Ha Diterima	Signifikan
<i>R-Squared</i>	0.989848			
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.986431			
<i>F-Statistic</i>	289.6200			
<i>Prob (F-Statistic)</i>	0.000000			

Sumber: output regresi EViews 9, 2019

4.3. Pembahasan

4.3.1. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan nilai dari *Adjusted R-Squared* sebesar 0.9864 atau 98.64%. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 98.64%, sisanya sebesar 1.36% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Serta model dapat dikatakan *Goodness of Fit*.

4.3.2. Uji Simultan (*F-Test*)

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan nilai dari *Prob (F-Statistic)* sebesar $0.0000 < 0.05$, yang artinya H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan, seluruh variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan Produk Domestik

Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

4.3.3. Uji Parsial (*T-Test*)

Pengaruh DBH terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan probabilitas dari Dana Bagi Hasil sebesar $0.1680 > 0.05$, H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel DBH memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasu *et al* (2019), yang menunjukkan hasil DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila DBH meningkat akan menurunkan angka kemiskinan. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Seharusnya DBH sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan atau program pembangunan seperti meningkatkan sarana dan prasarana publik sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah.

Pengaruh DAK terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan probabilitas dari Dana Alokasi Khusus sebesar $0.4739 > 0.05$, H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sejalan dengan penelitian Jolianis (2016) yang meneliti mengenai Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel *Intervening*, dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Artinya semakin tinggi DAK yang diterima oleh pemerintah daerah belum dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. DAK yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk program pengentasan kemiskinan belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Sehingga ke depan diharapkan

Pemerintah dapat mengevaluasi penggunaan DAK agar kebijakan DAK selanjutnya dapat lebih efektif untuk pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan probabilitas dari Dana Desa sebesar $0.0000 < 0.05$, H_a diterima. Maka, Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien dari Dana Desa adalah negatif, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Abdullah (2017) yang melakukan penelitian mengenai analisis ekonomi kebijakan Dana Desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian tersebut menunjukkan variabel Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2016. Serta sejalan dengan penelitian Nafiudin (2018) yang telah meneliti mengenai Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang dimana dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Dana desa sudah mampu mengurangi angka kemiskinan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa program dana desa mempunyai dampak untuk mempermudah mobilitas masyarakat, saluran irigasi semakin baik yang bisa meningkatkan hasil panen, bertambahnya pengetahuan dan terciptanya kesadaran masyarakat. Dana Desa sudah mampu mengurangi angka kemiskinan, meskipun Dana Desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dari pada untuk pemberdayaan masyarakat.

Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan probabilitas dari PDRB sebesar $0.0022 < 0.05$, H_a diterima. Maka Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien dari PDRB adalah negatif, maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut

sejalan dengan penelitian Ulfa (2015), dimana PDRB berpengaruh signifikan dengan elastisitas negatif terhadap jumlah kemiskinan yang berarti meningkatnya PDRB akan menurunkan jumlah kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan Silastri (2017) yang menunjukkan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi pula tingkat pengeluaran dan permintaan agregat sehingga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang didapatkan dari penelitian terhadap pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Dana Bagi Hasil, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. DBH tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia
2. DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia
3. Dana Desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia.
4. PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia.

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah *pertama*, pengalokasian Dana Desa kepada pemerintah kabupaten dan kota mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, sehingga perlu terus adanya dukungan kebijakan dari pemerintah dalam pemanfaatan Dana Desa agar dana dapat digunakan secara optimal dan terarah bagi kesejahteraan masyarakat wilayahnya. *Kedua*, diharapkan setiap pemerintah daerah hendaknya mendorong dan memacu peningkatan PDRB sehingga tingkat kemiskinan di wilayahnya

dapat terus diturunkan. *Ketiga*, untuk peneliti berikutnya dapat menambah variabel lain seperti penerimaan daerah lainnya maupun dapat menggunakan variabel non keuangan seperti tingkat pengangguran, serta dapat memperluas cakupan pada objek penelitian dan memperpanjang rentang waktu penelitian.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2014-2018*.
- Chambers, Robert. (1983). *Rural Development : Putting the Last First*. London. Longman Group Ltd.
- Giovanni, Ridzky. (2018). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016*. Universitas Negeri Semarang.
- Halim, Abdul. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UGM.
- Jolianis. (2016). *Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening*. Sumatera Barat. STKIP PGRI.
- KOMPAK. (2017). *Analisa Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*. Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia.
- Nafiudin, Muhammad. (2018). *Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang*.
- Rasu, K.J.E et al. (2019). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi.
- Santosa, Budi. (2013). *Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia*.
- Sari, Intan Mala dan M. Faisal Abdullah. (2017). *Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Saskia. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Tenggara*. Universitas Hassanudin.

- Silastri, Novri. (2017). *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Riau.
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua)*. Yogyakarta. STIM YKPN.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi pertama. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Suparmako. (2011). *Keuangan Negara*. Edisi keenam. BPFE. Yogyakarta.
- Ulfa, Nurul Amalia. (2015). *Pengaruh PDRB dan PAD Terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI TERHADAP KEJADIAN *STUNTING* DI INDONESIA

The Effect of Socio Economic on The Stunting in Indonesia

Ade Nurul Aida

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: ade.aida@dpr.go.id

Abstract

This analysis aims to determine the effect of socioeconomic conditions on the incidence of stunting in Indonesia during 2015-2018. The analysis uses the fixed effect method with secondary data in the form of panels consisting of 34 provinces in Indonesia sourced from the Indonesian Ministry of Health and the Central Statistics Agency (BPS). Based on the results of the analysis shows that the socioeconomic status of family income and conditions of poverty levels, as well as infants who receive exclusive breastfeeding, the level of protein consumption, households that have access to proper sanitation simultaneously have an influence on stunting. In addition, this analysis also shows that family income has a negative and significant effect on stunting, so it can be concluded that the greater the income in the family, the smaller the stunting event that occurs. While the poverty rate has a negative effect on the incidence of stunting, statistically the effect is not significant.

Keywords: *Stunting, Socioeconomic conditions, family income, conditions of poverty*

1. Pendahuluan

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita dan menjadi perhatian dunia saat ini. Pengurangan *stunting* sebanyak 40 persen pada balita menjadi target pertama dari 6 target yang ditetapkan dalam *the global nutrition target 2025*, dan indikator utama dalam SDG's of Zero Hunger (WHO, 2014). Secara global sebanyak 22 persen balita (anak dibawah usia 5 tahun) mengalami *stunting* dengan nilai rata-rata *stunting* sebesar 21,9 persen pada tahun 2018. Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara merupakan kawasan kedua setelah afrika yang memiliki prevalensi balita *stunting* tertinggi yaitu 31,9 persen, sedangkan prevalensi balita *stunting* di kawasan afrika sebesar 33,1 persen. Indonesia sendiri menjadi negara ke 6 dengan jumlah balita *stunting*

tertinggi di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara setelah Bangladesh (42 persen) dan India (37,9 persen), dengan nilai prevalensi *stunting* tahun 2013 sebesar 36,4 persen (WHO, 2019). Di tahun 2018 pun angka prevalensi balita di Indonesia masih jauh berada diatas ambang yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20 persen, yakni berada pada angka 30,8 persen, di mana kontribusi tertinggi berada pada provinsi NTT sebesar 42,7 persen. Atas kejadian tersebut, *stunting* pun menjadi masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia mengingat angka prevalansi *stunting* tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk (Kemenkes, 2018)

Menurut UNICEF, *stunting* didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus dua (*stunting* sedang dan berat) dan minus tiga (*stunting* kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Terjadinya *stunting* pada balita seringkali tidak disadari. Biasanya *stunting* banyak diketahui oleh orang tua/keluarga ketika balita berusia dua tahun ke atas. Dimana tinggi badan balita tersebut berada dibawah tinggi badan normal seusianya (Kemenkes, 2012).

Stunting terjadi sebagai akibat dari asupan nutrisi yang tidak sesuai dan tidak dapat dipulihkan selama 1000 hari pertama kehidupan. *Stunting* juga disebabkan oleh malnutrisi yang kronis pada tahap awal kehidupan bahkan sebelum kelahiran, yang dapat menyebabkan kurang optimalnya perkembangan fisik dan kognitif, meskipun faktor gen dalam sel menunjukkan potensi perkembangan fisik tumbuh secara normal (World Bank 2015, Barker 2007 dalam Renyoet et.al. 2016). Dampak *stunting* dalam jangka panjang juga menyebabkan kemampuan produktif berkurang, kesehatan yang buruk, peningkatan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes. (WHO, 2014), penurunan prestasi akademik (Picauly & Toy, 2013) dan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular (Unicef Indonesia, 2013). Anak-anak yang terhambat pertumbuhannya sebelum berusia 2 tahun pun memiliki hasil yang lebih buruk dalam emosi dan perilakunya pada masa remaja akhir (Walker et al 2007). Oleh karena itu *stunting* merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan berpengaruh pada pengembangan potensi bangsa (Unicef, 2013; Unicef Indonesia, 2013). Penelitian juga membuktikan bahwa *stunting* menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja yakni, mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20 persen, memperburuk kesenjangan/*inequality*, mengurangi 10 persen dari total pendapatan seumur

hidup, dan menjadikan kemiskinan antar-generasi (Kementerian Keuangan diolah dari laporan World Bank Investing in Early Years brief, 2016)

Beberapa penelitian dan laporan beberapa lembaga menunjukkan bahwa pemberian ASI non-eksklusif selama 6 bulan pertama, kelahiran prematur, panjang kelahiran bayi yang kurang (pendek), ibu yang pendek, akses yang buruk ke perawatan kesehatan, anak yang berasal dari rumah tangga dengan jamban yang tidak diperbaiki dan tidak dirawat juga berisiko lebih tinggi dan menjadi faktor penentu terjadinya *stunting* (Beal Ty et al, 2017; Kemenkes 2018; Rahmad et al. 2016). Faktor-faktor sosial ekonomi seperti pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, dan juga pendidikan orang tua berpengaruh terhadap kejadian *stunting* yang mengarah pada buruknya kualitas dan kuantitas asupan gizi serta meningkatnya insiden penyakit (Pehlke et al, 2016; WHO, 2017, Beal Ty et al, 2017; Keino S. et.al, 2014). Sementara berdasarkan hasil riskesdas 2013, kemiskinan, sosial dan budaya, peningkatan paparan terhadap penyakit infeksi, kerawanan pangan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga menjadi penyebab terjadinya *stunting*.

Faktor tersebut diatas juga sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia seperti di Surakarta, Yogyakarta dan Gunung Kidul, Padang Timur (Kota Padang), dan Banda Aceh dan Sumatera yang mengemukakan bahwa faktor sosial ekonomi seperti pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan kemiskinan berpengaruh terhadap kejadian *stunting* (Utami et al, 2017; Julia et al, 2004; Setiawan et.al, 2018; Rahmad et al, 2016; Oktarina dan Sudiarti, 2013). Sehubungan dengan penelitian tersebut hanya berfokus pada suatu daerah tertentu saja dengan menggunakan metode pengumpulan data primer melalui kuesioner. Untuk itu penulis akan mengkaji bagaimana kondisi *stunting* di Indonesia saat ini dan mengkaji hubungan faktor-faktor tersebut terhadap *stunting* dalam lingkup Indonesia secara keseluruhan dalam beberapa periode waktu dan mengetahui apakah faktor tersebut juga memiliki hubungan yang sama dengan hasil temuan penelitian di beberapa daerah tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap *Stunting*

Menurut UNICEF, *stunting* didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus dua (*stunting* sedang dan berat) dan minus tiga (*stunting* kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak

keluaran WHO. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya kondisi sosial ekonomi. Menurut WHO, *stunting* merupakan cerminan dari kondisi sosial ekonomi suatu negara. Tingkat *stunting* yang tinggi dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk dan penurunan tingkat *stunting* nasional biasanya menunjukkan perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi secara keseluruhan suatu negara. Kondisi sosial ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan dalam memenuhi asupan bergizi dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita (Kemenkes, 2018). Faktor-faktor sosial ekonomi seperti pendapatan keluarga dan jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap kejadian *stunting* yang mengarah pada buruknya kualitas dan kuantitas asupan gizi serta meningkatnya insiden penyakit (Pehlke et al, 2016; WHO, 2017; Beal Ty et al, 2017; Keino S. et.al, 2014).

Pendapatan keluarga dalam hal ini terkait dengan penyediaan makanan keluarga, akses makanan dalam keluarga dan distribusi makanan yang memadai untuk keluarga. Daya beli untuk makanan bergizi dalam keluarga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, karena dalam menentukan jenis pangan yang akan dibeli tergantung pada tinggi rendahnya pendapatan. Dengan pendapatan yang tinggi dapat dimungkinkan terpenuhinya kebutuhan makanan seluruh anggota keluarga khususnya makanan dengan kualitas dan nutrisi yang baik untuk asupan gizi keluarga (Omondi dan Kirabira, 2016). Namun sebaliknya, tingkat pendapatan keluarga yang rendah mengakibatkan rendahnya daya beli pangan rumah tangga (Adriani dalam Illahi, 2017). Daya beli terhadap bahan pangan yang rendah menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan zat gizi balita (Ranoor, 2010). Penelitian menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pendapatan berpengaruh terhadap adanya kejadian *stunting* (Keino et al, 2014; Tiwari, 2014; Pehlke et al, 2016; Utami et al, 2017; Setiawan et.al, 2018; Illahi, 2017; Rahmad et al, 2016). Bahkan menurut Ni'mah K dan Nadhiroh SR (2015) keluarga dengan pendapatan rendah berisiko 3,25 kali memiliki anak dengan *stunting*.

Selain pendapatan, kemiskinan juga menjadi salah satu parameter kemampuan ekonomi keluarga. Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa kemiskinan merupakan penyebab tingginya masalah *stunting* pada balita (Julia M et al, 2004). Kleynhans et al. (2006) pun menyimpulkan bahwa keluarga yang mempunyai keterbatasan ekonomi akan sangat sulit untuk pemenuhan bahan pangan dalam rumah tangga, hal ini jika berlangsung lama secara terus menerus berdampak terhadap pertumbuhan anak.

2.2 Pengaruh Determinan Lain terhadap *Stunting*

Menurut Unicef, terjadinya *stunting* dimulai dari pra konsepsi kekurangan gizi dan anemia pada saat gadis remaja yang kemudian menjadi seorang ibu, dan diperburuk dengan nutrisi dan asupan yang diterima oleh bayi serta kebersihan dan sanitasi yang juga tidak mendukung. Untuk itu, Nutrisi yang diperoleh sejak bayi lahir tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan termasuk risiko terjadinya *stunting*. Gagalnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif dapat menjadi salah satu faktor terjadinya *stunting* (Kemenkes, 2018). Beberapa penelitian juga mengemukakan bahwa pemberian ASI eksklusif berpengaruh terhadap kejadian *stunting* (Beal Ty et al., 2017; Rahmad et al. 2016). Muchina dan Waithaka (2010) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa, praktik pemberian ASI dan status gizi anak-anak dengan risiko menjadi kurus dan pendek lebih tinggi di antara anak-anak yang telah dihentikan menyusui dan mereka yang belum pernah disusui secara eksklusif selama enam bulan pertama. Untuk itu, tentunya pemberian ASI yang baik oleh ibu akan membantu menjaga keseimbangan gizi anak sehingga tercapai pertumbuhan anak yang normal sesuai perkembangannya.

Di samping pemberian asi, asupan zat gizi seperti protein sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sesuai dengan grafik pertumbuhannya agar tidak terjadi gagal tumbuh (*growth faltering*) yang dapat menyebabkan *stunting* (Kemenkes, 2018). Protein adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh, membangun struktur tubuh (otot, kulit, dan tulang) serta sebagai pengganti jaringan yang rusak (Utami, 2017). Hubungan erat antara protein dan pertumbuhan menyebabkan anak yang kekurangan asupan protein akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat daripada anak-anak lain yang jumlah asupan proteinnya cukup (Almatsier dalam Utami 2017). Studi yang dilakukan oleh Esfarjani et al (2013) juga menemukan bahwa, terdapat pengaruh positif dan signifikan secara statistik dari asupan gizi (karbohidrat dan protein) terhadap risiko *stunting* pada anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan karbohidrat dan protein yang tinggi terkait dengan pengurangan risiko pengerdilan pada anak-anak sebesar 0,31 kali. Studi yang dilakukan oleh Xiaoli et al. (2009) juga menunjukkan bahwa penyebab kejadian *stunting* di Cina adalah defisiensi energi dan protein yang telah berlangsung jangka panjang

Selain dari kondisi Ibu selama dan setelah kehamilan, serta kondisi bayi dan balita. Kondisi lingkungan juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap

kejadian *stunting*, seperti keadaan sanitasi yang layak atau tidak. Akses sanitasi yang tidak layak atau buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi yang tentunya berakibat dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan maka dapat mengakibatkan *stunting* (Kemenkes, 2013). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa layak atau tidaknya sanitasi, berpengaruh terhadap kejadian *stunting* (Beal Ty et al., 2017; Nadiyah et.al.,2014)

3. Metodologi Analisis

3.1 Metode Empiris

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap kejadian *stunting* di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase kejadian *stunting* di Indonesia. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah besarnya pendapatan rumah tangga/keluarga yang diprosikan dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dalam satuan juta rupiah, tingkat kemiskinan, bayi yang mendapat asi eksklusif, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak yang dihitung dalam satuan persen, serta tingkat konsumsi protein dalam satuan gram.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahunan dengan periode waktu dari tahun 2015 hingga 2018 dari 34 Provinsi di Indonesia. Data yang digunakan meliputi data persentase kejadian *stunting* di Indonesia produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, persentase jumlah penduduk miskin, persentase bayi yang mendapat asi eksklusif dan jumlah tingkat konsumsi protein serta persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Di mana data tersebut diperoleh dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik

3.3 Metode Analisis

Analisis ini merupakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Dalam analisis ini juga digunakan model persamaan regresi data panel untuk menganalisis

pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap kejadian *stunting* di Indonesia. model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$STUNTING = \alpha + \beta_1 PK + \beta_2 PM + \beta_3 ASI + \beta_4 PROTEIN + \beta_5 SANITASI$$

dimana:

STUNTING	= kejadian <i>stunting</i> di Indonesia (persen)
PK	= pendapatan Keluarga (juta rupiah)
PM	= tingkat kemiskinan (persen)
ASI	= bayi yang mendapat asi eksklusif (persen)
PROTEIN	= tingkat konsumsi protein (gram)
SANITASI	= rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (persen)

Model di atas dimaksudkan untuk melihat pengaruh pendapatan rumah tangga/keluarga yang diproksi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dalam satuan juta rupiah, tingkat kemiskinan yang dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin, bayi yang mendapat asi eksklusif, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak yang dihitung dalam satuan persen, serta tingkat konsumsi protein dalam satuan gram terhadap *stunting*.

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FE), dan Random Effect Model (RE). Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan antara lain: Uji Chow, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier.

Di dalam model regresi ini, setelah didapatkan model terbaik untuk digunakan dalam analisis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka model regresi linear tersebut dikatakan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*). Syarat tersebut dapat dipenuhi melalui Uji Asumsi Klasik.

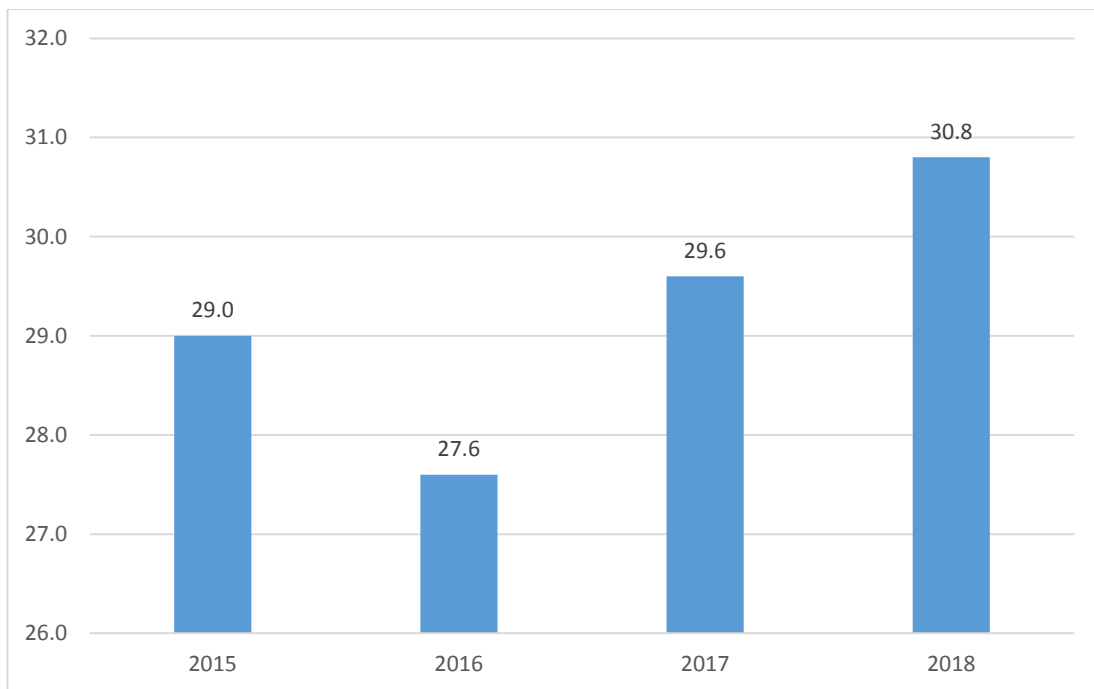
4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Analisis Deskriptif

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi utama yang dihadapi Indonesia. *Stunting* memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk (Kemenkes, 2018). Tahun 2016 merupakan tahun dimana angka prevalensi *stunting* mengalami nilai terendah sepanjang 4 tahun terakhir. Dan sejak tahun tersebut hingga tahun

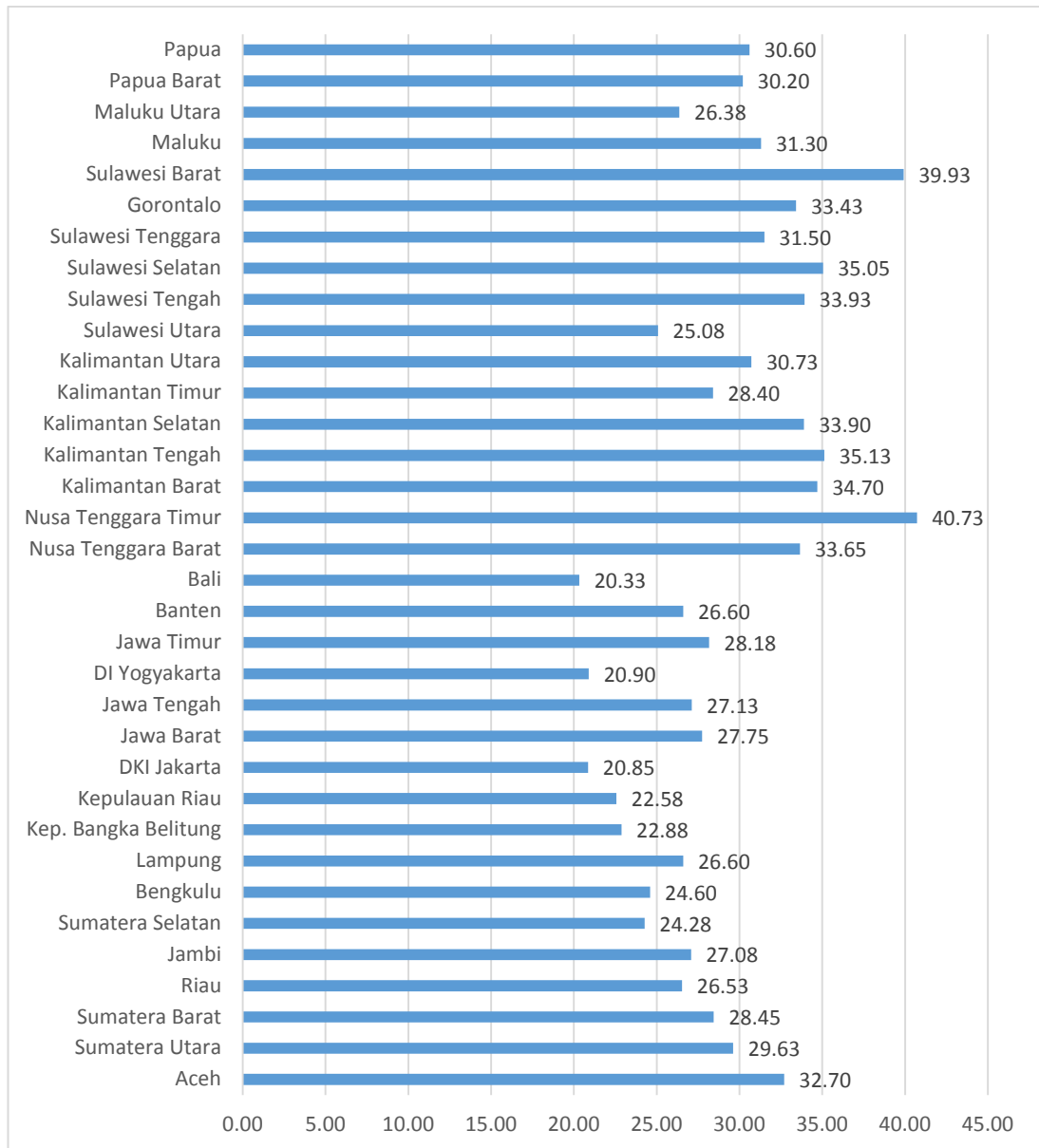
2018 angka prevalensi *stunting* cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2018 prevalensi *stunting* berada pada angka 30,8 persen (11,5 persen sangat pendek dan 19,3 pendek). Angka tersebut meningkat sebesar 4,1 persen dari tahun sebelumnya sebesar 29,6 persen (gambar 1). Hal ini pun menunjukkan bahwa secara nasional masalah *stunting* di Indonesia tergolong kronis. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi *stunting* lebih dari 20 persen.

Gambar 1. Prevalensi Balita Stunting di Indonesia Tahun 2015-2018 (Persen)



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan, Berbagai Tahun

Berdasarkan Rata-rata Prevalensi Balita *Stunting* per Provinsi sepanjang tahun 2015-2018, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka prevalensinya melebihi angka nasional, bahkan menempatkan NTT sebagai provinsi yang memiliki angka prevalensi tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 40,72 persen (16,82 sangat pendek dan 23,9 pendek). Sedangkan provinsi dengan rata-rata persentase terendah adalah Bali sebesar 20,33 persen, disusul DKI Jakarta sebesar 20,85 persen (gambar 2).

Gambar 2. Rata-Rata Prevalensi Balita Stunting per Provinsi Tahun 2015-2018 (Persen)

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan, Berbagai Tahun

Dengan melihat masih tingginya angka prevalensi *stunting* di Indonesia, tentunya *Stunting* masih menjadi tantangan pemerintah di bidang kesehatan ke depan. *Stunting* atau tinggi badan di bawah standar pada umur tertentu, yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama merupakan salah satu parameter penting bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam The Copenhagen Consensus 2012, dimana para ahli dalam panel tersebut mengidentifikasi bahwa gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara 2 hingga 3 persen per tahun. Dengan menginvestasi

USD1 pada gizi dapat memberikan hasil USD30 dalam bentuk peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi.

4.2 Analisis Model

Untuk mendapatkan model estimasi yang tepat, terdapat beberapa pengujian yang dilakukan yakni melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Berdasarkan hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Berdasarkan uji tersebut dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah *fixed effect model*. Setelah diketahui bahwa pada uji Chow test H_0 ditolak, maka dilanjutkan dengan Uji Hausman.

Pada Uji Hausman, diperoleh hasil bahwa probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* tepat digunakan. Dari Kedua hasil pengujian dimuka, menunjukkan bahwa *fixed effect model* merupakan model terbaik yang digunakan.

Setelah ditentukan bahwa *fixed effect model* merupakan model yang paling tepat untuk digunakan dalam analisis ini, maka dilakukan uji asumsi klasik terhadap persamaan tersebut. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa regresi dengan *model fixed effects* tersebut diperoleh nilai korelasi antar variabel $< 0,8$, yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, sehingga hasil estimasi dapat digunakan.

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan estimasi *fixed effects model* dan melalui beberapa proses tahapan di muka, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Analisis Data

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob
C	13.32133	-0.051880	0.0000
PK	-0.428549	-4.424787	0.0000
PM	-0.002516	-0.184676	0.8539
ASI	-0.005057	-0.145259	0.8848
PROTEIN	-0.415970	-0.891369	0.3750
SANITASI	-0.051880	-0.457421	0.6484
R ² 0.839745		F-stat	12.01382
		Prob (F-stat)	0.000000

Sumber: data diolah Eview 8.0

Pada tabel di atas, diketahui bahwa variabel independen pendapatan keluarga (PK), tingkat kemiskinan (PM), bayi yang mendapat asi eksklusif (ASI), tingkat konsumsi protein (protein), rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (sanitasi) secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen *stunting* yang ditunjukkan dengan nilai Prob (F-stat) sebesar 0.000000.

Pada hasil regresi ini juga diketahui, bahwa secara parsial pendapatan keluarga (PK) berpengaruh negatif dan signifikan yang dibuktikan dengan prob sebesar $0.0000 < 5\%$ terhadap kejadian *stunting*, sehingga dapat disimpulkan semakin besar pendapatan dalam keluarga, maka akan semakin kecil kejadian *stunting* yang terjadi. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian, bahwa tinggi rendahnya pendapatan berpengaruh terhadap adanya kejadian *stunting* (Keino et al, 2014; Tiwari, 2014; Pehlke et al, 2016; Utami et al, 2017; Setiawan et.al, 2018; Illahi, 2017; Rahmad et al, 2016)

Sementara itu, variabel tingkat kemiskinan (PM) secara parsial juga berpengaruh negatif terhadap kejadian *stunting*, namun secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan sebagaimana ditunjukkan dengan nilai prob sebesar $0.8539 < 5\%$. Tidak signifikannya pengaruh tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan gizi. Berdasarkan hasil riset yang dikemukakan oleh Prof Fasli Jalal, bahwa sebanyak 30 persen keluarga kaya mengalami *stunting* sebagai akibat dari kurangnya kesadaran dan pola asuh yang salah dalam mencukupi gizi (Ikhwan, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa yang mendasari terjadinya masalah gizi tersebut bukan hanya kemiskinan, namun juga kurangnya pengetahuan masyarakat akan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi yang optimal (Kemenkes, 2019). Pengetahuan gizi orang tua khususnya ibu memang menjadi salah satu faktor risiko anak mengalami *stunting* (Ni'mah K. dan Nadhiroh S.R., 2015)

Selain variabel tersebut, dalam analisis ini juga ditemukan variabel lainnya yang berpengaruh dengan *stunting*. Bayi yang mendapat asi eksklusif (ASI) juga diketahui memiliki pengaruh terhadap kejadian *stunting* meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan sebagaimana ditunjukkan dengan nilai prob sebesar $0.8848 < 5\%$. Hal ini disebabkan oleh keadaan *stunting* tidak hanya ditentukan oleh faktor status pemberian ASI eksklusif, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti: kualitas Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), kecukupan asupan gizi yang diberikan kepada anak setiap hari, serta status kesehatan bayi (Hindrawati N, 2018). Sementara itu, kebutuhan nutrisi dalam tahap pertumbuhan yang

diberikan pada bayi 6 bulan keatas, tidak akan tercukupi jika hanya melalui asi. Untuk itu dibutuhkan makanan pelengkap ASI (MPASI) yang mampu menutupi kebutuhan nutrisi (WHO)

Sama halnya dengan hasil temuan bayi yang mendapat asi eksklusif (ASI), bahwa jumlah tingkat konsumsi protein dan sanitasi juga berpengaruh dengan adanya kejadian *stunting*, meskipun pengaruh tersebut secara statistik tidak signifikan yang dibuktikan dengan prob masing-masing sebesar 0.3750 dan 0.6484 > 5% terhadap kejadian *stunting*. Tidak signifikkannya pengaruh tersebut disebabkan oleh bahwa keadaan *stunting* tidak hanya ditentukan oleh faktor atau variabel yang diujikan dalam analisis ini, namun banyak variabel atau faktor lain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya seperti: kualitas Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), kecukupan asupan gizi yang diberikan kepada anak setiap hari, serta status kesehatan bayi.

5. Penutup

Berdasarkan analisa dan pembahasan sebelumnya, di peroleh hasil sebagai berikut: Pertama, pendapatan keluarga, tingkat kemiskinan, bayi yang mendapat asi eksklusif, tingkat konsumsi protein, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak secara simultan memiliki pengaruh terhadap *stunting*. Kedua, pendapatan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *stunting*, sehingga dapat disimpulkan semakin besar pendapatan dalam keluarga, maka akan semakin kecil kejadian *stunting* yang terjadi. Ketiga, status sosial (tingkat kemiskinan) berpengaruh negatif terhadap kejadian *stunting*, namun secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan. Tidak signifikkannya pengaruh tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan gizi. Keempat, persentase bayi yang mendapat asi eksklusif (ASI) juga diketahui memiliki pengaruh terhadap kejadian *stunting* meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh keadaan *stunting* tidak hanya ditentukan oleh faktor status pemberian ASI eksklusif, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti: kualitas Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), kecukupan asupan gizi yang diberikan kepada anak setiap hari, serta status kesehatan bayi. Kelima, Sama halnya dengan hasil temuan persentase bayi yang mendapat asi eksklusif (ASI), bahwa jumlah tingkat konsumsi protein dan sanitasi juga berpengaruh dengan adanya kejadian *stunting*, meskipun pengaruh tersebut secara statistik tidak signifikan Tidak signifikkannya pengaruh tersebut disebabkan bahwa keadaan *stunting* tidak hanya

ditentukan oleh faktor atau variabel yang diujikan dalam analisis ini, namun banyak variabel atau faktor lain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan memperhatikan pembahasan dan hasil analisa sebelumnya, terlihat bahwa *Stunting* masih menjadi tantangan pemerintah di bidang kesehatan kedepannya. *Stunting* atau tinggi badan di bawah standar pada umur tertentu, yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama merupakan salah satu parameter penting bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam The Copenhagen Consensus 2012, dimana para ahli dalam panel tersebut mengidentifikasi bahwa gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara 2 hingga 3 persen per tahun. Dengan menginvestasi USD1 pada gizi dapat memberikan hasil USD30 dalam bentuk peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktivitas ekonomi. Pemerintah sendiri saat ini mengalokasikan anggaran terkait penanganan *stunting* sebesar Rp94.346,9 miliar, meskipun yang relevan dalam mendukung penurunan sebesar Rp29.005,8 miliar (Kemenkeu,2019). Dengan investasi dan alokasi tersebut, diharapkan lebih agar mampu menekan angka prevalensi dan memberikan peningkatan kualitas di berbagai bidang khususnya kesehatan.

Stunting bukan tidak mungkin dicegah atau bahkan dikoreksi. Terdapat beberapa hal yang dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan *stunting* selain dari kesadaran orang tua maupun keluarga. Peran pemerintah dalam hal ini amat diperlukan khususnya untuk daerah/provinsi yang memiliki angka prevalensi yang tinggi, diantaranya: Pertama, komitmen Kementerian dan Lembaga terkait intervensi *stunting* baik di pusat maupun daerah, karena masalah *stunting* merupakan masalah yang multisektoral. Kedua, integrasi, sinkronisasi dan penguatan kerjasama antara program dan lintas sektor. Ketiga, sosialisasi serta edukasi terkait pentingnya kesadaran masyarakat terkait gizi, khususnya dampak kekurangan gizi dalam jangka panjang (*stunting*). Keempat, pembangunan akses pangan dan gizi serta infrastruktur air bersih dan sanitasi.

Mengingat masih terbatasnya analisa ini, salah satunya keterbatasan data atau variabel yang digunakan. Untuk itu dibutuhkan analisa lebih lanjut dengan menambah, mengurangi atau mengganti variabel-variabel tersebut dengan variabel-variabel lain yang relevan dengan *stunting* tentunya dengan *range* waktu yang lebih banyak.

Daftar Pustaka

- Wahyudi, Ikhwan. (2019). *Institut Gizi Indonesia : 30 persen anak keluarga kaya alami stunting*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/935799/institut-gizi-indonesia-30-persen-anak-keluarga-kaya-alami-stunting>.
- Beal, Ty. Et.al. 2018. *A review of child stunting determinants in Indonesia*. Matern Child Nutr. 2018;14:e12617. <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>.
- BPS. 2016. Statistik Indonesia 2016.
- . 2017. Statistik Indonesia 2017.
- . 2018. Statistik Indonesia 2018.
- . 2019. Statistik Indonesia 2019.
- Ernawati, A. (2006). *Hubungan Faktor Sosial Ekonomi, Higiene Sanitasi Lingkungan, Tingkat Konsumsi dan Infeksi dengan status Gizi Anak Usia 2-5 Tahun di Kabupaten Semarang Tahun 2003*.
- Esfarjani F, Roustae R, Nashrabadi FM dan Ezmaillzadeh A. (2013). *Major Dietary Patterns in Relation to Stunting among Children in Tehran, Iran*. Journal Health and Population Nutrition 31 (2) : 202-210.
- Hindrawati N, Rusdiarti. (2018) *Gambaran riwayat pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada anak usia 6-24 bulan di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember*. JKAKJ: 2 (1): 1-7.
- Illahi, Rizki K. (2015). *Hubungan Pendapatan Keluarga, Berat Lahir, Dan Panjang Lahir Dengan Kejadian Stunting Balita 24-59 Bulan Di Bangkalan*. Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS Dr. Soetomo, Vol. 3 No. 1, April 2017 : 1 – 14.
- Ghozali, H. Imam dan Ratmono, Dwi. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan aplikasi dengan EvIEWS 8*. Universitas Diponegoro.
- Julia, M. et.al. (2004). *Influence of socioeconomic status on the prevalence of stunted growth and obesity in prepubertal Indonesian children*. Food and Nutrition Bulletin, Vol. 25, no. 4, The United Nations University.
- Keino S, Plasqui G dan Borne VD. (2014). *Determinants of stunting and overweight among young children and adolescents in sub-Saharan Africa*. Food and Nutrition Bulletin 35 (2): 167 – 178.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Advertorial Kesehatan Anak: Umur Sama, Kok Tinggi Beda*. Nova, edisi Juni Minggu kedua 2012
- _____. (2015). *Profil Kesehatan Indonesia 2015*.
- _____. (2016). *Profil Kesehatan Indonesia 2016*.
- _____. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia 2017*.
- _____. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia 2018*.
- _____. (2018). *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Semester I 2018.

- _____. (2019). *Gizi Seimbang, Prestasi Gemilang*. Warta Kesmas: Edisi 01 2019.
- Kementerian Keuangan. (2018). *DJA: Penanganan Stunting Terpadu Tahun 2018*.
- Kleynhans, I.C., Macintyre, U.E., Albertse, E.C. (2006). *Stunting Among Young Black Children and the Socio-Economic and Health Status of Their Mothers / Caregivers in Poor Areas of Rural Limpopo and urban Gauteng – the NutriGro Study*. South African J. Clin. Nutr. 19, 163–164.
- Muchina, E., Waithaka, P. (2010). *Relationship Between Breastfeeding Practices And Nutritional Status Of Children Aged 0-24 Months In Nairobi, Kenya*. African J. Food Agric. Nutr. Dev. 10, 2358–2378.
- Nadiyah, Briawan, D., Martianto, D. (2014). *Faktor Risiko Stunting Pada Anak Usia 0 — 23 Bulan Di Provinsi Bali, Jawa Barat, Dan Nusa Tenggara Timur*. J. Gizi dan Pangan 9, 125–132.
- Ni'mah K. dan Nadhiroh S.R. (2015). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita*. Media Gizi Indonesia, Vol. 10, No. 1 Januari–Juni 2015: hlm. 13–19.
- Oktarina Z. dan Sudiarti T. (2013). *Faktor Resiko Stunting pada Balita (24-59 Bulan) di Sumatera*. Jurnal Gizi dan Pangan: Vol 8, No 3 (2013).
- Omondi DO dan Kirabira P. (2016). *Socio-Demographic Factors Influencing Nutritional Status of Children (6-59 Months) in Obunga Slums, Kisumu City, Kenya*. Public Health Research 6 (2):69-75.
- Pehlke EL, Letona P, Hurley K dan Gittel-sohn J. *Guatemalan school food environment: impact on schoolchildren's risk of both undernutrition and overweight/obesity*. Health Promotion International 2016. 31: 542-550.
- Picauly I, Magdalena S. (2013). *Analisis determinan dan pengaruh stunting terhadap prestasi belajar anak sekolah di Kupang dan Sumba*.
- Purnasari, Galih. (2017). *Strategi Pencegahan Stunting melalui Perbaikan Gizi Remaja: Best Practise di Berbagai Negara*.
- Rahmad, A.H.A., dan Miko, Ampera. (2016). *Kajian Stunting pada Anak Balita Berdasarkan Pola Asuh dan Pendapatan Keluarga di Kota Banda Aceh*. Jurnal Kesmas Indonesia, Volume 8 No 2, Juli 2016, Hal 63-79.
- Ranoor, R.N.F. (2010). *Hubungan Faktor Sosio-Ekonomi, Tingkat Konsumsi, Status Infeksi, dan Status Imunitas dengan Status Gizi Balita*. Surabaya. Universitas Airlangga.
- Renyoet, Brigitte S. et.al. (2016). *Potensi Kerugian Ekonomi Karena Stunting Pada Balita Di Indonesia Tahun 2013*. Jurnal Gizi Pangan, November 2016, 11 (3):247-254.
- Setiawan, E. et.al. (2018). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018*. Jurnal Kesehatan Andalas. 2018; 7(2).
- Tiwari R. et.al. (2014). *Determinants of stunting and severe stunting among under-fives: evidence from the 2011 Nepal Demographic and Health Survey*. BMC Pediatrics 2014, 14:239.

- Unicef Indonesia. (2013). *Ringkasan Kajian Gizi Ibu dan Anak, Oktober 2012*. Diakses dari www.unicef.org.
- Unicef, (2013). *Improving Child Nutrition The achievable imperative for global progress*. Diakses dari www.unicef.org/media/files/nutrition_report_2013.pdf.
- Utami, Agustina D. et.al. (2017). *The Effect of Nutrient Intake and Socioeconomic Factor toward Stunting Incidence among Primary School Students in Surakarta*. Journal of Epidemiologi and Public Health (2017), 2(1): 1-10.
- Xiaoli W, Beng H, & Sufang G et al. (2009). *Stunting and overweight in the WHO child growth standard: malnutrition among children in poor area in China*. Public Health Nutrition, 12(11), 1991—1998.
- WHO. *Health situation and trend assessment*. Diakses dari http://www.searo.who.int/entity/health_situation_trends/data/nutrition_stunting-in-children/en/. 9 Oktober 2019.
- _____. *Nutrition: Complementary Feeding*. Diakses dari https://www.who.int/nutrition/topics/complementary_feeding/en/. 10 Oktober 2019.
- _____. (2014). *Stunting Policy Brief: Global Nutrition Targets 2025*.
- _____. (2019). *World Health Statistics data visualizations dashboard*. Diakses dari <https://apps.who.int/gho/data/node.sdg.2-2-viz-1?lang=en>.
- Worldbank. (2015). *Beban Ganda Malnutrisi Bagi Indonesia*. Diakses dari <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/04/23/the-double-burden-of-malnutrition-in-indonesia>.

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

The Effects of Local Government Spending on Governance Performance

Marihot Nasution

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: marihot.nasution@dpr.go.id

Abstract

This study examines how local government spending affects public services provided to the public. The performance of public service delivery is measured by the achievement of the performance of local government operations which are the object of evaluation in the Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) which is carried out annually by the Ministry of Home Affairs. Whereas government expenditure is regional government expenditure per function per capita. Using a sample of 94 local governments, this study took the period 2014 to 2018. The results showed that per capita expenditure function had a positive effect on the performance of local government administration for regional government authority in education, health and infrastructure (housing and public facilities). The capital expenditure ratio is also tested to see the effect of capital expenditure on the performance of public service delivery. In testing the performance of the health and infrastructure sectors, this ratio has a significant negative effect, but for the performance of the education sector this ratio has no significant effect. This means that capital expenditures incurred by local governments have not been effective in meeting the needs of public services for the community, especially in the field of education.

Keywords: *Local government spending; Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD); capital expenditure ratio*

1. Pendahuluan

Bagaimana pengeluaran publik memengaruhi hasil pelayanan publik? Pertanyaan ini telah menghasilkan sejumlah besar pekerjaan akademik selama bertahun-tahun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran publik memiliki dampak tidak langsung pada hasil pelayanan publik. Hanushek (1995) meninjau pengalaman banyak negara berkembang di seluruh dunia dan menemukan hubungan antara pengeluaran publik dan hasil pendidikan dari berbagai jenis tingkat pendidikan. Mingat dan Tan (1992, 1998) juga menemukan hubungan antara pengeluaran publik dan hasil pendidikan di sejumlah sampel

negara maju dan berkembang. Filmer dan Pritchett (1999) menunjukkan bahwa belanja publik hanya berkorelasi sangat lemah dengan hasil kesehatan untuk sampel *cross-section* 100 negara berkembang.

Studi empiris lainnya menunjukkan efek yang lebih positif dan kuat terkait dengan pengaruh pengeluaran publik pada pemberian layanan publik. Or (2000) menunjukkan bahwa bagian dari pengeluaran publik dalam total pengeluaran kesehatan secara signifikan terkait dengan peningkatan hasil kesehatan untuk pria dan wanita dalam sampel dari 21 negara OECD dari waktu ke waktu. Gupta, Verhoeven, dan Tiongson (2002) menemukan korelasi yang kuat antara pengeluaran publik dan hasil pendidikan dan kesehatan untuk sampel *cross-section* dari 50 negara-negara transisi dan berkembang. Akhirnya, Jackson, Johnson, dan Persisco (2015) menemukan hubungan yang sangat signifikan antara pengeluaran publik di bidang pendidikan dan berbagai dampaknya bagi sekolah di Amerika Serikat untuk data panel yang diwakili oleh anak-anak yang lahir antara tahun 1955 dan 1985.

Kesimpulan dalam konteks ini adalah bahwa pengeluaran publik dapat, secara positif mempengaruhi hasil layanan publik, tetapi hanya jika syarat tertentu terpenuhi. Filmer, Hammer, dan Pritchett (2000) berpendapat bahwa pengeluaran hanya akan berdampak positif pada pemberian layanan di negara-negara berkembang jika kapasitas kelembagaan penyedia layanan cukup kuat dan kegagalan pasar relatif dapat diprediksi. Baldacci, Guin-Siu, dan De Mello (2003) menunjukkan untuk 94 negara transisi dan berkembang bahwa belanja publik lebih efektif dalam meningkatkan hasil pendidikan dan kesehatan jika masalah mendasar terkait dengan pendapatan dan ketidaksetaraan gender diselesaikan. Akhirnya, Rajkumar dan Swaroop (2008) meneliti panel dari 90 negara maju dan berkembang dan menyimpulkan bahwa pengaruh pengeluaran pada hasil pembangunan manusia meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya kualitas tata kelola.

Studi ini menguji bagaimana pengelolaan belanja pemerintah daerah memengaruhi pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat. Pelayanan publik diukur dari pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi objek penilaian dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilakukan tiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri. EKPPD merupakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat melalui penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD). Secara spesifik evaluasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Metode EKPPD dilakukan dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dari pemetaan yang penulis lakukan atas hasil EKPPD tahun 2017 dan 2018, diketahui bahwa dari 508 pemerintah kabupaten/kota terdapat 309 pemerintah kabupaten/kota yang tidak memiliki peningkatan indeks kinerja, 90 pemerintah kabupaten/kota yang mengalami penurunan indeks kinerja, 89 pemerintah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan indeks kinerja, dan 20 yang tidak tersedia datanya. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah tidak mampu memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Untuk itu perlu diketahui seberapa besar pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja pelayanan publik. Dari studi ini dapat diketahui hubungan kausalitas antara kedua variabel, mengingat hadirnya belanja publik tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik di tiap urusan pemerintahan.

Studi ini menggunakan komponen tertentu dalam EKPPD diantaranya pencapaian pemerintah daerah dalam beberapa urusan kewenangan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga urusan tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa urusan pendidikan dan kesehatan merupakan urusan yang anggarannya telah dimandatkan oleh undang-undang terkait agar nilainya tidak kurang dari 20 persen dan 5 persen, secara berurutan, dari total anggaran belanja pemerintahan. Sementara itu, urusan infrastruktur dianggap penting mengingat saat ini pemerintah pusat sedang memacu pembangunan sektor tersebut, sehingga pencapaiannya dirasa perlu untuk dikaji. Ketiga urusan tersebut dari jumlah belanja per fungsinya mendominasi nilai belanja beberapa pemerintah daerah di Indonesia.

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran atas pengaruh pengelolaan belanja pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Sekaligus tulisan ini dapat menambah

literatur demi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik bagi yang memerlukan.

2. Tinjauan Pustaka

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sepanjang sejarahnya, pemerintahan Indonesia sebagian besar merupakan salah satu pemerintahan yang paling tersentralisasi di dunia. Namun pada tahun 2001, Indonesia memprakarsai program desentralisasi administrasi, fiskal, dan politik yang sangat ambisius (Lewis, 2014)⁷.

Kerangka kerja legislatif menguraikan tanggung jawab utama dari pemerintah daerah adalah melalui pemberian pelayanan publik di daerah dan juga akses pengelolaan sumber daya yang mereka miliki. Penugasan kabupaten dalam memberikan pelayanan publik berfokus pada fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan juga mencakup tugas-tugas yang terkait dengan perlindungan sosial, lingkungan, perumahan berpenghasilan rendah, keamanan dan hukum serta ketertiban, dan dukungan untuk pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab pemerintah daerah untuk penyediaan layanan sangat besar. Pengeluaran pemerintah provinsi dan daerah membentuk sekitar setengah dari total pengeluaran sektor publik setelah dikurangi subsidi dan pembayaran bunga (Lewis, 2014).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi dari sisi belanja (*expenditure*) bukan dari sisi pendapatan (*revenue*). Desentralisasi fiskal dari sisi belanja (*expenditure*) didefinisikan sebagai kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan diskresi seutuhnya masing-masing daerah. Fungsi dari pemerintah pusat hanyalah memberikan *advice* serta *monitoring* pelaksanaan. Sayangnya, justru dari pola inilah yang menjadikan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia terasa makin

⁷ Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi. Untuk undang-undang tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu undang-undang tentang perimbangan keuangan terakhir diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan belum ada perubahan hingga kini (Haryanto, 2015).

jauh dari apa yang dicita-citakan sebelumnya. Daerah justru semakin bergantung kepada pemerintah pusat dengan hadirnya dana transfer ke daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, dan dana transfer lainnya. DAU, sumber pendanaan terbesar bagi sebagian besar pemerintah daerah, adalah mekanisme pemerataan fiskal yang mengalokasikan dana berdasarkan formula kesenjangan fiskal. Sementara itu DAK adalah hibah modal yang serasi, mencakup berbagai sektor tetapi terkonsentrasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer lain termasuk dana otonomi khusus untuk Aceh, Papua dan Papua Barat; hibah tambahan dari pemerintah pusat untuk sertifikasi guru, dan transfer dari provinsi. Secara bersamaan, transfer antar pemerintah mencakup sekitar 90 persen dari anggaran pendapatan daerah (Lewis, 2014).

Pemerintah daerah secara umum mengelola sumber daya fiskal mereka dengan buruk. Lewis (2015) menunjukkan, misalnya, bahwa antara 2005 dan 2010 hanya 2,3 persen dari pemerintah daerah diberikan pendapat wajar tanpa pengecualian pada audit keuangan eksternal mereka. Sebagian besar pemerintah daerah menerima pendapat wajar dengan pengecualian (68,5 persen); 7,9 persen dan 21,3 persen pemerintah daerah menerima pendapat tidak wajar dan *disclaimer*, masing-masing secara berurutan.

Dampak keseluruhan dari desentralisasi pada pemberian layanan di Indonesia juga tidak pasti. Lewis (2014) menyimpulkan bahwa kinerja layanan sangat beragam. Beberapa aspek pemberian layanan di sektor-sektor utama telah membaik (akses terhadap pelayanan publik), sementara yang lain menunjukkan kemajuan yang lebih rendah (kualitas pelayanan). Kesimpulan tentang dampak pengeluaran pemerintah daerah pada pemberian layanan mungkin lebih kontroversial. Bank Dunia (2012) berpendapat bahwa tingkat pengeluaran tidak banyak berarti bagi hasil layanan dan bahwa efisiensi belanja lebih penting. Di sisi lain, Patunru dan Rahman (2014) dan Schulze dan Sjahrir (2014) memberikan bukti yang menunjukkan bahwa jumlah belanja pemerintah daerah secara langsung dan positif memengaruhi hasil layanan.

Teori utama yang mendasari penelitian mengenai pengaruh kualitas belanja pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan adanya hubungan kerja antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (agen). Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan

pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan antara *principal* dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Di satu sisi, agen secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Sehingga cenderung menimbulkan masalah agensi.

Demikian pula di organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak, di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dan Abdullah, 2005). Menurut Lane (2000), teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal yang sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomis organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) dalam Setiawan (2012) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Mardiasmo (2002) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik. Pengertian akuntabilitas adalah bahwa pemerintah sebagai pemegang amanah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai agen. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat (Setiawan, 2012).

3. Metodologi Penelitian

Studi ini menggunakan populasi seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, yang terdiri atas 542 pemerintah daerah. Namun, dengan pertimbangan ketersediaan data selama periode pengamatan maka diambil sampel sebanyak 94 pemerintah daerah, yang seluruhnya merupakan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan terkumpulnya sampel tersebut maka

studi ini menggunakan data panel pada 94 pemerintah daerah di Indonesia pada periode 2014 - 2018.

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa studi ini menguji bagaimana pengelolaan belanja pemerintah daerah memengaruhi pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat. Pelayanan publik diukur dari pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi objek penilaian dalam EKPPD yang dilakukan tiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri. Kinerja yang digunakan dalam studi ini adalah kinerja dalam urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum). Ketiga urusan tersebut merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Masing-masing urusan terdiri dari beberapa komponen kinerja seperti terlihat di Tabel 1. Setiap komponen kinerja diasumsikan memiliki bobot kepentingan yang sama dalam konteks pelayanan publik. Dengan demikian dalam penelitian ini digunakan bobot yang seimbang untuk menghitung indeks tiap urusan, sehingga terdapat tiga indeks yang menjadi variabel dependen dalam studi ini, diantaranya, indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum).

Tabel 1. Komponen Kinerja

Komponen Kinerja Bidang Pendidikan	Bobot (dalam persen)	Komponen Kinerja Bidang Kesehatan	Bobot (dalam persen)	Komponen Kinerja Bidang Infrastruktur (Perum & Fasum)	Bobot (dalam persen)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	25	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	33.33	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	25
Angka Partisipasi Murni SD (APM SD)	25	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	33.33	Rumah Tangga Bersanitasi	25
Angka Partisipasi Murni SMP (APM SMP)	25	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	33.33	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	25
Angka Melanjutkan Sekolah SD ke SMP	25	-		Rumah Layak Huni	25
Total	100	Total	100	Total	100

Sumber: diolah penulis

Untuk mengukur kualitas belanja pemerintah digunakan nilai belanja pemerintah per fungsi per kapita. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan makin tinggi nilai belanja pemerintah daerah yang dialokasikan bagi tiap penduduk, maka makin besar manfaat yang diperoleh penduduk tersebut dalam mengakses

pelayanan publik yang dihadirkan pemerintah daerah. Sesuai kinerja yang dinilai di atas, maka jenis belanja per fungsi yang digunakan diantaranya: belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum. Diharapkan dari studi ini dapat diketahui hubungan kausalitas antara variabel belanja terhadap kinerja yang dicerminkan melalui indeks, mengingat hadirnya belanja publik tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik di tiap urusan pemerintahan. Data belanja pemerintah daerah ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, sedangkan nilai jumlah penduduk diperoleh dari hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Selain belanja pemerintah daerah per fungsi per kapita, variabel lain yang digunakan untuk menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelayanan publik adalah rasio kualitas belanja pemerintah daerah atau juga disebut rasio belanja modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Belanja modal merupakan jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, contohnya pembelian tanah, pembangunan gedung, dan peningkatan jalan. Salah satu sumber belanja modal adalah dari Dana Transfer ke Daerah. Pengeluaran belanja modal dapat diartikan bahwa pemerintah daerah melakukan pembangunan demi peningkatan akses pelayanan publik di daerahnya. Makin tinggi nilai rasio belanja modal, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/infrastruktur yang membawa kearah perkembangan pembangunan daerah yang lebih baik. Rasio ini dipilih untuk mencerminkan seberapa besar pemerintah daerah mengalokasikan dan menggunakan anggarannya untuk pembangunan fisik, mengingat hal ini masih diperlukan bagi beberapa daerah di Indonesia. Sama seperti nilai belanja per fungsi, rasio ini diperoleh dari pengolahan data nilai belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa studi ini menggunakan data panel 94 pemerintah daerah di Indonesia pada periode 2014 - 2018. Untuk menguji faktor penentu yang memengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

di Indonesia maka teknik regresi panel akan digunakan. Teknik regresi panel digunakan jika data merupakan kombinasi data time series dengan data *cross-section*. Beberapa teknik dapat digunakan untuk mengukur parameter model, seperti *ordinary least square*; kedua, *fixed effect model*; dan ketiga, *random effect model*. Pada penelitian ini menggunakan regresi panel dengan *fixed effect model*, karena dianggap bahwa intersep tidak konstan. Ada beberapa langkah dalam penelitian ini, seperti: pertama, mengestimasi menggunakan *ordinary least square* dan *fixed effect model*. Kedua, melakukan uji Chow untuk memilih antara model *ordinary least square* atau *fixed effect*. Ketiga, akan dilakukan uji Hausman untuk memilih antara *fixed effect model* dan *random effect model* setelah estimasi *random effect model* dihadirkan. Persamaan matematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{(Persamaan 1)} \quad \text{Kinerja Peny. Pemerintahan Bid. Pendidikan}_n = \alpha + \beta_1 \text{Belanja Fungsi Pendidikan per Kapita}_n + \beta_2 \text{Rasio Kualitas Belanja} + \varepsilon_{it}$$

$$\text{(Persamaan 2)} \quad \text{Kinerja Peny. Pemerintahan Bid. Kesehatan}_n = \alpha + \beta_1 \text{Belanja Fungsi Kesehatan per Kapita}_n + \beta_2 \text{Rasio Kualitas Belanja} + \varepsilon_{it}$$

$$\text{(Persamaan 3)} \quad \text{Kinerja Peny. Pemerintahan Bid. Perumahan dan Fasilitas Umum}_n = \alpha + \beta_1 \text{Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum per Kapita}_n + \beta_2 \text{Rasio Kualitas Belanja} + \varepsilon_{it}$$

Dimana, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; n merupakan jenis indeks bidang yang digunakan yaitu pendidikan, kesehatan, dan perumahan dan fasilitas umum; α adalah konstanta; β adalah koefisien; dan ε adalah *error*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Penentuan Model Pengujian Data Panel

Dari hasil pengumpulan data terdapat 94 pemerintah daerah yang memiliki data yang lengkap selama periode pengujian. Sehingga demi pengujian dalam persamaan akan digunakan data panel dari 94 pemerintah daerah tersebut.

Persamaan yang akan diuji dapat dinyatakan ke dalam bentuk model logaritma natural linier melalui transformasi terhadap variabelnya. Transformasi dilakukan dengan mencari bentuk logaritma natural dari tiap variabel persamaan sehingga model itu berubah menjadi bentuk linier, seperti di bawah ini:

$$\text{(Persamaan 1)} \quad \ln(\text{Kinerja Peny. Pemerintahan Bid. Pendidikan}_n) = \alpha + \beta_1 \ln(\text{Belanja Fungsi Pendidikan per Kapita}_n) + \beta_2 \ln(\text{Rasio Kualitas Belanja}) + \varepsilon_{it}$$

$$\text{(Persamaan 2)} \quad \ln(\text{Kinerja Peny. Pemerintahan Bid. Kesehatan}_n) = \alpha + \beta_1 \ln(\text{Belanja Fungsi Kesehatan per Kapita}_n) + \beta_2 \ln(\text{Rasio Kualitas Belanja}) + \varepsilon_{it}$$

(Persamaan 3)
$$\ln(\text{Kinerja Peny. Pemerintahan Bid. Perumahan dan Fasilitas Umum}_n) = \alpha + \beta_1 \ln(\text{Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum per Kapita}_n) + \beta_2 \ln(\text{Rasio Kualitas Belanja}) + \varepsilon_{it}$$

Dimana, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; n merupakan jenis indeks bidang yang digunakan yaitu pendidikan, kesehatan, dan perumahan dan fasilitas umum; α adalah konstanta; β adalah koefisien; dan ε adalah *error*.

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa untuk menentukan mana model yang tepat, dilakukan beberapa pengujian yang hasilnya akan menunjukkan mana model yang paling sesuai dalam pengujian persamaan. Model yang diuji diantaranya *ordinary least square*; kedua, *fixed effect model*; dan ketiga, *random effect model*. Pengujian ini dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, *ordinary least square* dan *fixed effect model* untuk masing-masing persamaan kinerja ditentukan. Kemudian untuk menguji mana persamaan yang sesuai, maka dilakukan uji Chow. Hasil pengujian ini tampak di Tabel 2. Hasil dari *Chow test* tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section Chi-square* menunjukkan angka 0,0000 atau kurang dari 0,05 untuk semua jenis persamaan di ketiga urusan pemerintah daerah, yang berarti bahwa model *fixed effect* lebih baik daripada *ordinary least square* untuk ketiganya.

Tabel 2. Hasil Pengujian Chow Test (parsial)

Sumber: Hasil olah data dengan E-Views

Langkah selanjutnya kita memperkirakan persamaan dengan *random effect model*. Setelah itu menggunakan menggunakan *Hausman test*, kita dapat menguji mana model yang lebih sesuai untuk menguji hubungan antar variabel, *random effect model* atau *fixed effect model*. Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa kita menolak hipotesis nol yang menyatakan *random effect model* konsisten, yang tampak dari hasil *Hausman Test* bahwa nilai *cross-section random* memiliki nilai probabilitas 0,0000 atau kurang dari 0,05 untuk persamaan kinerja bidang pendidikan dan kesehatan. Sehingga model terbaik yang memilih pada penelitian ini adalah *fixed effect model* untuk persamaan kinerja bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, untuk persamaan bidang infrastruktur (perumahan &

fasilitas umum) menunjukkan hasil yang berbeda. Kita dapat melihat hasil uji *Hausman* pada persamaan kinerja bidang infrastruktur, nilai *cross-section random* memiliki nilai probabilitas 0,5732 atau lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut maka diputuskan bahwa untuk pengujian persamaan kinerja di bidang infrastruktur akan menggunakan *random effect model*.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hausman Test (parsial)

Sumber: Hasil olah data dengan E-Views

4.2. Hasil Pengujian Empiris

Setelah ditentukan bahwa *fixed effect model* merupakan model yang paling sesuai untuk menggambarkan persamaan data panel yang diuji untuk kinerja bidang pendidikan dan kesehatan, maka selanjutnya dilakukan pengujian atas pengaruh kedua variabel terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara simultan melalui uji F dan juga secara parsial melalui uji t. Sementara untuk kinerja bidang infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum), digunakan *random effect model* untuk melakukan uji F dan uji t.

Hasil penghitungan nilai statistik uji F dan nilai F kritis untuk kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan dapat dilihat di Tabel 4. Kinerja bidang pendidikan dipengaruhi oleh jumlah belanja fungsi pendidikan per kapita dan rasio kualitas belanja atau rasio belanja modal secara bersama-sama. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas (*F-stat*) adalah sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05. Dari Tabel 4 juga diketahui bahwa estimasi model menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,524187 (52,41 persen). Artinya, keberadaan variabel-variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 52,41 persen, selebihnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

Secara parsial, variabel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap variasi kinerja bidang pendidikan adalah belanja fungsi pendidikan per kapita. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas variabel yang berada di bawah 0,05 (0,0000), sementara untuk rasio kualitas belanja nilai probabilitas variabelnya lebih tinggi dari 0,05 (0,1822). Belanja fungsi pendidikan per kapita menunjukkan

tanda yang positif dalam mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan. Artinya makin tinggi nilai belanja pendidikan suatu daerah maka makin bagus kinerja penyelenggaraan pelayanan pendidikan daerah yang bersangkutan.

Tabel 4. Hasil Pengujian Persamaan dengan Fixed Effect Model untuk Kinerja Bidang Pendidikan

Variabel	Koefisien
Konstanta	4,110381**
Belanja Fungsi Pendidikan per Kapita	0.020136**
Rasio Kualitas Belanja	-0.033521
<i>R-squared</i>	0.524187
<i>Adjusted R-squared</i>	0.403325
<i>F-statistic</i>	4.337085
<i>Prob (F-stat)</i>	0.000000

Sumber: Hasil olah data dengan E-Views. **signifikan pada level signifikansi 5 persen

Untuk kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan, nilai statistik uji F dan nilai F kritis untuk kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan menyimpulkan hasil yang sama dengan bidang pendidikan. Kinerja bidang kesehatan dipengaruhi oleh jumlah belanja fungsi kesehatan per kapita dan rasio kualitas belanja atau rasio belanja modal secara bersama-sama. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas (*F-stat*) adalah sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05 (Tabel 5). Dari Tabel 5 juga diketahui bahwa estimasi model menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,542762 (54,27 persen). Artinya, keberadaan variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 54,27 persen, selebihnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

Tabel 5. Hasil Pengujian Persamaan dengan Fixed Effect Model untuk Kinerja Bidang Kesehatan

Variabel	Koefisien
Konstanta	4,024903**
Belanja Fungsi Kesehatan per Kapita	0.036278**
Rasio Kualitas Belanja	-0.397775**
<i>R-squared</i>	0.542762
<i>Adjusted R-squared</i>	0.426619
<i>F-statistic</i>	4.673207
<i>Prob (F-stat)</i>	0.000000

Sumber: Hasil olah data dengan E-Views.

**signifikan pada level signifikansi 5 persen

Secara parsial, kedua variabel memberikan pengaruh signifikan terhadap variasi kinerja bidang kesehatan. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas

variabel yang berada di bawah 0,05 (0,0000 dan 0,0078, secara berurutan). Belanja fungsi kesehatan per kapita menunjukkan tanda yang positif dalam memengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan. Artinya makin tinggi nilai belanja kesehatan suatu daerah maka makin bagus kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah yang bersangkutan.

Hasil yang sama dengan bidang kesehatan terjadi juga di bidang infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum). Secara simultan kedua variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di bidang infrastruktur. Dan demikian pula secara parsial, variabel belanja fungsi infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum) dan rasio kualitas belanja masing-masing menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik bidang yang bersangkutan. Hasilnya dapat dilihat di Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pengujian Persamaan dengan Random Effect Model untuk Kinerja Bidang Infrastruktur (Perumahan dan Fasilitas Umum)

Variabel	Koefisien
Konstanta	3,796355**
Belanja Fungsi Infrastruktur (Perumahan dan Fasilitas Umum) per Kapita	0.017307**
Rasio Kualitas Belanja	-0.160052**
<i>R-squared</i>	0.043769
<i>Adjusted R-squared</i>	0.039657
<i>F-statistic</i>	10.64220
<i>Prob (F-stat)</i>	0.000030

Sumber: Hasil olah data dengan E-Views

**signifikan pada level signifikansi 5 persen

Hasil studi ini sejalan dengan hasil studi dari Lewis (2016) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap akses pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah yang bersangkutan. Belanja pendidikan di pemerintah daerah mampu menghasilkan peningkatan kinerja dalam menghadirkan pelayanan publik di bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Wardhani et al. (2017) yang menyatakan bahwa hubungan antara pengeluaran untuk pendidikan dan kinerja dalam pendidikan adalah positif. Namun berbeda dengan Wardhani et al. (2017), belanja di bidang kesehatan dan infrastruktur juga berpengaruh positif terhadap kinerja di bidang yang bersangkutan dalam studi ini.

Untuk rasio belanja modal menunjukkan hubungan yang negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan dan infrastruktur

secara signifikan. Makin besar belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah maka makin lemah kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini dapat berarti bahwa belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah belum mendukung pencapaian kinerja di kedua bidang yang lebih baik. Hal ini dimungkinkan muncul karena adanya asimetri informasi antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap belanja modal dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya asimetri informasi inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen (pemerintah) yang berakibat tidak efektifnya belanja modal pemerintah daerah (Sudarsana & Rahardjo, 2013). Selain itu dengan besarnya belanja modal, dianggap satu daerah itu tidak efisien dalam pengelolaan keuangannya. Belanja modal dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan investasi pemerintah daerah, namun walaupun demikian kegiatan belanja modal pada pemerintah daerah tidak bertujuan untuk mencari *profit*. Kegiatan belanja modal dapat menambah aktiva tetap yang dimiliki daerah dan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang. Berdasarkan pernyataan tersebut maka mengindikasikan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah pada saat ini akan menghasilkan sumber-sumber keuangan beberapa tahun kemudian sehingga sumber-sumber keuangan yang dihasilkan melalui kegiatan belanja modal tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah beberapa tahun kemudian.

Faktor lain yang menyebabkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah karena tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya. Keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan pendapatan daerah tetapi juga dari segi mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kegiatan belanja modal mengarah pada kepentingan publik, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan belanja modal semestinya tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebiasaan pemerintah daerah untuk menyerap belanja modal di periode mendekati akhir tahun juga dapat memengaruhi pencapaian kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Nugroho dan Rohman (2012) yang mendapatkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung dikarenakan kinerja dari pegawai kurang maksimal dan anggaran belanja modal sering digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan tindakan korupsi. Mustikarini dan Fitriasisi (2012) juga menyimpulkan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.

5. Penutup

Penelitian ini menguji pengaruh belanja pemerintah daerah per fungsi per kapita dan rasio kualitas belanja atau rasio belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di urusan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja fungsi per kapita berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk ketiga bidang urusan. Pengaruh tersebut bersifat positif, artinya jika nilai belanja per fungsi per kapita bertambah maka kinerja pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik juga meningkat.

Variabel lain yang diuji pengaruhnya terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik adalah rasio kualitas belanja atau sering disebut rasio belanja modal. Dalam pengujian terhadap kinerja bidang kesehatan dan infrastruktur, rasio ini memberikan pengaruh negatif yang signifikan, namun untuk kinerja bidang pendidikan rasio ini tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dapat berarti bahwa belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah belum memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat.

Untuk penelitian berikutnya, perlu dipertimbangkan untuk menambah indikator lain yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lengkap yang meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Perlu juga mempertimbangkan untuk mengidentifikasi berapa jumlah belanja modal untuk tiap fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengetahui dampak belanja modal terhadap kinerja tiap fungsi yang bersangkutan secara akurat. Dari penelitian ini diketahui bahwa besaran belanja pemerintah daerah tiap fungsi berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat, namun pemerintah daerah juga perlu

memperhatikan kualitas belanjanya agar pemanfaatan belanja tersebut dapat dirasakan lebih efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besaran belanja modal yang tinggi untuk perlu dioptimalkan pengelolaan pengeluarannya terutama dari segi waktu. Belanja modal yang dialokasikan sebaiknya segera dibelanjakan agar akses pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat sesegera mungkin dan dapat menjadi peningkatan kinerja bagi pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Blane D. Lewis. (2016). *Local government spending and service delivery in Indonesia: the perverse effects of substantial fiscal resources*. Regional Studies, DOI:10.1080/00343404.2016.1216957.
- Baldacci, E., Guin-Siu, M., & De Mello, L. (2003). *More on the effectiveness of public spending on health care and education: A covariance structure model*. Journal of International Development, 15, 709–725. doi:10.1002/jid.1025.
- Hanushek, E. (1995). *Interpreting recent research on schooling in developing countries*. World Bank Research Observer, 10(2), 227–246. doi:10.1093/wbro/10.2.227.
- Mingat, A., & Tan, J. (1992). *Education in Asia: A comparative study of cost and financing*. Washington, DC: Education Group, Human Development Department, World Bank.
- Mingat, A., & Tan, J. (1998). *The mechanics of progress in education: Evidence from cross-country data*. Policy Research Working Paper No. 2015. Washington, DC: Education Group, Human Development Department, World Bank.
- Or, Z. (2000). *Determinants of health outcomes in industrialized countries: A pooled cross-country time series analysis*. OECD Economic Studies, 30, 53–77.
- Filmer, D., & Pritchett, L. (1999). *The impact of public spending on health: Does money matter? Social Science and Medicine*, 49, 1309–1323. doi:10.1016/S0277-9536(99)00150-1.
- Filmer, D., Hammer, J., & Pritchett, L. (2000). *Weak links in the chain: A diagnosis of health policy in poor countries*. World Bank Research Observer, 15(2), 199–224. doi:10.1093/wbro/15.2.199.
- Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. (2002). *The effectiveness of government spending on education and health care in developing and transition economies*. European Journal of Political Economy, 18, 717–737. doi:10.1016/S0176-2680(02)00116-7.
- Jackson, C., Johnson, R., & Persisco, C. (2015). *The effects of school spending on education and economic outcomes: Evidence from school finance reforms*. NBER Working Paper No. 20847. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research (NBER).

- Lewis, B. (2014). *Twelve years of fiscal decentralisation: A balance sheet*. In H. Hill (Ed.), *Regional dynamics in a decentralised Indonesia* (pp. 135–155). Singapore: Institute of South-East Asia Studies.
- Lewis, B. (2015a). *Local public financial management performance in Indonesia: Political and fiscal causes and effects (Working Paper)*. Canberra: Arndt-Corden Department of Economics.
- World Bank. (2012). *Indonesia subnational public expenditure review: Optimizing subnational performance for better services and faster growth*. Jakarta: World Bank.
- Patunru, A. A., & Rahman, E. A. (2014). *Local governance and development outcomes*. In H. Hill (Ed.), *Regional dynamics in a decentralised Indonesia* (pp. 156–185). Singapore: Institute of South-East Asia Studies.
- Rajkumar, A., & Swaroop, V. (2008). *Public spending and outcomes: Does governance matter*. *Journal of Development Economics*, 86, 96–111. doi:10.1016/j.jdeveco.2007.08.003.
- Schulze, G. G., & Sjahrir, B. S. (2014). *Decentralisation, governance, and public service delivery*. In H. Hill (Ed.), *Regional dynamics in a decentralised Indonesia* (pp. 186–207). Singapore: Institute of South-East Asia Studies.
- Haryanto, Joko Tri. (2015). *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*. Working paper Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>.
- Jensen, M dan W. Meckling. (1976). *Theory of the Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, p 305-360.
- Halim, Abdulah dan Abdullah, Syukriy. (2005). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*. <http://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/abdulhalim-dan-syukriy-abdullah/>.
- Lane, Jan-Erik. (2000). *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- Moe, T. M. (1984). *The new economics of organization*. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.
- Setiawan, Wahyu. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri.

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Wardhani, R., Rossieta, H. & Martani, D. (2017). *Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia*. Int. J. Public Sector Performance Management, Vol. 3, No. 1, pp.77–102.
- Sudarsana, Hafidh Susila, & Rahardjo, Shiddiq Nur. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia). Diponegoro Journal of Accounting Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriasisi, Debby. (2012). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Forum: Simposium Nasional Akuntansi 15, <http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>.
- Nugroho, Fajar dan Rohman, Abdul. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah). Skripsi Sarjana. Semarang. Universitas Diponegoro.

ANALISIS ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN DAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG IRIGASI

Analysis Of Specific Allocation Funds Of Agriculture And Irrigation

Robby Alexander Sirait

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: robbysirait@dpr.go.id

Abstract

The aim of this research to analyze specific allocation funds of agriculture and irrigation. This study used secondary data, standard deviation and rating scale method. From this research, we found that allocations for specific allocation funds is not fully accurate to achieve the food security and food sovereignty. We reach to the conclusion based on our results that 32.28% of specific allocation funds is inaccurate.

Keywords: *Specific allocation funds Of agriculture and irrigation, rating scale*

1. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Perimbangan Keuangan) merupakan titik awal penerapan otonomi daerah dan perubahan sistem kekuasaan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam perkembangannya, UU Pemda telah berganti 2 (dua) kali, terakhir kali diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan UU Perimbangan Keuangan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Perubahan kekuasaan pemerintahan tersebut berimplikasi pada lahirnya dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Salah satu dana perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU Perimbangan Keuangan Tahun 2004).

Dalam prakteknya, kebijakan alokasi DAK yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) pelayanan publik dasar. Selain itu, DAK juga bertujuan untuk mendorong pencapaian berbagai prioritas pembangunan nasional di berbagai daerah. Salah satu prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Nawa Cita) adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi tersebut, pemerintah merencanakan 7 (tujuh) agenda prioritas. Salah satunya adalah peningkatan kedaulatan pangan. Untuk menjalankan agenda peningkatan kedaulatan pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran kedaulatan pangan dalam APBN. Anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja kementerian/lembaga, belanja subsidi, belanja lain-lain dan belanja transfer ke daerah. Untuk belanja transfer ke daerah, alokasi agenda prioritas kedaulatan pangan dialokasikan melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi⁸.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, alokasi kedua DAK tersebut mencapai Rp46,6 triliun dan rerata proporsinya terhadap total anggaran kedaulatan pangan sebesar 8,29 persen setiap tahunnya. Alokasi yang relatif cukup besar tersebut seharusnya mampu mendorong peningkatan kinerja produksi pertanian pangan nasional dan semakin besarnya proporsi hasil produksi pangan domestik dalam pemenuhan pangan nasional. Namun, faktanya berbeda. Hal ini terlihat dari kinerja neraca perdagangan komoditas pangan periode 2015-2018 yang masih terus defisit dan bahkan tidak menunjukkan perbaikan. Pada 2015, defisit neraca perdagangan komoditas pangan mencapai USD 6,58 miliar. Sedikit membaik pada 2016 (USD6,37 miliar) dan 2017 (USD6,32 miliar). Namun, kembali memburuk pada 2018 yang mencapai USD7,76 miliar. Kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa alokasi DAK Bidang Pertanian dan Bidang Irigasi saat ini kurang efektif mendorong peningkatan produksi dan kedaulatan

⁸Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Nomenklatur DAK Fisik diterapkan sejak APBN 2015, yang merupakan pengklasifikasian kembali atas nomenklatur dana perimbangan pada tahun-tahun sebelumnya.

pangan. Kurang efektifnya dampak DAK tersebut dapat bersumber dari proses penetapan alokasi dan daerah penerima yang juga tidak tepat sasaran. Alokasi yang cukup besar tersebut akan efektif, apabila ada kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan kapasitas dan kemampuan daerah-daerah penerima pada saat proses penetapan alokasi kepada setiap daerah.

Kinerja neraca perdagangan komoditas pangan periode 2015-2018 yang masih terus defisit dan bahkan tidak menunjukkan perbaikan merupakan salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa upaya pencapaian kedaulatan pangan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Padahal, dalam lima tahun terakhir pemerintah telah mengalokasikan DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi sebesar Rp46,6 triliun. Kondisi yang bertolak belakang ini mengindikasikan bahwa pengalokasian DAK tersebut kurang efektif untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Kurang efektifnya dampak DAK tersebut dapat bersumber dari proses penetapan alokasi dan daerah penerima yang juga tidak tepat sasaran. Penetapan yang tidak tepat sasaran akan berimplikasi pada tujuan yang tidak tercapai secara optimal.

Untuk tahun anggaran 2019, pemerintah mengalokasikan DAK Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp1,9 triliun dan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi sebesar Rp3 triliun. Akumulasi kedua DAK tersebut setara 7,07 persen dari total alokasi DAK Fisik dan setara 5,1 persen dari total anggaran kedaulatan pangan. Alokasi kedua DAK tersebut dialokasikan kepada 34 (tiga puluh empat provinsi) dan 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota. Pertanyaannya, apakah pengalokasian ini akan memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kedaulatan pangan yang merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan. Pengalokasian ini akan berdampak optimal, jika proses penetapan alokasinya tepat sasaran. Artinya, pengalokasian diutamakan bagi daerah yang merupakan daerah dengan kinerja dan produksi pertaniannya lebih besar dibanding daerah lain, tetapi memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Selain itu, DAK tersebut juga diutamakan bagi daerah yang merupakan daerah dengan kinerja dan produksi pertaniannya lebih besar dibanding daerah lain serta memiliki kapasitas fiskal yang tinggi. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini hendak melakukan analisis tentang ketepatan sasaran dari pengalokasian DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2019 yang dikaitkan dengan tujuan kebijakan kedua DAK tersebut.

Tujuan utama penulisan ini adalah melakukan analisis tentang ketepatan sasaran pengalokasian DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Bidang Irigasi tahun anggaran 2019 yang dikaitkan dengan tujuan kebijakan kedua DAK tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

Pasal 18 dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta mengamanatkan hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lain antar level pemerintahan diatur dengan undang-undang⁹. Amandemen inilah yang melatarbelakangi munculnya pos transfer ke daerah¹⁰ dalam postur APBN sejak tahun 2001, sebagaimana diatur dalam UU Pemda Tahun 1999 dan UU Perimbangan Keuangan Tahun 1999, yang selanjutnya diganti terakhir kali dengan UU Pemda Tahun 2014 dan UU Perimbangan Keuangan Tahun 2004¹¹.

Pasal 285 ayat (2) UU Pemda Tahun 2014 mengatur bahwa dana perimbangan, dana otonomi khusus¹², dana keistimewaan¹³ dan dana desa¹⁴ merupakan dana dari APBN yang ditransfer ke daerah. Berdasarkan UU Perimbangan Keuangan Tahun 2004, dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi¹⁵. Dana Bagi Hasil (DBH)¹⁶

⁹Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. 2017. Mengenal Postur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dalam APBN. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. 2017, hal 87.

¹⁰Sejak tahun 2015, berubah menjadi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Perubahan ini akibat lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹¹ibid

¹²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mengamanatkan penyediaan dana otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat. Besaran dana otonomi khusus dimaksud masing-masing sebesar 2 persen dari DAU Nasional

¹³Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengamanatkan pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam APBN sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

¹⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan sekurang-kurangnya sebesar 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.

¹⁵DAU yang ditransfer ke daerah sebesar 26 (dua puluh enam) persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto.

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari sisi tujuan, DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Sedangkan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jenis bidang dan sub bidang kegiatan yang didanai oleh pemerintah melalui DAK beragam jumlah dan jenisnya, bergantung pada arah perencanaan pembangunan setiap masa pemerintahan. Pada tahun anggaran 2015-2019, bidang DAK yang dialokasikan dalam APBN sebanyak 15 (lima belas) bidang. Salah satunya adalah DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Bidang Irigasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 (Perpres DAK Fisik Tahun 2019), DAK Bidang Pertanian diarahkan untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian pemantapan ketahanan pangan dan nilai tambah ekonomi komoditas pertanian. Untuk mencapainya, pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian ditujukan untuk:

1. Mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis;
2. Peningkatan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
3. Mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian; dan
4. Meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah.

Sedangkan untuk DAK Fisik Bidang Irigasi, diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan daerah. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mencapai target nasional pembangunan irigasi 1 (satu) juta ha dan rehabilitasi irigasi 2 (tiga) juta ha. Dari arah dan tujuan kedua DAK tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedua DAK dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan

¹⁶DBH yang ditransfer adalah dana bagi hasil pajak (bagi hasil Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Cukai Hasil Tembakau) dan dana bagi hasil sumber daya alam (bagi hasil penerimaan migas, tambang mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi)

melalui pembangunan irigasi, peningkatan kemampuan dan jumlah produksi pangan strategis dalam negeri, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian, serta perbaikan kinerja pembangunan pertanian daerah.

Dalam proses penetapan alokasi, proses bisnis penetapan alokasi DAK Fisik yang berlaku saat ini dapat dibagi dalam 4 (empat) tahapan utama¹⁷, yakni:

1. Tahapan Penetapan Bidang/Sub bidang/Menu Kegiatan. Proses atau kegiatan dalam tahapan ini meliputi:
 - a) Kementerian Keuangan (c.q Direktorat Jenderal Perimbangan/DJPK dan Direktorat Jenderal Anggaran/DJA) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian/Lembaga Teknis membahas arah kebijakan, sasaran, ruang lingkup dan pagu DAK Fisik.
 - b) Kementerian Keuangan (c.q DJPK) bersama Bappenas menentukan jenis/bidang/sub bidang DAK Fisik. Tahapan ini dilakukan berdasarkan program dan/atau kegiatan yang menjadi prioritas nasional, lokasi dari program dan/atau kegiatan yang menjadi prioritas nasional, perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendanai kegiatan, dan data pendukung yang disampaikan oleh Bappenas ke DJPK, ditambah data perkembangan DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari DJPK.
 - c) Berdasarkan penentuan jenis/bidang/sub bidang DAK Fisik, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Teknis melakukan pembahasan untuk menentukan jenis-jenis kegiatan DAK Fisik. Tahapan ini dilakukan berdasarkan ruang lingkup, sasaran, dan target manfaat program dan/atau kegiatan, prioritas kegiatan per bidang/sub bidang DAK Fisik, rincian kegiatan berupa nama kegiatan, target *output* kegiatan, satuan biaya, dan lokasi kegiatan, perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendanai kegiatan, serta data pendukung yang berasal dari Kementerian teknis.
 - d) Berdasarkan penentuan jenis/bidang/sub bidang dan kegiatan DAK Fisik, Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai jenis/bidang/sub bidang dan kegiatan DAK Fisik kepada kepala daerah.

¹⁷Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

2. Tahapan Pengusulan

- a) Kepala daerah menyusun usulan DAK fisik dengan mengacu pada surat pemberitahuan Menteri Keuangan.
- b) Kepala daerah menyampaikan usulan DAK Fisik kepada Menteri/Pimpinan lembaga teknis terkait, Menteri Bappenas, dan Menteri Keuangan.
- c) Bupati/Walikota menyampaikan salinan usulan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.

3. Tahapan Penilaian Kelayakan Usulan

- a) Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian teknis terkait melakukan verifikasi usulan DAK Fisik. Verifikasi yang dilakukan adalah terhadap kelengkapan dan kesesuaian usulan dengan surat pemberitahuan Menteri Keuangan, kesesuaian antara rekapitulasi usulan DAK dengan rincian usulan per bidang/sub bidang, dan kesesuaian antara dokumen fisik usulan dengan dokumen elektronik.
- b) Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian teknis terkait melakukan penilaian atas usulan DAK Fisik berdasarkan hasil verifikasi, dengan mempertimbangkan kesesuaian usulan dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga teknis, kewajaran nilai usulan dan indeks kemahalan konstruksi, alokasi dan kinerja penyerapan DAK Fisik, serta tingkat capaian *output* tahun sebelumnya. Penilaian kelayakan tersebut dilakukan oleh Bappenas dengan mempertimbangkan target *output* dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/sub bidang per tahun secara nasional, target *output* dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/sub bidang dalam jangka menengah secara nasional, dan target *output* dan prioritas dalam RKP dan RPJMN. Sedangkan pertimbangan penilaian kelayakan oleh Kementerian/Lembaga teknis adalah kesesuaian antara usulan dengan menu bidang/sub bidang/kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian data teknis kegiatan pada data pendukung usulan, perbandingan data teknis pada data pendukung dengan data yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga teknis, tingkat capaian standar pelayanan minimum (SPM) daerah, serta target *output/manfaat* dalam jangka pendek dan menengah (baik per daerah maupun secara nasional).

4. Tahapan Penetapan Pagu Anggaran

- a) Kementerian Keuangan menyusun hasil penilaian kelayakan usulan berupa persandingan target *output*, nilai wajar kegiatan, indeks kemahalan konstruksi, alokasi dan kinerja penyerapan DAK Fisik, serta capaian *output* tahun anggaran sebelumnya per daerah.
- b) Menteri Keuangan menghitung dan menyusun rincian pagu per jenis/bidang/sub bidang DAK Fisik yang dibahas bersama Bappenas dan Kementerian/Lembaga teknis terkait.

Proses bisnis penetapan alokasi DAK ini diberlakukan sejak 2017 dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI dalam APBN 2016 dan APBN 2017, pengalokasian DAK tidak lagi menggunakan kriteria-kriteria dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan¹⁸. Kriteria umum, kriteria khusus, maupun kriteria teknis tidak digunakan lagi¹⁹. Pengalokasian yang semula diarahkan pada daerah dengan kemampuan keuangan relatif rendah, daerah yang terkendala kondisi kewilayahannya, serta daerah yang secara teknis membutuhkan DAK sudah tidak diberlakukan lagi²⁰.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Kerangka Pikir dan Metode Analisis

Dalam melakukan analisis atas alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Penugasan Irigasi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif deskriptif yang dimaksud adalah penelitian ini menggunakan pengujian kecocokan antara alokasi DAK kepada setiap daerah pada tahun anggaran 2019 dengan tujuan kebijakan DAK itu sendiri, dengan menggunakan data sekunder, alat ukur standar deviasi dan skala penilaian (*rating scale*). *Rating scale* adalah data yang diperoleh berupa angka atau data kuantitatif yang ditafsirkan kedalam pengertian kualitatif²¹. *Rating scale*

¹⁸Setiawan, M. Iwan. 2018. Penggunaan Dana Transfer Khusus Bidang Kesehatan dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan. Jurnal Desentralisasi Fiskal Edisi 3, Volume III, Mei-Agustus 2018, hal 23.

¹⁹ibid

²⁰ibid

²¹Wiyono, Masdar., Solihin, Firdaus., dan Susanto Putro, Sigit. 2017. Aplikasi Penilaian Kuliah Kerja Nyata Universitas Trunojoyo Madura Menggunakan Metode *Rating Scale*. Jurnal Ilmiah Rekayasa, Volume 10 No 1, April 2017, hal 24.

merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk membangun sistem penilaian, dimana penilaian didasarkan pada suatu skala tertentu dari rendah sampai tinggi²².

Pada bagian sebelumnya telah dibahas arah dan tujuan kebijakan DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi. Berdasarkan pengaturan dalam Perpres DAK Fisik Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa kedua DAK bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan melalui pembangunan irigasi, peningkatan kemampuan dan jumlah produksi pangan strategis dalam negeri, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian dan perbaikan kinerja pembangunan pertanian daerah. Untuk itu, alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian dan Bidang Irigasi seharusnya lebih diprioritaskan kepada daerah yang memiliki kinerja sektor pertanian yang lebih baik dan kapasitas produksi pertanian yang lebih besar dibanding dengan daerah lain. Artinya, daerah-daerah yang kinerja pertaniannya baik dan penghasil komoditas pertanian terbesar menjadi prioritas pertama dalam pengalokasian. Hal ini bertujuan agar peningkatan kemampuan dan jumlah produksi hasil pertanian secara agregat nasional lebih mudah dicapai. Dengan pencapaian yang lebih mudah tersebut, maka akan memudahkan pemerintah dalam mewujudkan pemantapan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Selain diprioritaskan kepada daerah-daerah tersebut, kedua DAK tersebut juga seharusnya dialokasikan kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal atau kemampuan fiskal rendah²³ dibanding daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada urusan pertanian merupakan urusan pilihan pemerintah daerah menurut Pasal 12 ayat (3) UU Pemda Tahun 2014. Dengan kemampuan fiskal daerah yang rendah dan urusan pertanian adalah urusan pilihan, maka kemungkinan alokasi anggaran pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan kebijakan prioritas sangat besar terjadi. Pemerintah daerah akan lebih mendahulukan urusan wajib (khususnya berkaitan dengan pelayanan dasar) di dalam APBD. Oleh karena itu, alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik

²²ibid

²³Pada tahun 2017, rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 12,31 persen. Angka ini menunjukkan kemampuan fiskal mayoritas daerah Kabupaten/Kota masih tergolong rendah.

Penugasan Bidang Irigasi seharusnya diprioritaskan kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah.

Atas kedua pertimbangan yang telah dijelaskan tersebut, alokasi kedua DAK tersebut harus lebih diprioritaskan kepada daerah yang memiliki kinerja sektor pertanian dan kontribusi produksi komoditas pertanian strategis yang lebih besar dibanding daerah lain serta memiliki kemampuan fiskal yang rendah. Setelah itu, barulah kemudian alokasi DAK diprioritaskan kepada daerah yang memiliki kinerja dan kontribusi produksi komoditas pertanian strategis yang lebih besar dibanding daerah lain dan kemampuan fiskalnya memadai. Hal ini didasarkan pada dampaknya yang akan lebih memudahkan pemerintah dalam mewujudkan pemantapan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Untuk itu, analisis ini akan menguji apakah alokasi kedua DAK tersebut pada tahun anggaran 2019 telah memprioritaskan daerah dimaksud.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Penulis

Untuk melakukan pengujian, penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian. Adapun tahapan proses pengujian adalah sebagai berikut:

1. Menggabungkan nilai nominal DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Bidang Irigasi yang diperoleh oleh tiap Kabupaten/Kota menjadi DAK Pertanian Nominal.

$$\text{DAK Pertanian Nominal} = \text{DAK Fisik Bidang Pertanian Nominal} + \text{DAK Fisik Penugasan}$$

2. Menghitung nilai DAK Pertanian menjadi nilai riil dengan membagi nilai nominal DAK Pertanian dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

$$\text{DAK Pertanian Riil} = \text{DAK Pertanian Nominal} : \text{IKK}$$

3. Menghitung rerata DAK Pertanian Riil secara nasional.
4. Melakukan skala penilaian (*rating scale*) terhadap kinerja sektor pertanian untuk setiap daerah Kabupaten/Kota menurut Provinsi, dengan menggunakan alat ukur rerata dan standar deviasi. Dimana kinerja dimaksud adalah rasio antara total produksi komoditas pertanian strategis satu daerah dengan luas lahan (produktivitas). Adapun pembagian skalanya adalah sebagai berikut:

Batasan Skala	Nilai Skala
Kinerja > Mean + 1 SD	5
Mean + 0,5 SD < Kinerja < Mean + 1 SD	4
Mean < Kinerja < Mean + 0,5 SD	3
Mean – 0,5 SD < Kinerja < Mean	4
Kinerja < Mean 0,5 SD	1

Adapun rumus nilai Kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Pertanian} = \sum_{k=1}^i (k_1 + k_2 + \dots + k_i)$$

Dimana :

k1 = Nilai skala komoditas ke-1

k2 = Nilai skala komoditas ke-2

ki = Nilai skala komoditas ke-i

5. Melakukan skala penilaian (*rating scale*) terhadap produksi komoditas pertanian strategis untuk setiap daerah Kabupaten/Kota menurut Provinsi, dengan menggunakan alat ukur rerata dan standar deviasi. Dimana produksi adalah jumlah produksi komoditas pertanian strategis²⁴ satu daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama. Adapun pembagian skalanya adalah sebagai berikut:

Batasan Skala	Nilai Skala
Produksi > Mean + 1 SD	5
Mean + 0,5 SD < Produksi < Mean + 1 SD	4
Mean < Produksi < Mean + 0,5 SD	3
Mean – 0,5 SD < Produksi < Mean	4
Produksi < Mean 0,5 SD	1

²⁴Komoditas pertanian strategis terdiri dari Padi, Padi, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kedelai, Kacang Tanah, Jagung, Rawit, Cabe Besa, bawang Putih, dan bawang Merah. Salah satu yang mendasari pemilihan komoditas tersebut adalah posisi neraca perdagangan atas komoditas-komoditas tersebut mayoritas mengalami defisit dan komoditas tersebut merupakan komoditas utama kebutuhan nasional.

Adapun rumus nilai produksi adalah sebagai berikut:

$$\text{Produksi Pertanian} = \sum_{k=1}^i (k_1 + k_2 + \dots + k_i)$$

Dimana :

k_1 = Nilai skala komoditas ke-1

k_2 = Nilai skala komoditas ke-2

k_i = Nilai skala komoditas ke-i

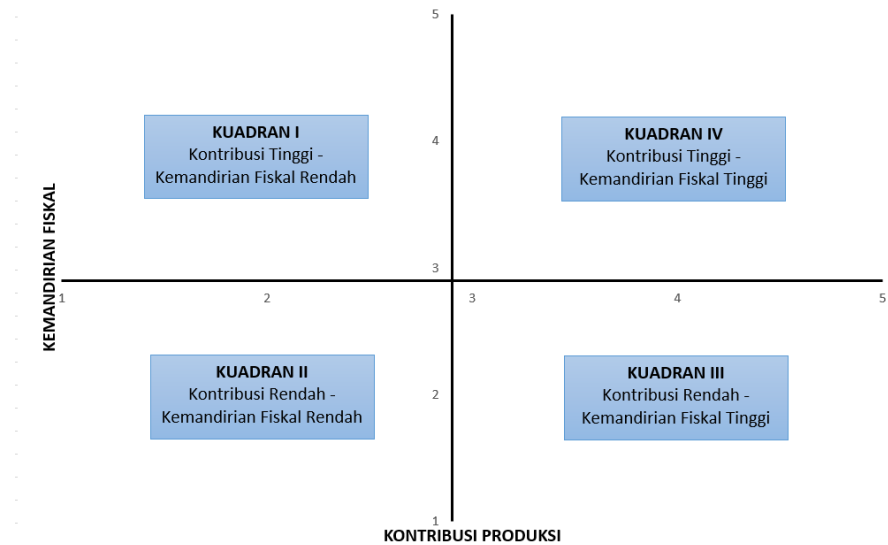
6. Menjumlahkan skala penilaian kinerja sektor pertanian dan skala penilaian produksi untuk setiap daerah Kabupaten/Kota menurut Provinsi, yang dinamai dengan variabel Kontribusi Daerah (KD). Adapun rumus nilai KD adalah sebagai berikut:

$$KD = \frac{\text{Kinerja Pertanian} + \text{Produksi Pertanian}}{2}$$

7. Melakukan skala penilaian (*rating scale*) terhadap Kemandirian Fiskal (KF) untuk setiap daerah, dengan menggunakan metode rerata dan standar deviasi. Dimana kemandirian fiskal dimaksud adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Adapun pembagian skalanya adalah sebagai berikut:

Batasan Skala	Nilai Skala
$KF > \text{Mean} + 1 \text{ SD}$	5
$\text{Mean} + 0,5 \text{ SD} < KF < \text{Mean} + 1 \text{ SD}$	4
$\text{Mean} < KF < \text{Mean} + 0,5 \text{ SD}$	3
$\text{Mean} - 0,5 \text{ SD} < KF < \text{Mean}$	4
$KF < \text{Mean} - 0,5 \text{ SD}$	1

8. Melakukan pengklasifikasian (pengelompokan) daerah-daerah yang masuk ke dalam kategori Kontribusi Daerah (KD) tinggi/rendah dan Kemandirian Fiskal (KF) tinggi/rendah ke dalam grafik kuadran dengan aturan sebagai berikut:



Sumber : Penulis

Tinggi/rendahnya kontribusi daerah atau kemandirian fiskal ditentukan oleh batas skala minimal yang ditentukan oleh penulis. Daerah yang memiliki skala kontribusi daerah $\geq \frac{1}{2}$ KD merupakan daerah yang memiliki kontribusi daerah tinggi dan $< \frac{1}{2}$ KD merupakan daerah yang memiliki kontribusi daerah rendah. Sedangkan untuk kemampuan fiskal, daerah yang memiliki skala KF ≥ 3 merupakan daerah yang memiliki kemandirian fiskal tinggi dan < 3 merupakan daerah yang memiliki kemandirian fiskal rendah.

9. Melakukan pencocokan apakah daerah-daerah yang masuk ke dalam kuadran I (kontribusi tinggi dan kemampuan fiskal rendah) dan ke dalam kuadran IV (kontribusi tinggi dan kemampuan fiskal tinggi) yang seharusnya menjadi daerah-daerah prioritas telah memperoleh DAK Pertanian di atas rerata nasional dan di atas rerata provinsi.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Data tersebut bersumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik Tahun 2017 dan 2019.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis dilakukan terhadap 472 Kabupaten/Kota pada 32 Provinsi di Indonesia²⁵. Rerata proporsi alokasi DAK Pertanian secara nasional sebesar

²⁵Tidak memasukkan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, serta Kota Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya data yang memadai.

0,194 persen dari total DAK Bidang Pertanian dan DAK Bidang Irigasi yang dialokasikan di tahun anggaran 2019. Hasil pengelompokan berdasarkan kontribusi daerah dan kemandirian fiskal dengan menggunakan grafik kuadran, diperoleh data sebagai berikut:

- a. Terdapat 144 (seratus empat puluh empat) daerah yang berada pada kuadran I, yakni daerah dengan kategori kontribusi daerah tinggi dan kemandirian fiskal rendah;
- b. Masih terdapat 49 (empat puluh sembilan) daerah atau 34,03 persen daerah yang berada pada kuadran I memperoleh DAK Pertanian di bawah rerata nasional.
- c. Dari 49 (empat puluh sembilan) daerah pada kuadran I tersebut, terdapat 69,39 persen atau 34 (tiga puluh empat) daerah yang DAK Pertanian yang diperolehnya di bawah rerata provinsi.
- d. Terdapat 65 (enam puluh lima) daerah yang berada pada Kuadran IV, yakni daerah dengan kategori kontribusi daerah tinggi dan kemandirian fiskal tinggi;
- e. Masih terdapat 31 (tiga puluh satu) atau 47,69 persen daerah yang berada pada kuadran IV memperoleh DAK Pertanian di bawah rerata nasional.
- f. Dari 31 (tiga puluh satu) daerah pada kuadran IV tersebut, terdapat 64,52 persen atau 20 (dua puluh) daerah yang DAK Pertanian yang diperolehnya di bawah rerata provinsi.
- g. Dengan memisahkan daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan di luar Jawa dan Bali, hasil analisis menunjukkan bahwa persentase daerah-daerah pada kuadran I dan IV di luar Pulau Jawa dan Bali yang memperoleh DAK di bawah rerata nasional lebih besar dibanding daerah-daerah yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Di luar Pulau Jawa dan Bali terdapat 47,92 persen yang berada di kuadran I dan 55,17 persen yang berada di kuadran IV. Sedangkan di Pulau Jawa dan Bali, sebesar 27,08 persen dan 41,67 persen.

Selain itu, hasil analisis ini juga menemukan bahwa seluruh daerah yang berada pada kuadran I di Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara memperoleh alokasi DAK di atas rerata nasional dan rerata provinsi. Sedangkan untuk kuadran IV, seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat memperoleh alokasi DAK di atas rerata

nasional dan rerata provinsi. Adapun hasil pemetaan kabupaten/kota menurut provinsi tergambar pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pemetaan Daerah yang Memperoleh DAK di Bawah Rerata Nasional, Menurut Provinsi

No	Provinsi	Kuadran I	Kuadran IV
1	Aceh	Bener Meriah	Aceh Tengah
2	Sumatera Utara	Langkat, Samosir, Tobasa	Dairi
3	Sumatera Barat		
4	Riau	Bengkalis	Kampar
5	Jambi	Kerinci, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Timur	Bungo
6	Sumatera Selatan	Lahat, Oku Timur, Pagar Alam	Oki
7	Bengkulu	Bengkulu Utara, Kapahiang	Muko-Muko, Rejang Lebong
8	Lampung	Lampung Utara	
9	Jawa Barat	Majalengka	
10	Jawa Tengah	Purbalingga, Tegal, Wonosobo	Kendal, Semarang
11	DI Yogyakarta	Bantul	
12	Jawa Timur	Bojonegoro	Tuban
13	Kalimantan Barat	Sintang	
14	Kalimantan Tengah		Kotawaringin Barat & Lamandau
15	Kalimantan Selatan	Kotabaru	
16	Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara, Paser dan Panajem Paser Utara	
17	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Timur, Kota Tomohon dan Minahasa Selatan	Minahasa dan Minahasa Utara
18	Sulawesi Tengah		
19	Sulawesi Selatan	Bantaeng, Jeneponto & Takalar	
20	Sulawesi Tenggara	Bombana & Buton	Kolaka, Kolaka Utara & Konawe Selatan
21	Bali	Bangli, Jembrana, Karang Asem & Tabanan	Badung & Gianyar
22	Nusa Tenggara Barat		
23	Nusa Tenggara Timur	Malaka & Ngada	Belu, Sikka & Timor Tengah Selatan
24	Maluku	Maluku Tengah & Seram Bagian Barat	Buru
25	Maluku Utara		Halmahera Utara
26	Banten	Serang	
27	Bangka Belitung	Bangka Tengah	Bangka
28	Gorontalo	Boalemo & Pohuwato	
29	Kepulauan Riau		Bintan dan Kota Batam

No	Provinsi	Kuadran I	Kuadran IV
30	Papua Barat		Manokwari dan Sorong
31	Sulawesi Barat	Mamuju & Mamuju Utara	Majene
32	Kalimantan Utara	Malinau & Nunukan	Bulungan

Sumber : Penulis, diolah

Sedangkan daerah-daerah yang termasuk dalam kuadran I dan IV dengan perolehan alokasi DAK di bawah rerata nasional dan rerata provinsi tergambar pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pemetaan Daerah yang Memperoleh DAK di Bawah Rerata Nasional dan Rerata Provinsi, Menurut Provinsi

No	Provinsi	Kuadran I	Kuadran IV
1	Aceh	Bener Meriah	Aceh Tengah
2	Sumatera Utara	Langkat, Samosir, Tobasa	Dairi
3	Sumatera Barat		
4	Riau	Bengkalis	Kampar
5	Jambi	Sungai Penuh, Tanjung Jabung Timur	Bungo
6	Sumatera Selatan	Lahat, Oku Timur, Pagar Alam	Oki
7	Bengkulu		
8	Lampung	Lampung Utara	
9	Jawa Barat	Majalengka	
10	Jawa Tengah	Purbalingga, Tegal, Wonosobo	Kendal, Semarang
11	DI Yogyakarta	Bantul	
12	Jawa Timur	Bojonegoro	Tuban
13	Kalimantan Barat	Sintang	
14	Kalimantan Tengah		Kotawaringin Barat & Lamandau
15	Kalimantan Selatan	Kotabaru	
16	Kalimantan Timur	Panajem Paser Utara	
17	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	
18	Sulawesi Tengah		
19	Sulawesi Selatan	Bantaeng, Jeneponto & Takalar	
20	Sulawesi Tenggara	Bombana & Buton	
21	Bali	Karang Asem	Badung
22	Nusa Tenggara Barat		
23	Nusa Tenggara Timur	Malaka & Ngada	Belu, Sikka & Timor Tengah Selatan
24	Maluku		
25	Maluku Utara		
26	Banten		
27	Bangka Belitung	Bangka Tengah	Bangka
28	Gorontalo	Boalemo	
29	Kepulauan Riau		Bintan dan Kota Batam
30	Papua Barat		Manokwari dan Sorong

No	Provinsi	Kuadran I	Kuadran IV
31	Sulawesi Barat	Mamuju & Mamuju Utara	Majene
32	Kalimantan Utara	Nunukan	

Sumber : Penulis, diolah

5. Penutup

Dari hasil pemetaan yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Bidang Irigasi tahun anggaran 2019 masih belum sepenuhnya tepat sasaran untuk mencapai tujuan akhirnya, yakni mendorong pemantapan ketahanan pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan. Kesimpulan ini didasarkan pada masih adanya 38,28 persen daerah-daerah yang pengalokasiannya masih kurang tepat dengan tujuan penerapan kebijakan DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Bidang Irigasi. Hal ini terlihat dari masih terdapat 49 (empat puluh sembilan) daerah atau 34,03 persen daerah yang berada pada kuadran I memperoleh DAK Pertanian di bawah rerata nasional dan 69,39 persen atau 34 (tiga puluh empat) dari daerah-daerah tersebut memperoleh DAK Pertanian di bawah rerata provinsi. Selain itu, juga masih terdapat 31 (tiga puluh satu) atau 47,69 persen daerah yang berada pada kuadran IV memperoleh DAK Pertanian di bawah rerata nasional dan 64,52 persen atau 20 (dua puluh) dari daerah-daerah tersebut memperoleh DAK di bawah rerata provinsi.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya disparitas yang cukup besar antara daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan daerah-daerah diluar Pulau Jawa dan Bali terkait dengan daerah-daerah pada kuadran I dan IV yang memperoleh DAK di bawah rerata nasional. Disparitas yang cukup besar ini dapat disebabkan oleh perubahan mekanisme penetapan alokasi DAK sejak 2017 yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI, pengalokasian DAK tidak lagi menggunakan kriteria umum, kriteria khusus, maupun kriteria teknis. Metode baru ini akan berimplikasi pada pengalokasian DAK yang lebih didasarkan kepada kemampuan daerah (khususnya kapasitas SDM) untuk menyusun usulan dan mempersiapkan segala persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan kemampuan daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali dapat menjadi penyebab terjadinya disparitas yang cukup besar tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa pengalokasian DAK Pertanian dan Irigasi yang masih belum sepenuhnya tepat sasaran,

pengalokasian DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Bidang Irigasi pada tahun 2020 dan masa mendatang harus mampu memastikan bahwa daerah penerima alokasi DAK terbesar diutamakan bagi daerah yang kontribusi pertaniannya lebih besar dibanding daerah lain, akan tetapi memiliki kemandirian fiskal rendah. Setelah itu, prioritas kedua adalah daerah-daerah yang memiliki kontribusi pertaniannya tinggi dan kemampuan fiskalnya juga tinggi. Hal ini perlu dipastikan agar ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai tujuan akhir kebijakan dapat direalisasikan. Selain itu, pertimbangan untuk menerapkan kembali kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis dalam pengalokasian DAK juga perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini diperlukan karena adanya perbedaan karakteristik setiap wilayah dan kemampuan atau kapasitas antar wilayah, khususnya sumber daya manusia. Meskipun demikian, penggunaan kriteria-kriteria tersebut sebaiknya dilakukan setelah pemerintah terlebih dahulu melakukan evaluasi penyebab adanya disparitas antara daerah-daerah di dan di luar Pulau Jawa dan Bali.

Selain rekomendasi kebijakan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian dan analisis yang lebih komprehensif juga masih diperlukan kedepannya. Hal ini didasarkan pada masih adanya kelemahan pada penelitian ini. Salah satu kelemahan tersebut adalah belum dimasukkannya capaian *output* kegiatan dan realisasi pagu anggaran tahun sebelumnya serta belum dilakukan pembobotan terhadap setiap komoditas pertanian untuk setiap daerah yang memiliki karakteristik alam dan ekonomi yang berbeda-beda dalam penelitian ini²⁶. Pembobotan terhadap tiap komoditas perlu dilakukan agar ukuran kemampuan dan kontribusi produksi tiap daerah dapat lebih adil karena disesuaikan dengan karakteristik daerah yang memiliki alam, kondisi ekonomi dan keunggulan komoditas yang berbeda-beda. Selain itu, parameter yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam proses analisis adalah kondisi atau kontribusi tiap daerah dalam proses ekspor-impor antar pulau dan proporsi alokasi anggaran pertanian selain DAK. Kontribusi dalam proses ekspor-impor antar pulau diperlukan untuk melihat sejauh mana peran tiap daerah dalam memasok dan memenuhi kebutuhan pangan daerah lain. Untuk proporsi alokasi anggaran pertanian selain DAK, parameter ini dibutuhkan agar proses analisis juga memperhatikan prinsip pemerataan dalam pengalokasian DAK.

²⁶Belum masuknya variabel-variabel tersebut diakibatkan oleh keterbatasan data yang dimiliki oleh penulis.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017*. Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2018*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2017). *Mengenal Postur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dalam APBN*. Jakarta. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- Setiawan, M. Iwan. (2018). *Penggunaan Dana Transfer Khusus Bidang Kesehatan dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Desentralisasi Fiskal, Edisi 3, Volume III, Mei-Agustus 2018, hal 21-29.
- Wiyono, Masdar., Solihin, Firdaus., dan Susanto Putro, Sigit. (2017). *Aplikasi Penilaian Kuliah Kerja Nyata Universitas Trunojoyo Madura Menggunakan Metode Rating Scale*. Jurnal Ilmiah Rekayasa, Volume 10 No 1, April 2017, hal 23-33.
- _____. (2014). Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- _____. (2014). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- _____. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- _____. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- _____. (2018). *Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019*.
- _____. (2018). Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019.
- _____. (2018). Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

DAMPAK PENGGUNAAN ALAT MESIN PERTANIAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI

The Impact Of Agriculture Machine Tool For Farmers Welfare

Dahiri

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: dahiri@dpr.go.id

Abstract

The large budget of agricultural machine tools is expected to increase rice production so that the welfare level of farmers can also increase. However, this is inversely proportional, because throughout 2011 to 2018 the average level of welfare of farmers reflected in the NTPP is still below 100. Therefore this study purpose to knowing the impact of the use of agricultural machine tools type of two-wheeled tractor, rice trsanplanter, and water pump on welfare of farmers. The data used are secondary data consisting of two-wheeled tractor data, rice transplanters, water pumps, rice production, and NTPP based on provinces in Indonesia from 2011-2017. While the research method used is Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that the impact of Alsintan type of two-wheeled tractor and water pump had a positive and significant impact on the production and welfare of farmers. But, the type of rice trsanplanter has a negative and significant impact on the production and welfare of farmers. The recommendations given are firstly the calculation formula for procurement and distribution of agricultural machine tools by calculating the area of land and the level of welfare of farmers. Second, recipients of agricultural machine tools assistance for government agencies in the Province / District or the alsintan brigade are deleted.

Keywords : Agricultural machine tools, that the welfare level of farmers, formula

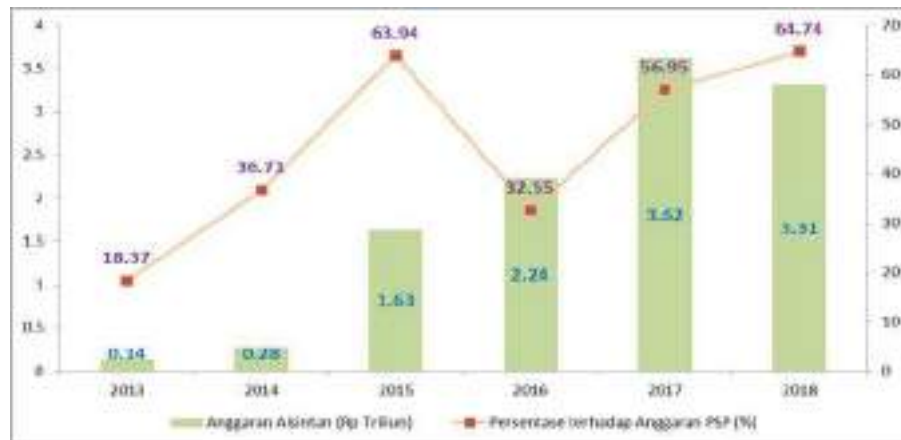
1. Pendahuluan

Peningkatan produksi pangan pokok khususnya padi merupakan upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan. Peningkatan tersebut dilakukan dengan memodernisasi pertanian. Modernisasi pertanian merupakan transformasi pengolahan lahan pertanian dari tenaga manusia digantikan dengan alat mesin pertanian (alsintan). Penggunaan ini diharapkan dapat meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas pertanian.

Untuk mempercepat penggunaan alsintan, maka pemerintah setiap tahunnya cenderung meningkatkan anggaran pengadaannya. Proporsi anggaran

tersebut juga semakin besar dibandingkan dengan prasarana dan sarana pertanian lainnya (Gambar 1).

Gambar 1. Perkembangan Anggaran Alsintan

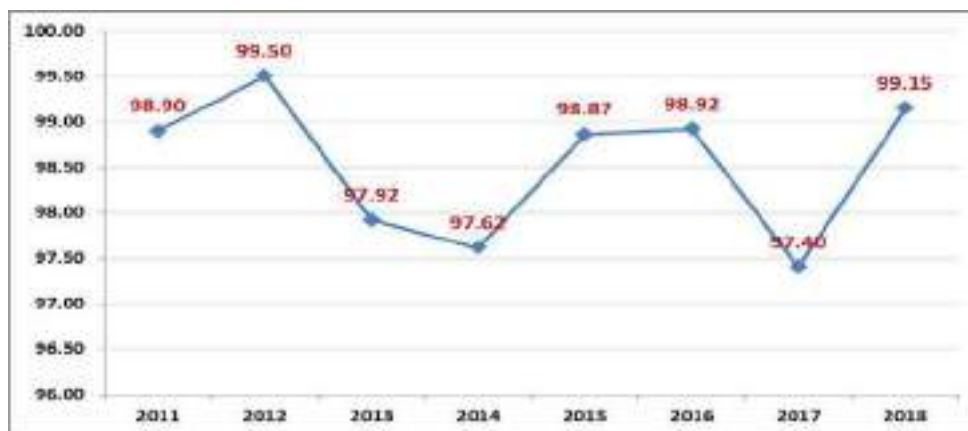


Sumber: Ditjen PSP, diolah

Dari gambar 1 terlihat bahwa proporsi anggaran untuk alsintan dari tahun 2013 hanya sebesar 18,37 persen dengan anggaran Rp0,14 triliun menjadi 64,74 persen pada tahun 2018 dengan anggaran Rp3,31 triliun. Proporsi hanya mengalami sedikit penurunan pada tahun 2016.

Pengadaan alsintan terbesar yaitu traktor roda dua, *rice transplanter*, dan pompa air. Ketiga alsintan ini merupakan alsintan untuk hulu produksi pertanian. Besarnya anggaran alsintan tersebut sangat diharapkan dapat meningkatkan produksi padi, sehingga tingkat kesejahteraan petani juga dapat meningkat. Namun, hal tersebut belum terwujud juga karena sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2018 rata-rata tingkat kesejahteraan petani yang tercermin dalam Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) masih di bawah 100 (Gambar 2).

Gambar 2. Perkembangan Rata-rata NTPP Nasional



Sumber : Kementan, diolah

Tingkat kesejahteraan petani dapat dikatakan sejahtera apabila nilainya lebih dari 100. Namun, data menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan petani tanaman pangan secara nasional masih dibawa 100. Artinya petani selama ini belum mencapai tingkat kesejahteraan, padahal anggaran pengadaan setiap tahunnya terus meningkat. Padahal beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Komariyati et al, Salmiah et al, Setiawan et al, Suhendrata, dan saleh terkait manfaat alsintan menunjukkan bahwa penggunaan alsintan jenis traktor, *rice trsanplanter*, dan pompa air berdampak positif terhadap kesejahteraan petani. Dengan hasil penelitian ini seharusnya kesejahteraan petani dapat meningkat, karena anggaran alsintan yang terus meningkat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di jelaskan dapat disimpulkan bahwa anggaran alsintan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, tapi kesejahteraan petani belum mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan sinyalemen negatif terhadap dampak penggunaan alsintan. Karena itu, penelitian ini akan meneliti terkait dampak pengunaan alsintan (traktor roda dua, *rice transplanter*, dan pompa air) terhadap kesejahteraan petani. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adanya penurunan kesejahteraan petani.

Sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada di atas, maka ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dampak penggunaan traktor roda dua terhadap kesejahteraan petani.
- 2) Untuk mengetahui dampak penggunaan *rice transplanter* terhadap kesejahteraan petani.
- 3) Untuk mengetahui dampak penggunaan pompa air terhadap kesejahteraan petani.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP).

Nilai Tukar Petani merupakan perbandingan antara indeks yang diterima petani (It) dengan indeks yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase, sehingga NTPP dapat menggambarkan tingkat daya beli petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan usaha taninya. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP dapat digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk melihat tingkat kesejahteraan petani secara cepat atau jangka pendek, dengan asumsi kesamaan kuantitas produksi antar waktu. Dalam jangka menengah/panjang,

NTP akan lebih akurat bila diiringi dengan indikator volume produksi pertanian atau sumber pendapatan lain. NTP juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga (Pusdatin Kementan, 2018). Sedangkan nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP) merupakan NTP berdasarkan sektor pertaniannya.

2.2. Peningkatan Produksi Pertanian

Produksi pertanian pendapatan petani secara langsung ditentukan oleh besarnya produksi yang dihasilkan petani, sedangkan besarnya produksi tersebut dipengaruhi oleh penguasaan lahan yang dikuasai dan produktivitas usaha tani. Dalam kaitan dengan lahan pertanian, data menunjukkan ketersediaan lahan pertanian per kapita mengalami penurunan akibat peningkatan jumlah penduduk dan kecenderungan konversi lahan, terutama untuk lahan sawah. Ketersediaan lahan yang sesuai untuk pertanian yang sangat terbatas perlu dilindungi. Kebijakan untuk mencegah terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian telah banyak dibuat. Telah banyak ditetapkan undang-undang dan peraturan Pemerintah lain yang mengatur tentang pendayagunaan lahan dan pengendalian konversi lahan. Kebijakan terakhir adalah dengan diterbitkannya UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Secara umum, undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan dalam rangka menjamin tersedianya lahan pertanian dan mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Selain perlindungan lahan, peningkatan produksi pertanian sangat perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Sarana jalan usaha tani tidak memadai untuk mendukung peningkatan/pengembangan pertanian, antara lain dalam hal adopsi teknologi, pemasaran secara efisien, dan pemanfaatan mekanisasi (Bappenas, 2013).

2.3 Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) Tepat Guna Pada Tanaman Padi

Teknologi tepat guna secara sederhana diartikan sebagai teknologi yang dapat dibuat atas dasar ketersediaan komponen lokal, dan dapat dikembangkan oleh sumber daya manusia lokal pula (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994). Jika dikaitkan dengan keberadaannya maka *hand tractor*, *power thresher*, *pedal thresher*, dan alat penyemprot hama merupakan alsintan yang seluruh komponennya hampir dapat diciptakan dan dikembangkan secara

lokal. Pengembangan alsintan dapat membantu penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat/petani, dalam bidang pendapatan untuk pemilik atau pengusaha alat, operator dan bengkel-bengkel pengerajin (Dinas Pertanian, 1997).

Pemilihan tipe dan ukuran alsintan umumnya dihubungkan dengan luas areal dan jenis tanaman. Alsintan yang selektif dalam pemakaiannya akan mampu menjamin keberhasilan petani pada tingkat komersil. Diantara berbagai manfaat yang dapat diperoleh dengan penggunaan alsintan adalah penurunan upah tenaga kerja yang merupakan komponen biaya produksi yang cukup besar, peningkatan produktivitas lahan dengan tercapainya pengolahan tanah yang lebih sempurna, percepatan waktu dalam penanaman, pemeliharaan dan panen, serta mengurangi kerugian akibat kehilangan hasil disaat panen (Daulay, 1999).

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data traktor roda dua, *rice transplanter*, pompa air, produktivitas padi, produksi padi, dan NTPP berdasarkan provinsi di Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Utara.

3.2. Model Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan bentuk persamaan sebagai berikut :

$$\eta = B\eta + \Gamma\xi + \zeta$$

$$X = Ax\eta + \delta$$

Keterangan :

Γ : Matrik m x n koefisien pengaruh variabel laten *exogenous* dalam persamaan struktural.

B : Matrik m x n koefisien variabel endogen dalam hubungan struktural.

A : Matrik q x n koefisien regresi x terhadap variabel laten eksogenus.

3.3 Penelitian Terdahulu

Komariyati *et al* (2018) penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Traktor Terhadap Pendapatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Pada usaha tani Padi di Kabupaten Sambas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis

pengaruh penggunaan traktor terhadap pendapatan dan penggunaan tenaga kerja pada usaha tani padi. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan traktor untuk pengolahan tanah dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani padi. Penggunaan traktor pada pengolahan tanah telah meningkatkan produktivitas sebesar 667 kg/ha. Penggunaan traktor pada pengolahan tanah juga telah meningkatkan pendapatan sebesar Rp.2.843.400,-/ha, walaupun meningkatkan biaya. Tenaga kerja dalam dan luar keluarga petani tersedia untuk pengolahan tanah, namun umumnya petani memilih menggunakan traktor untuk pengolahan tanah. Penggunaan traktor telah mengurangi penggunaan tenaga kerja sehingga dapat mempercepat kegiatan persiapan lahan dan penanaman. Petani yang tidak menggunakan traktor karena faktor lingkungan usaha tani, yaitu tidak tersedianya pengairan yang memadai.

Salmiah *et al* (2016) penelitian dengan judul Analisis Dampak Penerapan Mekanisasi Usaha tani Padi Terhadap Pendapatan dan Tenaga Kerja di Desa Namu Ukur Utara Kecamatan Sei Bingie Kabupaten Langkat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan, biaya produksi, dan pendapatan usaha tani padi sebelum dan sesudah penerapan mekanisasi pertanian padi di Desa Namu Ukur Utara. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Sampel yang digunakan adalah petani padi sawah yang melakukan mekanisasi padi sawah dengan *hand tractor*. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji beda berpasangan menggunakan aplikasi SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan penerimaan biaya dan pendapatan petani antara sebelum melakukan mekanisasi dengan traktor dan sesudah melakukan mekanisasi dengan traktor. Produksi gabah kering panen per HKP sesudah mekanisasi lebih besar, penerimaan per HKP sesudah mekanisasi lebih besar dan efisiensi tenaga kerja sesudah mekanisasi dengan lebih efisien dibandingkan tenaga kerja sebelum mekanisasi.

Setiawan *et al* (2016) penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Teknologi Mesin *Rice Transplanter* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha tani Padi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi petani di daerah penelitian dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani padi di daerah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sosial ekonomi petani padi yang menggunakan mesin *rice transplanter* di daerah penelitian berdasarkan distribusi terbesar pada

kelompok umur 30 hingga 45 tahun sebanyak 25 orang (92,60%), distribusi terbesar pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 10 orang (37,04%), distribusi terbesar pengalaman usaha tani padi antara 11-30 tahun sebanyak 15 orang (55,56%) dan distribusi terbesar pada luas lahan adalah lebih dari 2700m² sebanyak 20 orang (74,07%). Kemudian pendapatan usaha tani padi di Desa Payaman setelah masuknya teknologi mesin *Rice Transplanter* paling besar dipengaruhi oleh luas lahan (X1), biaya bibit (X4), biaya pupuk (X5) serta penggunaan mesin (D1). Variabel-variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap pendapatan usaha tani padi di Desa Payaman serta pengaruh tersebut bersifat signifikan atau berpengaruh secara nyata karena hasil analisis menunjukkan signifikansi kesalahan dibawah 5%.

Suhendrata (2013) penelitian dengan judul Prospek Pengembangan Mesin Tanam Pindah Bibit Padi Dalam Rangka Mengatasi Kelangkaan Tenaga Kerja Tanam Bibit. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelayakan teknis dan finansial *rice transplanter* ditinjau dari usaha jasa dan usaha tani padi menggunakan *rice transplanter* dalam upaya mengatasi kelangkaan tenaga kerja tanam bibit padi. Kehadiran *rice transplanter* pada kondisi lahan sawah datar, petakan luas dan kedalaman lumpur kurang dari 40 cm dapat membantu memecahkan masalah kekurangan tenaga tanam pindah bibit padi. Usaha jasa *rice transplanter* layak dijalankan dan dikembangkan dengan NPV selama 5 tahun pada tingkat bunga modal 12% adalah Rp22,4 juta, $IRR = 59,59\%$, $gross\ B/C = 1,26$ dan $PP = 2,42$ tahun. Tanam menggunakan *rice transplanter* dapat meningkatkan pendapatan 13 usaha tani padi sebesar Rp2.690.000/ha/musim tanam dengan marginal B/C sebesar 23,42 sehingga tanam menggunakan *rice transplanter* sangat layak untuk diterapkan secara luas. Penggunaan *rice transplanter* dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemberi jasa (pemilik *rice transplanter*) dan pengguna jasa (petani pengguna *rice transplanter*).

Saleh (1983) penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Pompa Air Terhadap Tingkat Pendapatan Petani (Studi Kasus di Daerah Karawang-Bekasi Jawa Barat). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa pengaruh penggunaan pompa air terhadap tingkat pendapatan petani dari usaha tani padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah petani memakai pompa air terjadi peningkatan, pola tanam, produktivitas, dan pendapatan usaha tani padi. Akan tetapi di lain pihak pengusaha pompa air secara finansial tidak menguntungkan

karena nilai sewa yang diterima oleh pengusaha pompa air hanya dapat menutup biaya operasi saja.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Pengaruh Penggunaan Traktor Terhadap Pendapatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Pada Usaha tani Padi di Kabupaten Sambas	Menganalisis pengaruh penggunaan traktor terhadap pendapatan atau kesejahteraan petani.	Penelitian terdahulu menggunakan variabel traktor, pendapatan atau kesejahteraan petani, dan tenaga kerja di satu daerah tertentu. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel traktor roda dua, <i>rice transplanter</i> , pompa air, produktivitas padi, produksi padi, dan NTPP seluruh provinsi kecuali kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Utara.
Analisis Dampak Penerapan Mekanisasi Usaha tani Padi Terhadap Pendapatan dan Tenaga Kerja di Desa Namu Ukur Utara Kecamatan Sei Bingie Kabupaten Langkat	Menganalisis dampak <i>hand</i> traktor terhadap pendapatan atau kesejahteraan petani.	Penelitian terdahulu menggunakan variabel traktor, pendapatan atau kesejahteraan petani, dan tenaga kerja di satu daerah tertentu. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel traktor roda dua, <i>rice transplanter</i> , pompa air, produktivitas padi, produksi padi, dan NTPP seluruh provinsi kecuali kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Utara.
Pengaruh Penggunaan Teknologi Mesin <i>Rice Transplanter</i> Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha tani Padi	Menganalisis dampak teknologi mesin <i>rice transplanter</i> Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha tani Padi (kesejahteraan petani)	Penelitian terdahulu menggunakan variabel mesin <i>rice transplanter</i> , pendapatan atau kesejahteraan petani di satu daerah tertentu. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel traktor roda dua, <i>rice transplanter</i> , pompa air, produktivitas padi, produksi padi, dan NTPP seluruh provinsi kecuali kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Utara.
Prospek Pengembangan Mesin Tanam Pindah Bibit Padi Dalam Rangka Mengatasi Kelangkaan Tenaga Kerja Tanam Bibit	Menganalisis dampak Pengembangan Mesin Tanam Pindah Bibit Padi	Penelitian terdahulu menggunakan variabel Mesin Tanam Pindah Bibit Padi di satu daerah tertentu. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel traktor roda dua, <i>rice transplanter</i> , pompa air, produktivitas padi, produksi padi, dan NTPP seluruh provinsi kecuali kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Utara.

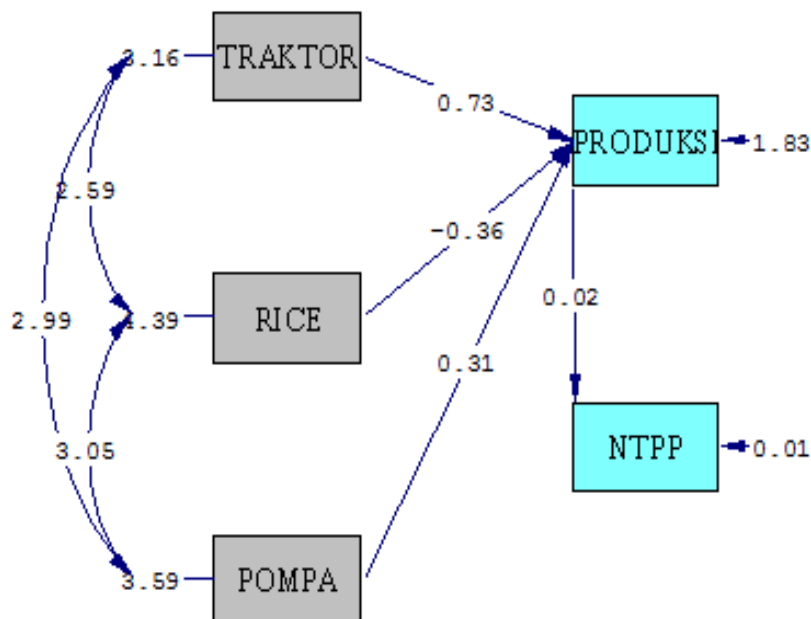
Pengaruh Penggunaan Pompa Air Terhadap Tingkat Pendapatan Petani (Studi Kasus di Daerah Karawang-Bekasi Jawa Barat)	Menganalisis penggunaan pompa air terhadap Tingkat Pendapatan Petani	Penelitian terdahulu menggunakan variabel pompa air di satu daerah tertentu. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel traktor roda dua, <i>rice transplanter</i> , pompa air, produktivitas padi, produksi padi, dan NTPP seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Utara.
---	--	--

Pada penelitian-penelitian terdahulu lebih bersifat parsial dengan studi kasus masing-masing daerah. Sedangkan penelitian ini menggunakan data nasional sehingga kebijakan anggaran yang telah didistribusikan dapat dianalisis lebih komprehensif dan dapat diambil kesimpulan secara nasional.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Hasil Analisis Data.

Gambar 3. Analisis Jalur Alsinan



Sumber: Penulis

Berdasarkan gambar 3, maka model struktural diperoleh yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Produksi} &= 0,73 * \text{Traktor} - 0,36 * \text{Rice} + 0,31 * \text{Pompa} \quad , \text{Errorvar} = 1,83, R^2 = 0,51 \\ &\quad \begin{matrix} (0,11) & (0,068) & (0,12) \\ 6,57 & -5,24 & 2,63 \end{matrix} \\ \text{NTPP} &= 0,015 * \text{Traktor} - 0,0074 * \text{Rice} + 0,0064 * \text{Pompa} \quad , \text{Errorvar} = 0,0076, R^2 = 0,098 \\ &\quad \begin{matrix} (0,0031) & (0,0017) & (0,0026) \\ 4,85 & -4,24 & 2,47 \end{matrix} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan di atas, maka dampak alsintan jenis traktor roda dua dan pompa air berdampak positif dan signifikan terhadap produksi dan kesejahteraan petani. Sedangkan alsintan jenis *rice transplanter* berdampak negatif dan signifikan terhadap produksi dan kesejahteraan petani.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Dampak Traktor Roda Dua Terhadap Kesejahteraan Petani.

Dampak traktor roda dua terhadap kesejahteraan petani sebelumnya telah dilakukan oleh Komariyati *et al* dan Salmiah *et al* . Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan traktor dapat meningkatkan pendapatan petani. Hasil penelitian tersebut sama dengan hasil dalam penelitian ini. Dari hasil analisis data diperoleh bahwa traktor berdampak langsung terhadap produksi padi. Sedangkan dampak traktor terhadap tingkat kesejahteraan berdampak secara tidak langsung. Traktor merupakan jenis alsintan paling memiliki dampak yang terbesar terhadap tingkat kesejahteraan petani.

Dampak traktor bagi petani adalah kemudahan dalam pengolahan tanah. Apabila pengolahan tanah tanpa traktor dengan pembajaknya menggunakan hewan seperti kerbau, maka pengolahannya sangat tergantung pada tenaga manusia dan hewan sebagai alat pembajaknya. Hasil yang diperoleh sangat bergantung pada kondisi fisik manusia maupun hewan pembajaknya. Hasil pengolahan tanah dengan traktor akan lebih baik, karena sistem kerja yang terukur. Perbedaan hasil pengolahan tanah tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian Komaria *et al* bahwa produktivitas di kecamatan Tebas dengan luas panen 6835 menghasilkan produktivitas 2248 kg per ha. Sedangkan kecamatan Semparuk dengan luas panen 4350 ha menghasilkan produktivitas 2925 kg per ha. Hasil produktivitas tersebut dilakukan uji beda dengan hasil adanya perbedaan yang nyata dan signifikan antara kedua produktivitas. Hal ini

menunjukkan bahwa produktivitas tanah dengan menggunakan traktor lebih tinggi dari pengolahan tanah tanpa traktor. Dengan meningkatnya produktivitas, maka produksi padi juga akan meningkat. Dengan kata lain penggunaan traktor akan berdampak pada peningkatan produksi. Sedangkan dampak produksi terhadap tingkat kesejahteraan petani dapat juga dilihat dari hasil penelitian Salmiah *et al.* Rata-rata R/C rasio tanpa menggunakan traktor sebesar 1,466. Sedangkan rata-rata R/C rasio dengan menggunakan traktor sebesar 1,848. R/C keduanya lebih besar dari 1, maka usaha tani padi yang dilakukan dianggap layak dan menguntungkan. Artinya setiap Rp1 dari total biaya tanpa menggunakan traktor akan menghasilkan Rp1466 dan setiap Rp1 dari total biaya dengan menggunakan traktor akan menghasilkan Rp1848. Jadi R/C rasio dengan menggunakan traktor lebih besar dari pengolahan tanah tanpa menggunakan traktor. Dengan demikian jelas bahwa dampak penggunaan traktor roda dua berdampak positif terhadap kesejahteraan petani.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan traktor roda dua berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Namun, hasil ini masih belum selaras dengan hasil tingkat kesejahteraan petani yang tercermin dalam NTPP. Sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2018 rata-rata NTPP nasional masih di bawah 100. Angka ini menunjukkan bahwa petani belum sejahtera karena nilai NTPP kurang dari 100. Petani dapat dikatakan sejahtera apabila NTPP lebih dari 100. Apabila tingkat kesejahteraan dilihat berdasarkan wilayah, maka NTPP yang lebih dari 100 berada pada wilayah pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan wilayah lainnya di bawah 100 (Gambar 4).

Gambar 4. Rata-rata NTPP Tahun 2011-2018 Berdasarkan Wilayah



Sumber : Kementan, diolah

Berdasarkan rata-rata NTPP berdasarkan wilayah, maka hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa dampak positif penggunaan traktor roda terhadap tingkat kesejahteraan karena didominasi oleh pulau Sumatera dan Jawa. Hal ini

menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam peningkatan kesejahteraan petani.

Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan petani yaitu pengadaan dan pendistribusian alsintan khususnya traktor. Kriteria pengadaan dan distribusi yang berlaku saat ini belum mencerminkan luas wilayah dan tingkat kesejahteraan petani masing-masing wilayah. Karena itu, terdapat daerah yang sangat kekurangan alsintan traktor tersebut. Keberadaan traktor sangat dinantikan oleh para petani. Namun, menurut Fadholi jumlah traktor yang telah didistribusikan selama ini juga masih kurang. Kekurangan tersebut masih terjadi di Jawa Tengah khususnya dan Indonesia umumnya masih kekurangan. Hal serupa disampaikan Ruswandi, Ketua Kelompok Tani Sabilulungan di Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Sukabumi, Jawa Barat. Dia mengharap bantuan traktor karena mayoritas lahan sawah di wilayah selatan itu bertipe tadah hujan. Selain kekurangan jumlah traktor per kelompok tani masih minim seperti satu gabungan kelompok tani yang beranggotakan 25 orang hanya punya satu alsintan, dan akhirnya petani berinisiatif mengadakan sendiri dengan cara seadanya. Sedangkan di Bangka jumlah alsintan juga belum sebanding dengan 24.613 ha luas sawah yang ada²⁷. Selain itu hasil tinjau lapangan Kasriyah Komisi IV DPR RI diperoleh bahwa para petani memerlukan alsintan yang saat ini belum semuanya memilikinya. Seperti *hand tractor* yang dibutuhkan untuk menggarap sawah yang luas, khususnya di luar Pulau Jawa²⁸.

Persoalan pengadaan dan pendistribusian di atas harus menjadi perhatian pemerintah. Upaya yang harus dilakukan adalah menggunakan perhitungan dengan luas lahan sawah dan tingkat kesejahteraan petani. Proporsi untuk luas lahan sebesar 60 persen, sedangkan tingkat kesejahteraan petani sebesar 40 persen. Kemudian tingkat kesejahteraan perlu dibuat kategori sebagai berikut :

Tabel 2. Kategori NTPP

Tingkat Kesejahteraan Petani (NTPP)	Persentasi (%)
NTPP < 95	40
$95 \leq \text{NTPP} < 100$	30
$100 \leq \text{NTPP} < 105$	15
$105 \leq \text{NTPP} < 110$	10

²⁷ Fadholi. 2018. Indonesia Masih Alami Kekurangan Alsintan.

²⁸ Kasriyah. 2019. PPP Harap Jumlah Bantuan Alsintan untuk Petani Semakin Banyak.

$110 \leq \text{NTPP}$	5
------------------------	---

Sumber: penulis

Dari Tabel 2 diperoleh formula pengadaan dan pendistribusian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Alsintan Provinsi/Kabupaten A} = & ((\text{Persentase Luas Lahan Provinsi/Kabupaten A}) \times (60\%)(\text{Jumlah Ketersediaan Alsintan})) \\ & + \left(\left(\frac{\text{Persentase NTPP Provinsi/Kabupaten A}}{\sum \text{Persentase NTPP Provinsi/Kabupaten}} \right) \times (40\%)(\text{Jumlah Ketersediaan Alsintan}) \right) \end{aligned}$$

Hasil simulasi formulasi di atas diberikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Simulasi Perhitungan Alokasi Traktor Per Provinsi

Provinsi	Persentase Luas Lahan Sawah (%)	NTPP	Persentase NTPP (%)	Jumlah Pengadaan Traktor	Jumlah Alokasi Traktor Per Provinsi
Provinsi Aceh	3.62	91.53	40	50000	2488.31
Provinsi Sumatera Utara	5.10	93.72	40	50000	2934.76
Provinsi Sumatera Barat	2.73	92.02	40	50000	2221.38
Provinsi Riau	0.86	102.11	15	50000	784.24
Provinsi Jambi	1.20	96.71	10	50000	710.74
Provinsi Sumatera Selatan	7.64	99.7	10	50000	2641.82
Provinsi Bengkulu	1.01	97.93	10	50000	654.53
Provinsi Lampung	4.87	116.11	5	50000	1636.42
Provinsi Kep. Bangka Belitung	0.17	92.31	40	50000	1453.90
Provinsi Kep. Riau	0.00	96.3	30	50000	1053.77
Provinsi Jawa Barat	11.20	106.06	10	50000	3709.79
Provinsi Jawa Tengah	11.69	102.51	15	50000	4032.34
Provinsi Di Yogyakarta	0.63	106.29	10	50000	540.01
Provinsi Jawa Timur	13.28	107.31	10	50000	4336.24
Provinsi Banten	2.45	104.51	10	50000	1085.45
Provinsi Bali	0.92	97.84	10	50000	625.55
Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.39	112.04	5	50000	1193.28
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.26	108.25	10	50000	1029.96
Provinsi Kalimantan Barat	4.53	95.42	10	50000	1709.18
Provinsi Kalimantan Tengah	2.21	95.29	10	50000	1014.08
Provinsi Kalimantan Selatan	5.50	93.5	15	50000	2176.34
Provinsi Kalimantan Timur	0.73	94.57	15	50000	745.22
Provinsi Kalimantan Utara	0.74	93.53	15	50000	746.92
Provinsi Sulawesi Tengah	1.66	92.65	15	50000	1025.24
Provinsi Sulawesi Selatan	7.94	99.45	10	50000	2732.78
Provinsi Sulawesi Tenggara	1.33	89.04	40	50000	1803.07
Provinsi Gorontalo	0.40	107.28	10	50000	471.27
Provinsi Sulawesi Barat	0.79	100.15	15	50000	762.93
Provinsi Maluku	0.21	107.33	10	50000	412.51
Provinsi Maluku Utara	0.16	100.09	15	50000	575.02
Provinsi Papua Barat	0.13	95.74	30	50000	1092.19
Provinsi Papua	0.66	85.53	40	50000	1600.75
Total	100		570		50000

Sumber: Simulasi penulis

Dengan perhitungan pengadaan dan pendistribusian alsintan traktor menggunakan formulasi di atas, maka sebaran alsintan traktor akan lebih berkeadilan, karena indikator luas lahan dan tingkat kesejahteraan menjadi elemen dalam perhitungannya.

4.2.2. Dampak *Rice Transplanter* Terhadap Kesejahteraan Petani.

Dampak *rice transplanter* terhadap kesejahteraan petani sebelumnya telah dilakukan oleh Setiawan *et al* dan Suhendrata. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan *rice transplanter* dapat meningkatkan pendapatan petani. Hasil penelitian tersebut tidak sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dari hasil analisis data diperoleh bahwa *rice transplanter* berdampak langsung terhadap produksi padi. Sedangkan dampak *rice transplanter* terhadap tingkat kesejahteraan berdampak secara tidak langsung. *Rice transplanter* merupakan jenis alsintan paling tidak berdampak terhadap tingkat kesejahteraan petani.

Keberadaan *rice transplanter* ini akan menggeser para jasa buruh tani maupun buruh tani sekaligus penggarap. Mesin ini sangat berguna pada kondisi wilayah buruh taninya yang minim. Perbedaan biaya menurut Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Kementan, secara umum rata-rata biaya tanam padi secara manual sekitar Rp 1,72 juta/ha, sedangkan dengan mesin *transplanter* jarwo 2:1 sekitar Rp 1,1 juta/ha. Sebagai contoh Gapoktan Madiun Bersatu di Dusun Parit Madiun, Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Petani sudah sangat menggantungkan kegiatan tanam pada mesin *transplanter* Jarwo 2:1. Biaya tanam padi secara manual dengan metode tanam Jarwo sebesar Rp. 1,8 juta per ha dan dengan Jarwo *Transplanter* hanya Rp 1,4 juta per ha. Fakta lainnya, sambung Andi Nur Alam, dirasakan juga oleh Kelompok Tani Suka Maju, Dusun Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dengan menggunakan mesin *rice trsanplanter*, biaya tanam secara manual untuk cara jarwo Rp 2 juta per ha. Sedangkan dengan *transplanter* sebesar Rp 1,9 juta per ha dengan rata-rata produktivitas padi dengan metode tanam Jajar Legowo mencapai 7,5 ton per ha²⁹. Jadi perbedaan biaya penanaman padi *rice trsanplanter* dengan manual berkisar Rp0,1 juta/ha sampai Rp0.62 juta/ha. Lain halnya dengan alsintan traktor, tidak semua petani atau buruh tani dapat membajak sawah secara manual. Sedangkan pada

²⁹ Ditjen PSP. 2019. Dampak Positif Bantuan Alsintan Makin Dirasakan Petani.

penanaman padi, rata-rata petani dapat melakukannya secara manual. Hal ini yang dapat menjadi penyebab dampak negatif *rice transplanter* terhadap tingkat kesejahteraan petani.

Selain itu sistem bawon para buruh tani atau sekaligus petani akan menjadi hilang. Pada umumnya siapa yang menanam, maka si penanam sendiri akan memanennya dengan upah sistem bawon pada saat panen. Dengan penanaman menggunakan *rice transplanter* jelas akan menggeser posisi para buruh tani tersebut. Artinya petani tersebut akan kehilangan penghasilan dari sistem bawon yang selama ini dilakukan. Padahal perlu diketahui juga bahwa persentase rumah tangga pertanian (RTP) menurut sumber penghasilan terbesarnya berdasarkan Susenas tahun 2015 - 2017 (Gambar 5), sektor pertanian luas menjadi sumber penghasilan terbesar untuk 79,67% RTP. Sumber penghasilan lainnya secara umum hanya di bawah 5% saja, yaitu dari perdagangan, hotel dan rumah makan sebesar 3,74%, konstruksi bangunan 2,96%, industri pengolahan 2,38% (Gambar 5).

Tabel 4. Persentase RTP Menurut Sumber Penghasilan 2015-2017

Sumber Penghasilan Terbesar	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
1 Pertanian	74.48	84.58	80.32	72.77	83.65	79.01	72.84	84.56	79.67
2 Pertambangan dan penggalian	0.82	1.13	1.00	0.57	0.96	0.80	0.35	0.76	0.59
3 Industri pengolahan	5.23	1.51	3.08	2.89	1.03	1.82	3.74	1.41	2.38
4 Listrik dan gas	0.16	0.14	0.15	0.14	0.11	0.12	0.24	0.21	0.22
5 Konstruksi/bangunan	5.52	2.59	3.83	5.10	2.47	3.59	4.18	2.09	2.96
6 Perdagangan, hotel, dan rumah makan	6.89	3.32	4.83	5.27	2.29	3.56	5.21	2.69	3.74
7 Transportasi, pergudangan, informasi, dan komunikasi	1.38	1.27	1.32	1.18	1.15	1.16	1.24	1.06	1.13
8 Keuangan dan asuransi	0.29	0.13	0.20	0.23	0.09	0.15	0.14	0.14	0.14
9 Jasa	4.59	4.72	4.66	3.56	3.74	3.66	1.21	0.66	0.89
10 Penerima pendapatan	-	-	-	8.05	4.23	5.86	8.82	3.59	5.77
11 Lainnya	0.63	0.60	0.62	0.24	0.26	0.25	2.02	2.84	2.50
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS, Pusdatin Kementan

Apabila dilihat dari Gambar 5, maka daerah luar Jawa belum begitu tepat menggunakan *rice transplanter*, karena sumber penghasilan utamanya dari pertanian sebesar 84,56 persen. Selain itu, *rice transplanter* merupakan solusi pada daerah yang tenaga buruh taninya minim. Dengan penggunaan *rice transplanter*, maka kekurangan tenaga buruh tersebut dapat di atasi. Sedangkan

pada daerah yang masih banyak buruh taninya, maka hasilnya akan berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan, karena buruh akan kehilangan sumber penghasilan utamanya.

4.2.3. Dampak Pompa Air Terhadap Kesejahteraan Petani.

Dampak pompa air terhadap kesejahteraan petani sebelumnya telah dilakukan oleh Saleh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Saleh dapat meningkatkan pendapatan petani. Hasil penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dari hasil analisis data diperoleh bahwa pompa air berdampak langsung terhadap produksi padi. Sedangkan dampak pompa air terhadap tingkat kesejahteraan berdampak secara tidak langsung. Pompa air merupakan jenis alsintan paling memiliki dampak yang terbesar kedua terhadap tingkat kesejahteraan petani.

Pompa air merupakan solusi yang tepat khususnya saat musim tanam di musim kemarau. Pada kemarau jelas debit air akan berkurang dari biasanya, sehingga aliran air untuk mengairi persawahan akan menjadi lambat atau tidak semua dapat teraliri. Kebutuhan air ini merupakan sangat vital dalam dunia pertanian khususnya padi. Kekurangan air akan berdampak pada kegagalan panen. Karena itu perlunya penggunaan pompa air. Namun, adanya bantuan pompa air belum tentu juga diikuti dengan ada sumur bor atau mata air terdekat. Hal ini juga disampaikan oleh Sudirman, petani di Bakti Rasa, Sragi, air di saluran irigasi sebagian besar sudah menyusut, sehingga untuk mengairi sawahnya harus menggunakan pompa air untuk dialirkan ke sawah-sawah petani. "Masalahnya, kalau masih musim kemarau air irigasi atau embung kering, petani sulit mencari air lagi," ujarnya saat dihubungi. Ia mengaku kesulitan bila mencari air yang jauh dari sawahnya. Sedangkan untuk sumur bor dekat dengan sawah masih belum tersedia. Sedangkan tanaman padi di sawah memasuki musim panen beberapa waktu yang akan datang. Bila sawah tidak dialirkan air diperkirakan terancam gagal panen. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, Agus Santoso telah mensosialisasikan penggunaan pompa air untuk mengalirkan air ke sawah-sawah petani. Air saluran irigasi sudah tidak memungkinkan lagi menjangkau sawah-sawah petani, karena debitnya sudah menyusut termasuk juga embung. Pihaknya meminta petani harus mengoptimalkan pompanisasi agar tanaman padi tidak mati pada musim kering sekarang. Tujuan menggunakan pompa saat

ini, agar tanaman padi bisa bertahan sehingga ancaman gagal panen dapat teratasi³⁰.

Penggunaan pompa air ini jelas sangat dibutuhkan oleh para petani khususnya pada musim kemarau. Desakan kebutuhan ini juga dikarenakan irigasi di Indonesia mengalami kerusakan sebesar 40 persen³¹. Namun, pendistribusian alsintan khususnya pompa air masih terdapat persoalan yang ditemukan. Pompa air hanya dimiliki oleh beberapa petani saja, sedangkan petani lainnya tidak sanggup untuk membeli. Sedangkan Distan hanya memberikan pinjaman pompa air secara gratis³². Artinya para petani atau kelompok tani tidak memiliki pompa air sehingga mereka harus meminjam ke distan. Kemudian adanya pembentukan brigade untuk untuk optimalkan alsintan. Brigade ini jelas akan memperpanjang rantai administrasi untuk peminjaman alat, dan peminjaman tidak bisa dalam waktu mendesak dikarenakan harus memenuhi administrasi. Brigade ini juga tetap akan membuat para petani tidak memiliki pompa, karena brigade hanya meminjamkan alsintan yang diperlukan. Padahal yang memiliki lahan adalah para petani. karena itu perlunya efisiensi dalam pendistribusian alsintan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian harus merubah kriteria penerima bantuan alsintan, yaitu penerima hanya masyarakat (Kelompok Tani/ Gapoktan/ UPJA/ Korporasi Petani/ Masyarakat Tani/ Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian). Sedangkan instansi pemerintah di daerah Provinsi/Kabupaten dihapuskan. Posisi instansi pemerintah daerah lebih fokus untuk mendistribusikan alsintan supaya tepat sasaran. Untuk pengoptimalan penggunaan alsintan, maka kementerian pertanian harus mengoptimalkan jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian yang telah ditetapkan dalam Permenpan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian. Berdasarkan Pasal 6 Permenpan Nomor 46 Tahun 2018 uraian kegiatan tugas jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian, maka upaya mengoptimalkan alsintan sudah tercover di dalam uraian kegiatan tugas jabatan tersebut. Hal ini akan dapat meningkatkan

³⁰ Sudirman. 2017. Petani Optimalkan Pompa Air Atasi Sawah yang Kekeringan.

³¹ Rahman. 2018. Menyedihkan 40 Persen Saluran Irigasi di Indonesia dalam Kondisi Rusak.

³² Asep. 2019. Petani Perlu Bantuan Pompa Air, Pemkab Bandung Janji Pinjamkan Pompa Air Secara Gratis.

efektivitas dan efisiensi baik anggaran maupun waktu untuk pengadaan dan pendistribusian alsintan.

5. Penutup

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai dampak penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) terhadap kesejahteraan petani dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak alsintan jenis traktor roda dua berdampak positif dan signifikan terhadap produksi dan kesejahteraan petani. Penggunaan traktor berdampak langsung terhadap produksi padi. Sedangkan dampak traktor terhadap tingkat kesejahteraan berdampak secara tidak langsung. Traktor merupakan jenis alsintan paling memiliki dampak yang terbesar terhadap tingkat kesejahteraan petani.
2. Dampak alsintan jenis *rice transplanter* berdampak negatif dan signifikan terhadap produksi dan kesejahteraan petani. Penggunaan *rice transplanter* berdampak langsung terhadap produksi padi. Sedangkan dampak *rice transplanter* terhadap tingkat kesejahteraan berdampak secara tidak langsung. *Rice transplanter* merupakan jenis alsintan paling tidak berdampak terhadap tingkat kesejahteraan petani.
3. Dampak alsintan jenis pompa air berdampak positif dan signifikan terhadap produksi dan kesejahteraan petani. Penggunaan pompa air berdampak langsung terhadap produksi padi. Sedangkan dampak pompa air terhadap tingkat kesejahteraan berdampak secara tidak langsung. Pompa air merupakan jenis alsintan paling memiliki dampak yang terbesar kedua terhadap tingkat kesejahteraan petani.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah untuk meningkatkan dampak penggunaan alsintan terhadap kesejahteraan petani yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan dan pendistribusian alsintan harus mengikutsertakan perhitungan luas lahan dan tingkat kesejahteraan petani yang tercermin dalam NTPP. Adapun formula perhitungan pengadaan dan pendistribusian alsintan tersebut yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Alsintan Provinsi/Kabupaten A} = & \left((\text{Persentase Luas Lahan Provinsi/Kabupaten A}) \times (60\%) (\text{Jumlah Ketersediaan Alsintan}) \right) \\ & + \left(\left(\frac{\text{Persentase NTPP Provinsi/Kabupaten A}}{\sum \text{Persentase NTPP Provinsi/Kabupaten}} \right) \times (40\%) (\text{Jumlah Ketersediaan Alsintan}) \right) \end{aligned}$$

2. Penerima bantuan alsintan untuk instansi pemerintah di daerah Provinsi/Kabupaten atau brigade alsintan dihapuskan. Sedangkan untuk pengoptimalan penggunaan alsintan, maka kementerian pertanian harus mengoptimalkan jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian yang telah ditetapkan dalam Permenpan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian. Berdasarkan Pasal 6 Permenpan Nomor 46 Tahun 2018 uraian kegiatan tugas jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian, maka upaya mengoptimalkan alsintan sudah tercover di dalam uraian kegiatan tugas jabatan tersebut. Hal ini akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik anggaran maupun waktu untuk pengadaan dan pendistribusian alsintan.

Daftar Pustaka

- Agung. (2018). *Cerita Sulitnya Bikin Traktor "Hantu", Komponen Sempat Terbakar*. Diakses kembali dari: <https://finance.detik.com/industri/d-4335418/cerita-sulitnya-bikin-traktor-hantu-komponen-semat-terbakar>.
- Asep. (2019). *Petani Perlu Bantuan Pompa Air, Pemkab Bandung Janji Pinjamkan Pompa Air Secara Gratis*. Diakses kembali dari <https://jabar.tribunnews.com/2019/06/24/petani-perlu-bantuan-pompa-air-pemkab-bandung-janji-pinjamkan-pompa-air-secara-gratis>.
- BAPPENAS. (2013). *Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) Sebagai Bahan Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019*. Jakarta. BAPPENAS.
- Daeng. (2018). *Pakai Alsintan, Petani Ngaku Lebih Hemat Biaya Operasional*. Diakses kembali dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4348127/pakai-alsintan-petani-ngaku-lebih-hemat-biaya-operasional>.
- Ditjen PSP. (2019). *Dampak Positif Bantuan Alsintan Makin Dirasakan Petani*. diakses kembali dari: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3913462/dampak-positif-bantuan-alsintan-makin-dirasakan-petani>.
- Daulay, S.B. (1999). *Menggapai Potensi Pengembangan Alsintan di Sumatera Utara*. Makalah Dialog Terbuka "Perkembangan Teknologi Pertanian di Sumatera Utara", P. Studi Teknik Pertanian, Fak. Pertanian USU, Medan –

- Fak. Pertanian Institut Teknologi Indonesia, Jakarta, FP USU, Medan, 10 Oktober 1998.
- Fadholi. (2018). *Indonesia Masih Alami Kekurangan Alsintan*. Diakses kembali dari: <https://mediaindonesia.com/read/detail/144400-indonesia-masih-alami-kekurangan-alsintan>.
- Kasriyah. (2019). *PPP Harap Jumlah Bantuan Alsintan untuk Petani Semakin Banyak*. Diakses kembali dari <https://news.detik.com/berita/d-4397646/ppp-harap-jumlah-bantuan-alsintan-untuk-petani-semakin-banyak>.
- Karyasa, I Ketut. (2018). *Kementan Klaim Program Bagi-Bagi Alsintan Sukses Sejahterakan Petani*. Diakses kembali dari: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4287982/kementan-klaim-program-bagi-bagi-alsintan-sukses-sejahterakan-petani>.
- Komariyati, dkk. (2018). *Pengaruh Penggunaan Traktor Terhadap Pendapatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Pada Usahatani Padi di Kabupaten Samba*. AGRARIS : Journal of Agribusiness and Rural Development Research. Vol 4, No.2.
- Pusdatin Kementan. (2018). *Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2018*. Jakarta. Pusdatin Kementan.
- Rahman. (2018). *Menyedihkan 40 Persen Saluran Irigasi di Indonesia dalam Kondisi Rusak*. Diakses kembali dari: <https://kupang.tribunnews.com/2018/07/18/menyedihkan-40-persen-saluran-irigasi-di-indonesia-dalam-kondisi-rusak>.
- Saleh, Chaerul. (1983). *Pengaruh Penggunaan Pompa Air Terhadap Tingkat Pendapatan Petani*. Jurnal Agro Ekonomi. Vol 3, No.1 Tahun 1983.
- Salmiah, dkk. (2016). *Analisis Dampak Penerapan Mekanisasi Usahatani Padi Terhadap Pendapatan dan Tenaga Kerja di Desa Namu Ukur Utara Kecamatan SEI Bingie Kabupaten Langkat*. Journal On Social Economic Of Agriculture and Agribusiness. Vol 5, No.6 Tahun 2016.
- Setaiwan, Arif Wahyu dkk. (2016). *Pengaruh Penggunaan Teknologi Mesin Rice Transplanter Terhadap Peningkatan Pendapatan Usahatani Padi*. Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian, Malang Tahun 2016, Hal 408-413.
- Sudirman. (2017). *Petani Optimalkan Pompa Air Atasi Sawah yang Kekeringan*. Diakses kembali dari: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/12/ow5x93-petani-optimalkan-pompa-air-atasi-sawah-yang-kekeringan>.
- Suhendrata T. (2013). *Prospek Pengembangan Mesin Tanam Pindah Bibit Dalam Rangka Mengatasi Kelangkaan Tenaga Kerja Tanam Bibit Padi*. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (SEPA) Vol. 10 No. 1 September 2013, Hal 97-102.

Susilowati *et al.* (2018). *Dampak Penggunaan Alat Mesin Panen Terhadap Kelembagaan Usaha Tani Padi*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol.16 No.1 ,Tahun 2018. Hal :73-88.